



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 06.A TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Anggaran berbasis kinerja, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Organisasi adalah unsur pemerintah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran (PPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Kode dan klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5

Susunan Akun Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 6

Kode Program dan Kegiatan Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 7

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 8

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 9

Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 10

Kode Rekening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 11

Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan mememptkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 5 September 2008

BUPATI LAMPUNG SELATAN

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RUSDI MALIKI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

I. PEDOMAN UMUM

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) didasarkan pada Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menitikberatkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai dengan hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Rakorbang Kabupaten.
- 2) Jumlah anggaran yang diusulkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertuang didalam RKA-SKPD yang di dalamnya memuat:
 - a. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD).
 - b. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 1).
 - c. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.1).
 - d. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.1.1).
 - e. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (Formulir RKA-SKPD 2.2).
 - f. Rincian Penerimaan Pembiayaan (Formulir RKA-SKPD 3.1).
 - g. Rincian Pengeluaran Pembiayaan (Formulir RKA-SKPD 3.2).
- 3) Program dan kegiatan yang tertuang didalam Formulir RKA SKPD-2.1.1 dan Formulir RKA-SKPD 2.2 terdiri dari program dan kegiatan standar dan program dan kegiatan unik/khusus.
- 4) Program dan kegiatan standar adalah program dan kegiatan yang dapat dianggarkan oleh setiap SKPD (lihat Lampiran V) dan memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan nomor 14.
- 5) Program dan kegiatan unik/khusus adalah program dan kegiatan yang hanya dapat dianggarkan oleh SKPD tertentu sesuai dengan kode urusan pemerintahan dan organisasi (lihat Lampiran VI) dan memiliki kode program mulai dari nomor 15 ke atas.
- 6) RKA-SKPD di susun berdasarkan RKA dari Unit Kerja (Unit Pelaksana Teknis Daerah – UPTD). Dari RKA Unit Kerja digabung ke dalam RKA SKPD, oleh karena itu setiap Unit Kerja secara berjenjang menurut tingkatan tanggung jawab organisasi menyusun anggaran masing-masing sesuai dengan Renstra Satuan Kerja induknya dengan menitikberatkan pada KUA dan PPA.

- 7) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau tujuan yang ditetapkan. Konsekuensinya setiap kegiatan yang diusulkan dalam RKA-SKPD mencantumkan tolok ukur dan indikator kinerja, yaitu berupa masukan (Inputs), Keluaran (Outputs), dan hasil (Outcomes).
- 8) Jumlah anggaran belanja yang diusulkan dalam RKA-SKPD berpedoman pada Analisa Standar Belanja (ASB) yang terdapat dalam pedoman ini dan standar biaya (harga satuan barang) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- 9) SKPD yang akan menyusun RKA-SKPD untuk Tahun 2009 harus sesuai dengan Kode Urusan Pemerintahan dan Organisasi yang dapat dilihat pada Lampiran III.
- 10) Program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD harus sesuai dengan program dan kegiatan yang berada pada kewenangan Urusan Pemerintahan yang berkenaan.
- 11) RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- 12) Rancangan APBD (RAPBD) dibuat berdasarkan hasil penggabungan RKA-SKPD seluruh SKPD sampai dengan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

II. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, KOORDINATOR PENGENDALI KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN.

1) Kuasa Pengguna Anggaran

- a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- b. Pejabat yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran adalah setiap Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki Unit Kerja dibawahnya, seperti Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan, Puskesmas pada Dinas Kesehatan, dan seterusnya.
- c. SKPD yang tidak memiliki Unit Kerja tidak diperkenankan memiliki Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. Perkecualian untuk huruf c diatas adalah bagi Sekretariat Daerah, dapat ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk masing-masing Bagian. Bupati dan Wakil Bupati dengan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Kepala DPPKAD.

2) Bendahara Penerimaan

- a. Setiap satuan kerja yang menurut tugas pokok dan fungsinya melakukan pemungutan pendapatan daerah diangkat satu bendahara penerimaan dan beberapa pembantu bendahara penerimaan.

- b. Bendahara penerimaan diangkat dengan Keputusan Bupati dan pembantu bendahara penerimaan diangkat dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
- c. Jumlah pembantu bendahara penerimaan didasarkan pada pertimbangan besaran SKPD, beserta besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- d. Bendahara penerimaan dan pembantu bendahara penerimaan memperoleh tunjangan/honor setiap bulannya yang besarnya diatur dalam Analisa Standar Biaya (ASB) dan klasifikasinya dikelompokkan dalam belanja langsung dengan jenis belanja pegawai.

3) Bendahara Pengeluaran

- a. Pada setiap Satuan Kerja diangkat satu bendahara pengeluaran dan beberapa pembantu bendahara pengeluaran.
- b. Bendahara pengeluaran diangkat dengan Keputusan Bupati dan pembantu bendahara pengeluaran diangkat dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
- c. Khusus untuk pengelolaan anggaran Bupati dan Wakil Bupati diangkat masing-masing 1 (satu) orang bendahara pengeluaran dan beberapa pembantu bendahara pengeluaran yang berasal dari pejabat/pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Khusus untuk pembantu bendahara pengeluaran pada anggaran Bupati dan Wakil Bupati diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).
- e. Jumlah pembantu bendahara pengeluaran didasarkan pada pertimbangan besaran SKPD, jumlah program dan kegiatan beserta besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- f. Sebagai pedoman namun tidak mengikat, jumlah pembantu bendahara pengeluaran adalah sebanyak jumlah kegiatan yang unik/khusus ditambah 5 pembantu bendahara pengeluaran (Kasir, Juru Bayar Gaji, Petugas Pembukuan, Petugas Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran yang khusus menangani pengeluaran untuk seluruh kegiatan standar).
 - 1) Khusus untuk DPPKAD, selain pembantu bendahara pengeluaran di atas diangkat juga pembantu bendahara pengeluaran yang menangani Belanja Tidak Langsung selain Belanja Pegawai.
 - 2) Khusus kecamatan, pembantu bendahara pengeluaran hanya diperbolehkan 1 (satu) orang.
 - 3) Khusus untuk sekolah, pembantu bendahara pengeluaran tidak diperbolehkan lebih dari 2 (dua) orang.
 - 4) Khusus untuk puskesmas, pembantu bendahara pengeluaran tidak diperbolehkan lebih 2 (dua) orang.

- 5) Khusus untuk Sekretariat Daerah, pembantu bendahara pengeluaran hanya diperbolehkan 1 (satu) orang untuk setiap Bagian.
- g. Bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran memperoleh tunjangan/honor setiap bulannya yang besarnya diatur dalam SAB dan klasifikasinya dikelompokkan dalam belanja langsung dengan jenis belanja pegawai.

4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- a. Seluruh program dan kegiatan standar (kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan 14), ditunjuk 1 (satu) orang pelaksana teknis kegiatan, 1 (satu) sekretaris kegiatan, dan beberapa staf kegiatan.
- b. Khusus untuk program dan kegiatan yang unik/khusus (kode program mulai dari nomor 15 ke atas), setiap kegiatan yang unik/khusus ditunjuk 1 (satu) orang pelaksana teknis kegiatan, 1 (satu) sekretaris kegiatan, dan beberapa staf kegiatan.
- c. PPTK, sekretaris kegiatan, dan staf kegiatan diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD.
- d. Jumlah staf kegiatan didasarkan pada pertimbangan besaran jumlah program dan kegiatan beserta beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- e. PPTK, sekretaris kegiatan, dan staf kegiatan memperoleh tunjangan/honor yang besarnya diatur dalam ASB dan klasifikasinya dikelompokkan dalam belanja langsung dengan jenis belanja pegawai.
- f. Khusus untuk PPTK, sekretaris kegiatan, dan staf kegiatan yang mengelola seluruh program dan kegiatan standar memperoleh tunjangan/honor setiap bulan yang dianggarkan pada salah satu kegiatan standar dalam kelompok belanja langsung dengan jenis belanja pegawai.
- g. Bila tunjangan/honor untuk PPTK, sekretaris kegiatan, dan staf kegiatan yang mengelola seluruh program dan kegiatan standar telah dianggarkan pada 1 (satu) kegiatan standar maka dilarang menganggarkan tunjangan/honor pada kegiatan standar lainnya.
- h. Untuk PPTK, sekretaris kegiatan, dan staf kegiatan yang mengelola kegiatan yang unik/khusus memperoleh tunjangan/honor selama jumlah waktu pengelolaan kegiatan unik/khusus tersebut dengan batasan minimal dan maksimal sebagaimana diatur dalam ASB edaran ini.
- i. Bagi pegawai yang menjabat sebagai PPTK, sekretaris kegiatan, dan staf kegiatan yang mengelola lebih dari satu kegiatan khusus/unik dan atau selain mengelola seluruh program dan kegiatan standar juga mengelola kegiatan khusus/unik dapat diberikan tunjangan/honor maksimum 2 (dua) kali yang dianggarkan pada belanja pegawai kegiatan khusus/unik yang berkenaan sepanjang pegawai yang bersangkutan memiliki uraian tugas/pekerjaan dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan Keputusan Pengguna Anggaran tentang pengangkatan PPTK, sekretaris kegiatan, dan atau staf kegiatan.

5) Koordinator Pengendali Kegiatan

- a. Khusus untuk program dan kegiatan yang wajib/pilihan (kode program mulai dari nomor 15 ke atas), seluruh program dan kegiatan pada satu sub bidang/sub dinas ditunjuk 1 (satu) orang koordinator pengendali kegiatan.
- b. Koordinator pengendali kegiatan diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD.
- c. Koordinator pengendali kegiatan memperoleh tunjangan/honor yang besarnya diatur dalam ASB dan klasifikasinya dikelompokkan dalam belanja langsung dengan jenis belanja pegawai.
- d. Untuk koordinator pengendali kegiatan yang mengendalikan kegiatan pilihan/wajib memperoleh tunjangan/honor selama jumlah waktu pengelolaan kegiatan wajib/pilihan tersebut dengan batasan minimal dan maksimal sebagaimana diatur dalam ASB edaran ini.
- e. Bagi pegawai yang menjabat koordinator pengendali kegiatan yang mengendalikan lebih dari satu PPTK pada setiap kegiatan wajib/pilihan dapat diberikan maksimum 2 (dua) tunjangan/honor yang dianggarkan pada belanja pegawai kegiatan wajib/pilihan yang berkenaan, sepanjang pegawai yang bersangkutan memiliki uraian tugas/pekerjaan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Keputusan Pengguna Anggaran tentang pengangkatan koordinator pengendali kegiatan.

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan

- a. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- b. PPK-SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Koordinator Pengendali Kegiatan atau Pelaksanaa Teknis Kegiatan.
- c. Untuk membantu pelaksanaan tugas PPK-SKPD, kepala SKPD menetapkan 2 (dua) orang staf sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- d. Pembantu PPK-SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.
- e. Untuk PPK dan Pembantu PPK memperoleh tunjangan/honor selama jumlah waktu pengelolaan kegiatan unik/khusus tersebut dengan batasan minimal dan maksimal sebagaimana diatur dalam ASB edaran ini.

III. KODE REKENING

Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, setiap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah harus menggunakan kode rekening yang terdiri dari:

1) Kode Urusan Pemerintahan

- a. Kode urusan pemerintahan terdiri dari 3 digit (X.XX).

- b. Satu digit pertama untuk Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan dua digit terakhir untuk Kode Urusan Pemerintahan sesuai dengan Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang berkenaan.
- c. Kode urusan pemerintahan dapat dilihat pada Lampiran III.

2) Kode Organisasi

- a. Kode organisasi terdiri dari 2 digit (XX).
- b. Dua digit pertama untuk kode Satuan Kerja sesuai dengan Kode Urusan Pemerintahan yang berkenaan. Dua digit terakhir untuk kode Unit Kerja/UPTD sesuai dengan Kode Satuan Kerja yang berkenaan.
- c. Kode Organisasi dapat dilihat pada Lampiran III.

3) Kode Program

- a. Kode program terdiri dari 2 digit (XX).
- b. Kode program dengan nomor 01 sampai dengan nomor 14 adalah program yang **dapat dilaksanakan oleh seluruh SKPD kecuali diatur lain oleh Edaran ini** selanjutnya disebut **Kode Program Standar** dan kode program 15 ke atas adalah kode program yang **hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD tertentu yang berada pada Kode Urusan Pemerintahan yang berkenaan** selanjutnya disebut **Kode Program Khusus/Unik**.
- c. Kode program hanya diisi untuk kelompok belanja langsung sesuai dengan kode programnya yang bersesuaian. Sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung kode program diisi 00.
- d. Kode program dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI.
- e. Untuk SKPD yang mengganggu pendapatan dan pembiayaan daerah kode program ditulis 00.

4) Kode Kegiatan

- a. Kode kegiatan terdiri dari 2 digit (XX).
- b. Kode kegiatan dapat bernomor dari 01 sampai dengan nomor 99. Kegiatan terdiri dari kegiatan yang standar dan kegiatan yang khusus/unik.
- c. Kegiatan standar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh SKPD kecuali diatur lain oleh Edaran ini. Suatu kegiatan disebut kegiatan standar apabila kegiatan tersebut terdapat didalam program yang standar.
- d. Kegiatan unik/khusus adalah kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD tertentu. Suatu kegiatan disebut kegiatan yang unik/khusus apabila kegiatan tersebut terdapat didalam program yang khusus/unik.

- e. Kode kegiatan hanya diisi untuk kelompok belanja langsung sesuai dengan kode kegiatan yang bersesuaian. Sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung kode kegiatan diisi 00.
- f. Kode rekening untuk kegiatan standar dan kegiatan khusus/unik dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI.
- g. Untuk SKPD yang menganggarkan pendapatan kode kegiatan ditulis 00.

5) Kode Akun

- a. Kode akun terdiri dari 1 digit (X).
- b. Kode akun dapat di lihat pada Lampiran IV.

6) Kode Kelompok

- a. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (X).
- b. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat di lihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX.

7) Kode Jenis

- a. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (X).
- b. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat di lihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX.

8) Kode Objek

Kode objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX.

9) Kode Rincian Objek

Kode rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX.

10) Contoh Kode Rekening

Berikut ini contoh kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Nama satuan kerja	: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Lampung Selatan
Nama Program	: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Nama Kegiatan	: Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
Pendapatan	: Penerimaan dari Dana Alokasi Umum
Belanja	: Pengeluaran untuk Pembelian Kertas

Penerimaan Pembiayaan : Penerimaan pinjaman dari Bank

Pengeluaran Pembiayaan : Pengeluaran untuk Penyertaan Modal pada Bank Lampung

Dari asumsi di atas maka Kode Rekening Pendapatan adalah:

1.20	1.20	06	00	00	4	2	2	01	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

Kode Rekening Belanja adalah:

1.20	1.20	06	17	02	5	2	2	01	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

Kode Rekening Penerimaan Pembiayaan adalah:

1.20	1.20	06	00	00	6	1	4	03	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

Kode Rekening Pengeluaran Pembiayaan adalah:

1.20	1.20	06	00	00	6	2	2	02	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

IV. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

1) Petunjuk Umum

- Penyusunan anggaran pendapatan daerah didasarkan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima dan diperoleh pada tahun anggaran 2009.
- Anggaran pendapatan hanya disusun oleh Satuan Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus memungut, menerima, mencatat, dan menyetorkan pendapatan daerah ke rekening kas daerah.
- Anggaran pendapatan daerah dituangkan dalam **Formulir RKA-SKPD I**.

2) Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan menurut kelompok pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut jenis pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menurut jenis pendapatan terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil;
- 2) Dana Alokasi Umum; dan

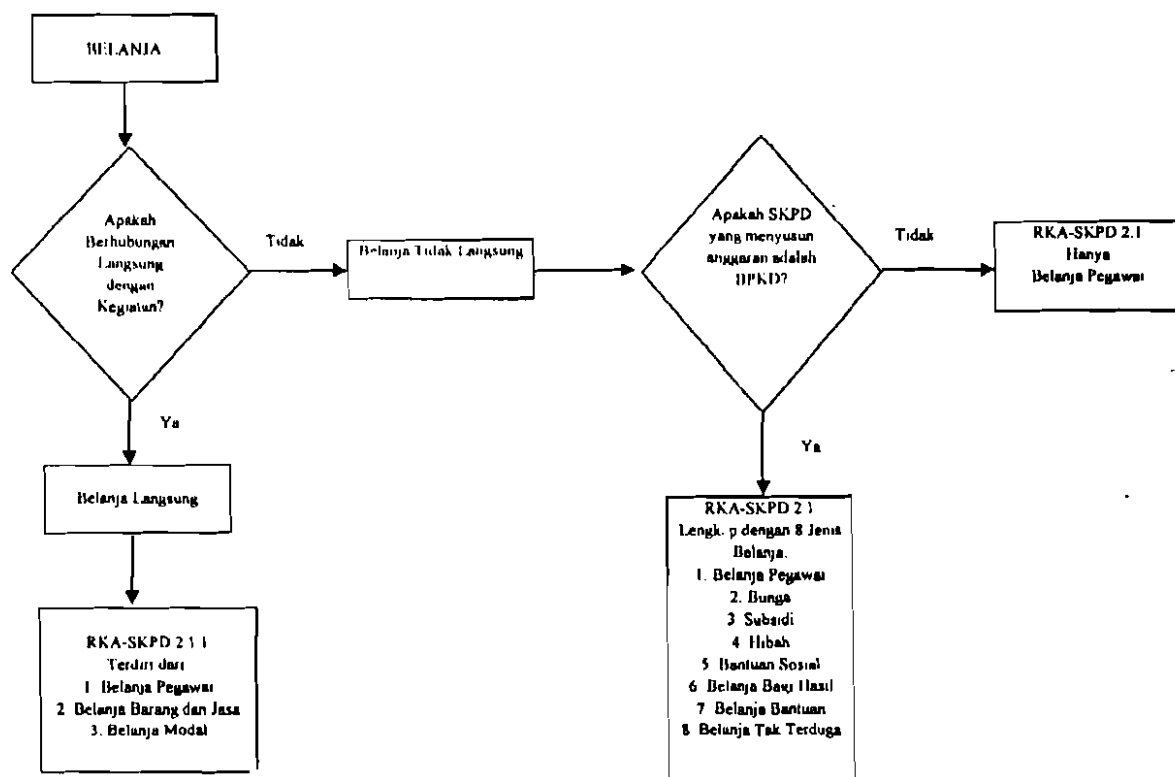
- 3) Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah menurut jenis pendapatan terdiri dari:
 - 1) Hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Kelompok Masyarakat/Perorangan, dan Lembaga Luar Negeri Yang Tidak Mengikat;
 - 2) Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - 4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - 5) Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

V. PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

1) Petunjuk Umum

- a. Pengklasifikasian suatu belanja ke dalam kelompok belanja adalah dengan cara mengidentifikasi apakah belanja yang dikeluarkan tersebut termasuk kedalam kelompok belanja tidak langsung atau belanja langsung.
- b. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan sehingga keberadaannya bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan maka belanja tidak langsung tidak memiliki kode program dan kode kegiatan. Belanja tidak langsung dituangkan dalam **Formulir RKA-SKPD 2.1**.
- c. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan sehingga keberadaannya merupakan konsekuensi karena adanya suatu program atau kegiatan tersebut. Karena berkaitan dengan program dan kegiatan maka belanja langsung *harus* memiliki kode program dan kode kegiatan. Belanja langsung dituangkan dalam **Formulir RKA-SKPD 2.1.1**.
- d. Belanja Tidak Langsung menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
- e. Khusus untuk SKPKD (DPPKAD) belanja tidak langsung dianggarkan dengan 8 (delapan) jenis belanja yang lengkap pada **Formulir RKA-SKPD 2.1**. Sedangkan untuk SKPD (Satker selain DPPKAD), belanja tidak langsung hanya Belanja Pegawai, dan diluar belanja tidak langsung adalah Belanja Langsung yang penganggarnya dituangkan dalam **Formulir RKA-SKPD 2.1.1**.
- f. Belanja Langsung memiliki 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

- g. Diagram alur (*flowchart*) untuk mengidentifikasi belanja ke dalam kelompok belanja, dapat dilihat dibawah ini.



2) Indikator Kinerja dan Klasifikasi Belanja

a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari suatu kegiatan yang menggambarkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk penilaian kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator sebagai berikut:

1) Masukan (Inputs) :

Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber, baik sumber Dana, Sumberdaya Manusia, Material, Teknologi dan sebagainya yang dilaksanakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.

- Cantumkan Jumlah Dana untuk setiap jenis masukan;
- Identifikasi Jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, baik jumlah pengelola maupun yang dikelola bila ada (contoh: peserta pelatihan).

2) Keluaran (Outputs) :

Tolak ukur kinerja berdasarkan produk (Barang atau Jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai masukan yang digunakannya, misalnya :

- Panjang saluran irigasi yang dibangun (m).
- Panjang jalan yang dibangun (km).
- Luas areal sawah yang dicitak (hektar)
- Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang), dsb.

3) Hasil (Outcomes)

Tolak ukur kinerja yang berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya:

- Jumlah anak sekolah yang dapat ditampung.
- Peningkatan jumlah luas sawah yang beririgasi teknis.
- Jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan, dsb.

Indikator Kinerja hendaknya :

- Spesifik dan jelas.
- Dapat diukur secara obyektif.
- Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
- Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan.
- Efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.

b. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja adalah sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk didalamnya uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Dihitung berdasarkan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

- (3) Gaji dan segala jenis tunjangan lainnya dianggarkan berdasarkan daftar gaji bulan Oktober 2008 di kali 13 bulan ditambah Accres 5 %.
 - (4) Belanja Pegawai supaya diperhitungkan kenaikan Gaji Pokok 15 % dengan prioritas para pegawai golongan bawah, untuk pembayaran gaji ketiga belas dan termasuk dalam rangka pengisian Formasi Pegawai dalam Tahun 2009.
 - (5) Untuk CPNS dihitung sebagai PNS (dihitung penuh)
 - (6) Formasi pejabat struktural yang belum terisi pada tahun 2009 tetap dianggarkan penuh.
 - (7) Termasuk dalam anggaran adalah perhitungan PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah.
 - (8) Anggaran untuk pegawai honor daerah (honda) dianggarkan dalam anggaran Sekretariat Daerah sehingga masing – masing satuan kerja tidak menganggarkan gaji pegawai honor pada RKA-SKPD, Kecuali Kantor Polisi Pamong Praja, Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum.
- b) Bunga
- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c) Subsidi
- Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d) Hibah
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e) Bantuan Sosial
- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- f) Belanja Bagi Hasil
- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah kepada pemerintah desa atau kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g) Bantuan Keuangan

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

h) Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa

- (1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan, kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- (3) Pembelian/pengadaan barang diklasifikasikan ke dalam belanja barang dan jasa apabila harga satuan barang tersebut lebih kecil dari Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pengecualian dilakukan atas barang yang menurut klasifikasinya masuk kedalam kelompok belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Barang tersebut harus diklasifikasikan

kedalam kelompok belanja modal walaupun nilai satuannya lebih kecil dari Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan yang termasuk kedalam jenis belanja barang dan jasa adalah belanja pemeliharaan untuk mempertahankan fungsi pelayanan minimal dari aset milik Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak termasuk pemeliharaan yang merupakan rehabilitasi berat sehingga aset milik pemerintah daerah bertambah fungsi, manfaat, serta umur ekonomisnya. Pemeliharaan yang masuk kategori rehabilitasi berat bila nilainya diatas 25 % dari perolehan aset tersebut. Pemeliharaan demikian harus dianggarkan kedalam jenis belanja modal.

c) Belanja Modal.

- (1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- (2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset tersebut.
- (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

VI. PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1) Petunjuk Umum

- a. Pembiayaan daerah *hanya* dianggarkan pada RKA-SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- b. Karena dalam penganggaran pembiayaan daerah tidak dikenal program dan kegiatan, maka kode program dan kegiatan ditulis 00.
- c. Penerimaan Pembiayaan daerah dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 3.1 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 3.2.

2) Klasifikasi Pembiayaan

Klasifikasi pembiayaan daerah menurut kelompok pembiayaan daerah terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan Daerah menurut jenis penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa);
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
- 6) Penerimaan Piutang Daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Klasifikasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah menurut jenis pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- 3) Pembayaran Pokok Utang; dan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah.

VI. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN BENTUK FORMULIR

1. Prosedur Konversi RASK Sesuai dengan Kepmendagri 29/2002 Menjadi RKA-SKPD Sesuai dengan Permendagri 13/2006 atau Permendagri 59/2007

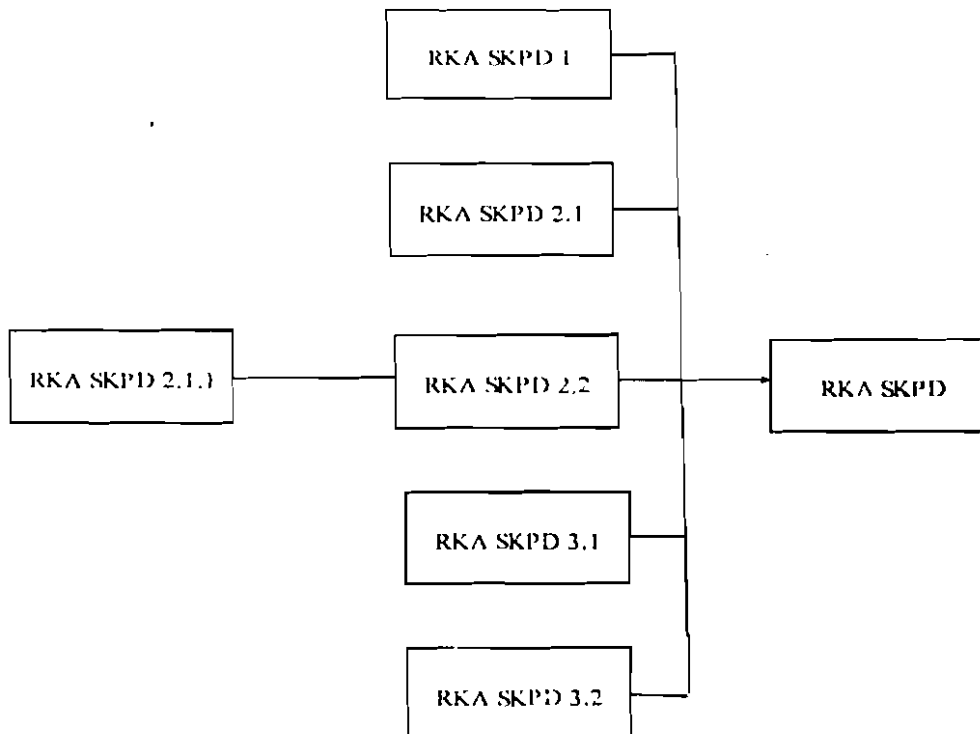
- a. Prosedur penyusunan anggaran yang tertuang didalam RASK Satuan Kerja sesuai dengan Kepmendagri 29 Tahun 2002 meliputi:
 - 1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi (Formulir S1)
 - 2) Program (Formulir S2)
 - 3) Program dan Kegiatan (Formulir S2 A)
 - 4) Ringkasan Anggaran (Formulir S3)

- 5) Rekapitulasi Anggaran Pendapatan (**Formulir S3 A**)
 - 6) Anggaran Pendapatan per Kegiatan (**Formulir S3 A1**)
 - 7) Rekapitulasi Anggaran Belanja (**Formulir S3 B**)
 - 8) Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung (**Formulir S3 B1**)
 - 9) Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan (**Formulir S3 B1.1**)
 - 10) Rincian Anggaran Belanja Langsung per kegiatan (**Lampiran Formulir S3 B1.1/LK**)
 - 11) Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (**Formulir S3 B2**)
 - 12) Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung (**Lampiran Formulir S3.B2/LK**)
- b. Agar Formulir RASK sesuai dengan Kepmendagri 29 Tahun 2002 menjadi Formulir RKA-SKPD sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 perlu dilakukan konversi sebagai berikut:
- 1) Seluruh informasi yang terdapat dalam formulir S1, S2, dan S2A **tidak** dicantumkan dalam penyusunan RKA-SKPD. Khusus untuk program dan kegiatan sudah ditentukan pada proses pembuatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).
 - 2) **Formulir S3** memuat ringkasan anggaran sampai dengan **objek belanja**. Formulir yang serupa adalah **Formulir RKA-SKPD** yang memuat ringkasan anggaran sampai dengan **jenis belanja**.
 - 3) Dalam penyusunan RKA-SKPD **tidak terdapat Formulir S3 A**, yang ada adalah Formulir yang serupa dengan **Formulir S3 A1** (anggaran pendapatan per kegiatan) yaitu **Formulir RKA-SKPD 1**.
 - 4) Seluruh informasi dalam **Formulir S3 B** dan **Formulir S3 B1** tidak dicantumkan dalam penyusunan RKA-SKPD.
 - 5) **Formulir S3 B1.1** dan **Lampiran Formulir S3 B1.1/LK** Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan dikonversi ke dalam **Formulir RKA-SKPD 2.1.1** yang memuat belanja per kegiatan dalam satu program yang bersesuaian dan rekapitulasi Program dan Kegiatan dicantumkan dalam **Formulir RKA-SKPD 2.2**.
 - 6) **Formulir S3 B2** dan **Lampiran Formulir S3 B2/LK** Anggaran Belanja Tidak Langsung dikonversi ke dalam **Formulir RKA-SKPD 2.1** yang memuat belanja tidak langsung. Untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah belanja tidak langsung terdiri dari 8 jenis belanja sesuai dengan penjelasan pada Bab V angka 1) huruf e, sedangkan untuk SKPD selain Badan Pengelola Keuangan Daerah belanja tidak langsung **hanya** Belanja Pegawai.
 - 7) Anggaran belanja pada **Formulir S3 B2** terdiri dari Belanja Administrasi Umum yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas. Dalam **Formulir RKA-SKPD 2.1**, setiap SKPD selain DPPKAD **hanya** menganggarkan Belanja Pegawai saja, sedangkan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas harus

dianggarkan dalam **Formulir RKA-SKPD 2.1.1** pada program dan kegiatan yang standar.

2. Prosedur Penyusunan RKA-SKPD

a. Formulir RKA-SKPD

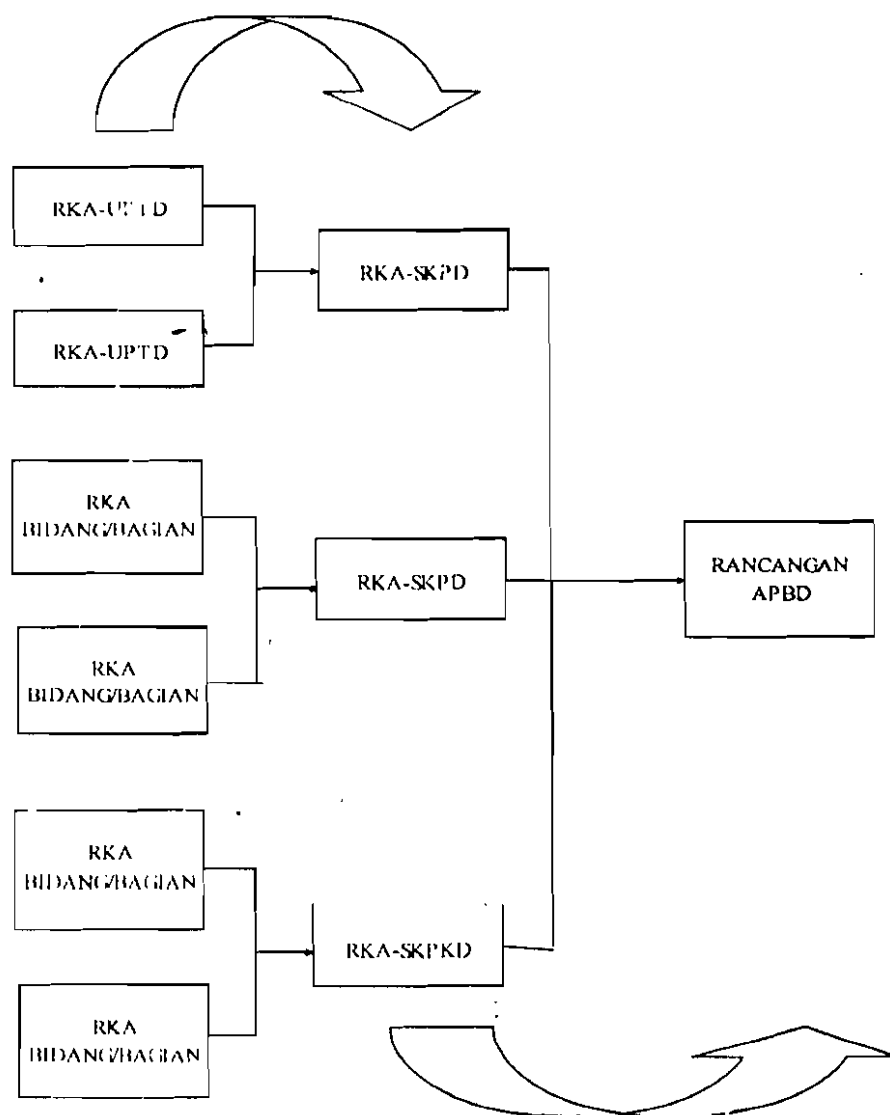


Berdasarkan diagram di atas prosedur penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap SKPD yang memiliki fungsi pengelolaan pendapatan daerah membuat **Formulir RKA-SKPD 1** tentang Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Formulir RKA-SKPD 1 memuat anggaran sampai **rincian objek** pendapatan daerah.
- 2) Selanjutnya setiap SKPD membuat **Formulir RKA-SKPD 2.1** tentang Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah. Khusus untuk SKPKD yaitu DPPKAD (PPKD), anggaran belanja tidak langsung terdiri dari 8 (delapan) jenis belanja sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab V angka 1) huruf e, dan SKPD selain DPPKAD **hanya** menganggarkan Belanja Pegawai. Formulir RKA-SKPD 2.1 memuat anggaran sampai **rincian objek** belanja daerah.
- 3) Selanjutnya setiap SKPD membuat **Formulir RKA-SKPD 2.1.1** tentang Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja langsung dalam Formulir RKA-SKPD 2.1.1 terdiri dari belanja kegiatan standar dan kegiatan unik/khusus. Kegiatan standar memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan 14 dan kegiatan unik/khusus memiliki kode program mulai dari nomor 15 ke atas sesuai dengan kode program pada Urusan Pemerintahan dan Organisasi masing-masing SKPD. Formulir RKA-SKPD 2.1.1 memuat anggaran sampai **rincian objek** belanja daerah.

- 4) Selanjutnya setiap SKPD membuat **Formulir RKA-SKPD 2.2** tentang Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Formulir RKA-SKPD 2.2 merupakan rekapitulasi dari Formulir RKA SKPD 2.1.1.
 - 5) Selanjutnya DPPKAD selaku SKPD membuat **Formulir RKA-SKPD 3.1** tentang Rincian Penerimaan Pembiayaan dan **Formulir RKA-SKPD 3.2** tentang Rincian Pengeluaran Pembiayaan. SKPD selain DPPKAD tidak perlu membuat Formulir RKA-SKPD 3.1 dan Formulir RKA-SKPD 3.2. Formulir RKA-SKPD 3.1 dan Formulir RKA-SKPD 3.2 memuat anggaran sampai **rincian objek** pembiayaan daerah.
 - 6) Selanjutnya dari seluruh formulir RKA-SKPD di atas direkapitulasi menjadi **Formulir RKA-SKPD** tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Formulir RKA-SKPD memuat anggaran hanya sampai **jenis** pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
- b. Rekapitulasi RKA-SKPD tingkat SKPD dan Se-Kabupaten
- 1) Berikut ini diagram penyusunan RKA-SKPD baik untuk tingkat SKPD maupun se-Kabupaten.

Rekapitulasi RKA Tingkat SKPD



Rekapitulasi RKA Se-Kabupaten

- 2) Berdasarkan diagram di atas, rancangan Perda APBD disusun berdasarkan seluruh RKA-SKPD yaitu RKA-SKPD non SKPKD dan RKA-SKPD SKPKD. Sedangkan RKA-SKPD baik RKA-SKPD non SKPKD maupun RKA-SKPD SKPKD disusun berdasarkan RKA Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), misalnya RKA-SKPD Dinas Pendidikan disusun berdasarkan rekapitulasi RKA-SKPD Dinas Pendidikan (anggaran Dinas Pendidikan diluar anggaran SMU dan SMP) ditambah RKA-Unit Kerja SMA ditambah RKA-Unit Kerja SMP. RKA-SKPD Sekretariat Daerah disusun berdasarkan rekapitulasi RKA-Unit Kerja masing-masing Bidang/Bagian pada Sekretariat Daerah.
- 3) Program dan Kegiatan Standar
 - a) Kegiatan standar dapat dianggarkan pada masing-masing Unit Kerja pada SKPD sepanjang hal tersebut memang diperlukan.
 - b) Jumlah dan besaran kegiatan standar untuk masing-masing Unit Kerja diatur oleh Pengguna Anggaran.
 - c) Jumlah dan besaran kegiatan standar pada SKPD yang dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan rekapitulasi kegiatan standar dari RKA-SKPD Unit Kerja 2.2.1.
- 4) Program dan Kegiatan Unik/Khusus
 - a) Unit Kerja pada SKPD tidak dapat menganggarkan kegiatan unik/khusus apabila sudah dianggarkan oleh Unit Kerja yang lain.
 - b) Bila suatu kegiatan unik/khusus pelaksanaannya melibatkan banyak Unit Kerja pada suatu SKPD, maka penganggarannya hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang paling mendekati atas kegiatan tersebut.

3. Format Formulir RKA-SKPD

a. Sampul Depan RKA-SKPD

LOGO DAERAH	
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)	
TAHUN ANGGARAN 2009	
Urusan Pemerintahan	: X. XX
Organisasi	: X. XX. XX
Pengguna Anggaran :	
a. Nama	:
b. NIP	:
c. Jabatan	:
K O D E	NAMA FORMULIR
RKA-SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat
RKA-SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA-SKPD 3.1	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

b. Formulir RKA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

LOGO DAERAH	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RKA-SKPD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009		
Urusan Pemerintahan : X. XX		
Organisasi : X. XX. XX		
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
4	PENDAPATAN	
5	BELANJA	
	SURPLUS / (DEFISIT) :	
6	PEMBIAYAAN	
Kalianda, 2008 KEPALA SKPD _____ NIP		

c. Formulir RKA-SKPD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

LOGO DAERAH	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RKA-SKPD 1																				
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009																						
Urusan Pemerintahan : X. XX																						
Organisasi : X. XX. XX																						
KODE REKENING	URAIAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">RINCIAN PERHITUNGAN</th> <th style="text-align: center;">JUMLAH (RP)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Volume</th> <th style="text-align: center;">Satuan</th> <th style="text-align: center;">Tarif/Marga*</th> <th></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6 = 3x5</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 150px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">JUMLAH PENDAPATAN</td> <td></td> </tr> </table>	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	Volume	Satuan	Tarif/Marga*		3	4	5	6 = 3x5					JUMLAH PENDAPATAN			
RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)																			
Volume	Satuan	Tarif/Marga*																				
3	4	5	6 = 3x5																			
JUMLAH PENDAPATAN																						
Kallanda, 2008 KEPALA NIP																						
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst																						
	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN																			

d. **Formulir RKA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah)**

LOGO DAERAH	PENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RKA-SKPD 2.1				
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009						
Urusan Pemerintahan : X. XX						
Organisasi : X. XX. XX						
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2009				TAHUN 2009
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG						
Kallanda, 2008 KEPALA NIP						
Keterangan: Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2.						
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH						
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		
1						
2						
3						

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1
	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009	

Pusat Pemerintahan	:	X.XX
Spesifikasi	:	X. XX. X. XX. XX.....
Program	:	X. XX. X. XX. XX. XX
Anggaran	:	X. XX. XX. X. XX. XX.....
Kategori Kegiatan	:	
Berkas Tahun 2007	:	Rp - (.....)
Berkas Tahun 2008	:	Rp - (.....)
Berkas Tahun 2009	:	Rp - (.....)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Tahun 2008
Uraian Program	:	
Aspek	:	
Metode	:	
Hasil	:	
Kompok Sasaran	:	

[illegible]

NIP

Strangan
Anggal Pembahasan
Utuan Hasil Pembahasan

No	Nama	NIP	JABATAN
1			
2			

f. Formulir RKA-SKPD 2.2 (Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RKA-SKPD 2.2							
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009									
Urusan Pemerintahan : X. XX									
Organisasi : X. XX. X. XX. XX									
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
KODE		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
PROGRAM	KEGIATAN				TAHUN n			TAHUN 2009	
					BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	Belanja Modal		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7	10
JUMLAH									
Kalianda, 2008 KEPALA NIP									

g. Formulir RKA-SKPD 3.1 (Rincian Penerimaan Pembiayaan)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RKA-SKPD 3.1		
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009				
Urusan Pemerintahan : X. XX				
Organisasi : X. XX. XX				
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah				
Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (RP)		
1	2	3		
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Kalianda, 2008 KEPALA NIP				
KETERANGAN : TANGGAL PEMBAHASAN : CATATAN HASIL PEMBAHASAN : 1. 2. dst.				
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	Nama	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
dst				

Formulir RKA-SKPD 3.2 (Rincian Pengeluaran Pembiayaan)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 16 . A TAHUN 2008

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2008

RINGKASAN PROYEKSI APBD TAHUN 2009

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		TA (n-1)	Proyeksi TA (n)	Rp	%
1	PENDAPATAN DAERAH	980.653.463.244,00	822.992.186.715,00	139.649.412.491,67	14,24
1.1	Pendapatan Asli Daerah	50.370.555.902,00	87.649.876.702,67	37.279.320.800,67	74,01
1.1.1	Pajak Daerah	12.025.000.000,00	7.520.000.000,00	(4.505.000.000,00)	-37,46
1.1.2	Retribusi Daerah	11.113.000.000,00	10.023.500.000,00	(1.089.500.000,00)	-9,80
1.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	5.132.625.102,00	3.342.500.000,00	(1.790.125.102,00)	-34,88
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	22.099.930.800,00	66.763.876.702,67	44.663.945.902,67	202,10
1.2	Dana Perimbangan	838.159.293.342,00	596.677.010.012,33	55.828.405.691,00	6,66
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	102.296.643.342,00	74.692.170.012,33	(27.604.473.329,67)	(26,98)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	658.043.650.000,00	444.677.840.000,00	(213.365.810.000,00)	-32,42
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	77.819.000.000,00	77.307.000.000,00	(512.000.000,00)	-0,66
1.3	Lain-Lain Pendapatan - Daerah Yang Sah	92.123.614.000,00	138.665.300.000,00	46.541.686.000,00	50,52
1.3.1	Hibah	4.500.000.000,00	10.200.000.000,00	5.700.000.000,00	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi & Pemda Lainnya	81.780.246.000,00	58.365.300.000,00	(23.414.946.000,00)	(28,63)
1.3.4	Dana Penyesuaian Otsus	5.743.368.000,00	70.000.000.000,00	64.256.632.000,00	1.118,80
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prop. atau Pemda Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
	Jumlah Pendapatan	980.653.463.244,00	822.992.186.715,00	139.649.412.491,67	14,24
2	BELANJA DAERAH	975.199.952.899,63	772.473.186.680,00	(202.726.766.219,63)	(20,79)
2.1	Belanja Tidak Langsung	591.028.843.134,63	502.206.268.825,00	(88.822.574.309,63)	(15,03)
2.1.1	Belanja Pegawai	461.495.752.111,51	425.262.930.320,00	(36.232.821.791,51)	(7,85)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-
2.1.4	Belanja Hibah	55.412.980.000,00	25.136.985.000,00	(30.275.995.000,00)	(54,64)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	41.628.658.354,00	6.141.325.000,00	(35.487.333.354,00)	(85,25)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota & Pem.des	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	31.984.229.000,00	36.662.550.000,00	4.678.321.000,00	14,63
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	407.223.669,12	9.002.478.505,00	8.595.254.835,88	2.110,70
2.2	Belanja Langsung	384.171.109.766,00	270.266.917.855,00	(113.904.191.910,00)	(29,66)
2.2.1	Belanja Pegawai	60.124.019.200,00	41.810.582.300,00	(18.313.436.900,00)	(30,46)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.649.159.040,00	77.435.611.410,00	(44.213.547.630,00)	(36,35)
2.2.3	Belanja Modal	202.397.931.526,00	151.020.724.145,00	(51.377.207.380,00)	(25,38)
	Jumlah Belanja	975.199.952.899,63	772.473.186.680,00	(202.726.766.219,63)	(20,79)
	Surplus/(Defisit)	5.453.510.344,37	60.519.000.035,00	(45.065.489.690,63)	(826,36)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	8.005.198.260,63	13.125.000.000,00	5.119.801.739,37	63,96
	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	7.750.198.260,63	13.000.000.000,00	5.249.801.739,37	67,74
	Pencatatan Dana Cadangan	-	-	-	-

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		TA (n-1)	Proyeksi TA (n)	Rp	%
	Hasil Penjualan Kekayaan	-	-	-	-
	Daerah yang Dipasarkan	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	255.000.000	125.000.000,00	(130.000.000,00)	
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8.005.198.260,63	13.125.000.000,00	5.119.801.739,37	63,96
32	Pengeluaran Pembiayaan	13.458.708.605,00	63.644.000.035,00	50.185.291.430,00	372,88
32.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(66,67)
	Pembayaran Pokok Utang	10.333.708.605,00	62.644.000.035,00	52.310.291.430,00	506,21
	Pemberian Pinjaman Daerah	125.000.000,00	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.458.708.605,00	63.644.000.035,00	50.185.291.430,00	372,88
	Pembiayaan Neto	(5.453.510.344,37)	(50.519.000.035,00)	(45.065.489.690,63)	826,36
	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Berkenan	0,00	0,00	(0,00)	-

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

WENDY MELFA

KODE DAN KLASIFIKASI
URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, DAN UNIT KERJA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1	01				Pendidikan
1	01	1	01	01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	02				Kesehatan
1	02	1	02	01	Dinas Kesehatan
1	02	1	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda
1	03				Pekerjaan Umum
1	03	1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum
1	06				Perencanaan Pembangunan
1	06	1	06	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	07				Perhubungan
1	07	1	07	01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	08				Lingkungan Hidup
1	08	1	08	01	Badan Lingkungan Hidup Daerah
1	08	1	08	02	Dinas Pasar dan Kebersihan
1	10				Kependudukan dan Catatan Sipil
1	10	1	10	01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	11	1	11	01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	13				Sosial
1	13	1	13	01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	15				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	15	1	15	01	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
1	16				Penanaman Modal
1	16	1	16	01	Kantor Penanaman Modal
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1	19	1	19	01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1	19	1	19	02	Kantor Satuan Pol. PP

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1	20	1	20	01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1	20	1	20	02	Bupati dan wakil Bupati
1	20	1	20	03	Sekretariat Daerah Kabupaten
1	20	1	20	04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1	20	1	20	05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD)
1	20	1	20	06	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1	20	1	20	07	Inspektorat
1	20	1	20	08	Badan Pendidikan dan Latihan
1	20	1	20	09	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	1	20	10	Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	1	20	11	Kecamatan Natar
1	20	1	20	12	Kecamatan Tanjung Bintang
1	20	1	20	13	Kecamatan Jati Agung
1	20	1	20	14	Kecamatan Katibung
1	20	1	20	15	Kecamatan Merbau Mataram
1	20	1	20	16	Kecamatan Sidomulyo
1	20	1	20	17	Kecamatan Candipuro
1	20	1	20	18	Kecamatan Kalianda
1	20	1	20	19	Kecamatan Raja Basa
1	20	1	20	20	Kecamatan Palas
1	20	1	20	21	Kecamatan Sragi
1	20	1	20	22	Kecamatan Penengahan
1	20	1	20	23	Kecamatan Ketapang
1	20	1	20	24	Kecamatan Way Panji
1	20	1	20	25	Kecamatan Way Sulan
1	20	1	20	26	Kecamatan Bakauheni
1	20	1	20	27	Kecamatan Tanjung Sari
1	21				Ketahanan Pangan
1	21	1	21	01	Badan Ketahanan Pangan
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	22	1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	23				Statistik
1	23	1	23	01	Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1	26				Perpustakaan
1	26	1	26	01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2					URUSAN PILIHAN
2	01				Pertanian
2	01	2	01	01	Dinas Perkebunan
2	01	2	01	02	Dinas Peternakan
2	01	2	01	03	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

KODE					URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2	01	2	01	04	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	02				Kehutanan
2	02	2	02	01	Dinas Kehutanan
2	03				Energi dan Sumber Daya Mineral
2	03	2	03	01	Dinas Pertambangan dan Energi
2	04				Pariwisata
2	04	2	04	01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	05				Kelautan dan Perikanan
2	05	2	05	01	Dinas Kelautan dan Perikanan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


WENDY MELFA

**SUSUNAN AKUN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009**

KODE	URAIAN
1	Aset
2	Kewajiban
3	Ekuitas Dana
4	Pendapatan
5	Belanja
6	Pembiayaan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

WENDY MELFA

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN STANDAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening				Program dan Kegiatan
				PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x	xx	xx	01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
x	xx	xx	01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
x	xx	xx	01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
x	xx	xx	01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
x	xx	xx	01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
x	xx	xx	01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
x	xx	xx	01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
x	xx	xx	01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
x	xx	xx	01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja
x	xx	xx	01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
x	xx	xx	01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
x	xx	xx	01 12	Penyediaan Komponen instalasi listrik
x	xx	xx	01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x	xx	xx	01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga
x	xx	xx	01 15	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x	xx	xx	01 16	Penyediaan bahan logistik kantor
x	xx	xx	01 17	Penyediaan bahan makanan dan minuman
x	xx	xx	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x	xx	xx	01 19	Dst
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
x	xx	xx	02 01	Pembangunan rumah jabatan
x	xx	xx	02 02	Pembangunan rumah dinas
x	xx	xx	02 03	Pembangunan gedung kantor
x	xx	xx	02 04	Pengadaan mobil jabatan
x	xx	xx	02 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
x	xx	xx	02 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
x	xx	xx	02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
x	xx	xx	02 08	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
x	xx	xx	02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor
x	xx	xx	02 10	Pengadaan meubeleur
x	xx	xx	02 11	Pengadaan
				s/d
x	xx	xx	02 19	Dst
x	xx	xx	02 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

x	xx	xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
x	xx	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
x	xx	xx	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
x	xx	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
x	xx	xx	02	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan
x	xx	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
x	xx	xx	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
x	xx	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
x	xx	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan meubeleur
x	xx	xx	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala
					s/d
x	xx	xx	02	39	Dst
x	xx	xx	02	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
x	xx	xx	02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
x	xx	xx	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
x	xx	xx	02	43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
x	xx	xx	02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/jabatan
x	xx	xx	02	45	Dst
x	xx	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur
x	xx	xx	03	01	Pengadaan mesin kartu absensi
x	xx	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
x	xx	xx	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
x	xx	xx	03	04	Pengadaan pakaian KOPRI
x	xx	xx	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
x	xx	xx	03	06	Dst
x	xx	xx	04		Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
x	xx	xx	04	01	Pemulangan pegawai yang pensiun
x	xx	xx	04	02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
x	xx	xx	04	03	pemindahan tugas PNS
x	xx	xx	04	04	Dst
x	xx	xx	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
x	xx	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal
x	xx	xx	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
x	xx	xx	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
x	xx	xx	05	04	Dst
x	xx	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
x	xx	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
x	xx	xx	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran
x	xx	xx	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
x	xx	xx	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
x	xx	xx	06	05	Dst

x	xx	xx	09		Program dst.....
			s.d		
x	xx	xx	14		Program dst.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**KODE PROGRAM DAN KEGIATAN UNIK/KHUSUS
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009**

Kode Rekening					Program dan Kegiatan
1					URUSAN WAJIB
1	01				Pendidikan ✓
1	01	XX	15		Program pendidikan anak usia dini ✓
1	01	XX	15	01	Pembangunan gedung sekolah
1	01	XX	15	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	XX	15	03	Penambahan ruang kelas sekolah
1	01	XX	15	04	Penambahan ruang guru sekolah
1	01	XX	15	05	Pembangunan ruang locker siswa
1	01	XX	15	06	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1	01	XX	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1	01	XX	15	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1	01	XX	15	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	15	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	15	11	Pembangunan ruang ibadah
1	01	XX	15	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1	01	XX	15	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	XX	15	14	pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
1	01	XX	15	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1	01	XX	15	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1	01	XX	15	17	Pengadaan pakaian olah raga
1	01	XX	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1	01	XX	15	19	Pengadaan meubeleur sekolah
1	01	XX	15	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1	01	XX	15	21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1	01	XX	15	22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1	01	XX	15	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1	01	XX	15	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	XX	15	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1	01	XX	15	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1	01	XX	15	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1	01	XX	15	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1	01	XX	15	29	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
1	01	XX	15	30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1	01	XX	15	31	Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	15	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	15	33	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1	01	XX	15	34	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1	01	XX	15	35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	XX	15	36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	15	37	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1	01	XX	15	38	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur sekolah
1	01	XX	15	39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1	01	XX	15	40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1	01	XX	15	41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

1	01	XX	15	42	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah
1	01	XX	15	43	Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	XX	15	44	Rehabilitas sedang/berat asrama siswa
1	01	XX	15	45	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah
1	01	XX	15	46	Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah
1	01	XX	15	47	Rehabilitas sedang/berat ruang locker siswa
1	01	XX	15	48	Rehabilitas sedang/berat sarana olah raga
1	01	XX	15	49	Rehabilitas sedang/berat sarana bermain
1	01	XX	15	50	Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula
1	01	XX	15	51	Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	15	52	Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	15	53	Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah
1	01	XX	15	54	Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
1	01	XX	15	55	Rehabilitas sedang/berat Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	XX	15	56	Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	15	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1	01	XX	15	58	Pengembangan pendidikan anak usia dini
1	01	XX	15	59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1	01	XX	15	60	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
1	01	XX	15	61	Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini
1	01	XX	15	62	Pengembangan kurikulum bahan ajar dan modal pembelajaran pendidikan anak usia dini
1	01	XX	15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini
1	01	XX	15	64	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini
1	01	XX	15	65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
1	01	XX	15	66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	XX	15	67	Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)
1	01	XX	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1	01	XX	16	01	Pembangunan gedung sekolah
1	01	XX	16	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
1	01	XX	16	03	Penambahan ruang kelas sekolah
1	01	XX	16	04	Penambahan ruang guru sekolah
1	01	XX	16	05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1	01	XX	16	06	Pembangunan ruang locker siswa
1	01	XX	16	07	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1	01	XX	16	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1	01	XX	16	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	16	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	16	11	Pembangunan ruang ibadah
1	01	XX	16	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1	01	XX	16	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik
1	01	XX	16	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	16	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1	01	XX	16	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1	01	XX	16	17	Pengadaan pakaian olah raga
1	01	XX	16	18	Pengadaan alat praktik dan alat praga
1	01	XX	16	19	Pengadaan meubeler sekolah
1	01	XX	16	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1	01	XX	16	21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1	01	XX	16	22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1	01	XX	16	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1	01	XX	16	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	XX	16	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1	01	XX	16	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah

1	01	XX	16	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1	01	XX	16	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1	01	XX	16	29	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
1	01	XX	16	30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1	01	XX	16	31	Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	16	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	16	33	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1	01	XX	16	34	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1	01	XX	16	35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	XX	16	36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	16	37	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1	01	XX	16	38	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeieur sekolah
1	01	XX	16	39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1	01	XX	16	40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1	01	XX	16	41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1	01	XX	16	42	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah
1	01	XX	16	43	Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	XX	16	44	Rehabilitas sedang/berat asrama siswa
1	01	XX	16	45	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah
1	01	XX	16	46	Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah
1	01	XX	16	47	Rehabilitas sedang/berat ruang locker siswa
1	01	XX	16	48	Rehabilitas sedang/berat sarana olah raga
1	01	XX	16	49	Rehabilitas sedang/berat sarana bermain
1	01	XX	16	50	Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula
1	01	XX	16	51	Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	16	52	Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	16	53	Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah
1	01	XX	16	54	Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
1	01	XX	16	55	Rehabilitas sedang/berat Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	XX	16	56	Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	16	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1	01	XX	16	58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
1	01	XX	16	59	Pelatihan penyusunan kurikulum
1	01	XX	16	60	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1	01	XX	16	61	Pembinaan SMP terbuka
1	01	XX	16	62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
1	01	XX	16	63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS; Jenjang SD,MI,SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP
1	01	XX	16	64	Penyediaan biaya operasional madrasah
1	01	XX	16	65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1	01	XX	16	66	Penyediaan dana pembangunan sekolah untuk SD dan MI dan SMP/MTS
1	01	XX	16	67	Penyelenggaraan paket A setara SD
1	01	XX	16	68	Penyelenggaraan Paket B setara SMP
1	01	XX	16	69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) satuan pendidikan dasar
1	01	XX	16	70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1	01	XX	16	71	Pembangunan komprehensif teaching and leaning
1	01	XX	16	72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1	01	XX	16	73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dasar
1	01	XX	16	74	Penyediaan beasiswa retnival untuk anak putus sekolah
1	01	XX	16	75	Penyediaan beasiswa transisi

1	01	XX	16	76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1	01	XX	16	77	Penyelenggaraan multi grade teaching di daerah terpencil
1	01	XX	16	78	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1	01	XX	16	79	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran TK/SD
1	01	XX	16	80	Rehabilitasi SD/MI melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
1	01	XX	16	81	Peningkatan kesejahteraan guru SD terpencil
1	01	XX	16	82	Penilaian Kinerja Sekolah (PKS)
1	01	XX	16	83	Penerapan K T S P
1	01	XX	16	86	Lomba kreativitas dan sains sekolah dasar
1	01	XX	16	87	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran TK/SD
1	01	XX	17		Program Pendidikan Menengah
1	01	XX	17	01	Pembangunan gedung sekolah
1	01	XX	17	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
1	01	XX	17	03	Penambahan ruang kelas sekolah
1	01	XX	17	04	Penambahan ruang guru sekolah
1	01	XX	17	05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1	01	XX	17	06	Pembangunan ruang locker siswa
1	01	XX	17	07	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1	01	XX	17	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1	01	XX	17	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	17	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	17	11	Pembangunan ruang ibadah
1	01	XX	17	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1	01	XX	17	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik
1	01	XX	17	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	17	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1	01	XX	17	16	Pengadaan pakaian seraga sekolah
1	01	XX	17	17	Pengadaan pakaian olah raga
1	01	XX	17	18	Pengadaan alat praktik dan alat praga
1	01	XX	17	19	Pengadaan meubeleur sekolah
1	01	XX	17	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1	01	XX	17	21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1	01	XX	17	22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1	01	XX	17	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1	01	XX	17	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	XX	17	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1	01	XX	17	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1	01	XX	17	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1	01	XX	17	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1	01	XX	17	29	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
1	01	XX	17	30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1	01	XX	17	31	Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	17	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	17	33	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1	01	XX	17	34	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1	01	XX	17	35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	XX	17	36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	17	37	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1	01	XX	17	38	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur sekolah
1	01	XX	17	39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1	01	XX	17	40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1	01	XX	17	41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

1	01	XX	17	42	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah
1	01	XX	17	43	Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	XX	17	44	Rehabilitas sedang/berat asrama siswa
1	01	XX	17	45	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah
1	01	XX	17	46	Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah
1	01	XX	17	47	Rehabilitas sedang/berat ruang locker siswa
1	01	XX	17	48	Rehabilitas sedang/berat sarana olah raga
1	01	XX	17	49	Rehabilitas sedang/berat sarana bermain
1	01	XX	17	50	Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula
1	01	XX	17	51	Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	17	52	Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	17	53	Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah
1	01	XX	17	54	Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
1	01	XX	17	55	Rehabilitas sedang/berat Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	XX	17	56	Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	17	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1	01	XX	17	58	Pelatihan penyusunan kurikulum
1	01	XX	17	59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1	01	XX	17	60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan
1	01	XX	17	61	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu
1	01	XX	17	62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1	01	XX	17	63	Penyelenggaraan paket C setara SMU
1	01	XX	17	64	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah
1	01	XX	17	65	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan mengunakan teknologi informasi dan komunikasi
1	01	XX	17	66	Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri
1	01	XX	17	67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1	01	XX	17	68	Penyeleggaraan akreditasi sekolah menengah
1	01	XX	17	69	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1	01	XX	17	70	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran SMA, SMK.
1	01	XX	17	71	Uji kompetensi siswa SMK
1	01	XX	18		Program Pendidikan non Formal
1	01	XX	18	01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1	01	XX	18	02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1	01	XX	18	03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1	01	XX	18	04	Pengembangan pendidikan keaksaraan
1	01	XX	18	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1	01	XX	18	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
1	01	XX	18	07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1	01	XX	18	08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
1	01	XX	18	09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1	01	XX	18	10	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
1	01	XX	18	11	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
1	01	XX	18	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
1	01	XX	18	13	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1	01	XX	18	14	Lomba olah raga dalam rangka Hari Pendidikan Nasional
1	01	XX	18	15	Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan fungsional) dan bantuan operasional PNF
1	01	XX	18	16	Pembinaan sekolah peduli narkoba
1	01	XX	18	17	Penyelenggaraan pesantren kilat

1	01	XX	18	18	Dst
1	01	XX	18	19	Kegiatan prestasi olahraga tingkat pelajar
1	01	XX	18	20	Lomba kompetensi mata pelajaran SD/MI
1	01	XX	18	21	Pelaksanaan Paskibraka
1	01	XX	19		Program Pendidikan Luar Biasa
1	01	XX	19	01	Pembangunan gedung sekolah
1	01	XX	19	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
1	01	XX	19	03	Penambahan ruang kelas sekolah
1	01	XX	19	04	Penambahan ruang guru sekolah
1	01	XX	19	05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1	01	XX	19	06	Pembangunan ruang locker siswa
1	01	XX	19	07	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1	01	XX	19	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1	01	XX	19	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	19	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	19	11	Pembangunan ruang ibadah
1	01	XX	19	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1	01	XX	19	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik
1	01	XX	19	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	19	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1	01	XX	19	16	Pengadaan pakaian seraga sekolah
1	01	XX	19	17	Pengadaan pakaian olah raga
1	01	XX	19	18	Pengadaan alat praktik dan alat praga
1	01	XX	19	19	Pengadaan meubeleur sekolah
1	01	XX	19	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1	01	XX	19	21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1	01	XX	19	22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1	01	XX	19	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1	01	XX	19	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	XX	19	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1	01	XX	19	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1	01	XX	19	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1	01	XX	19	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1	01	XX	19	29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1	01	XX	19	30	Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	19	31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	19	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1	01	XX	19	33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1	01	XX	19	34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	XX	19	35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	19	36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1	01	XX	19	37	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur sekolah
1	01	XX	19	38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1	01	XX	19	39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1	01	XX	19	40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1	01	XX	19	41	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah
1	01	XX	19	42	Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	XX	19	43	Rehabilitas sedang/berat asrama siswa
1	01	XX	19	44	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah
1	01	XX	19	45	Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah
1	01	XX	19	46	Rehabilitas sedang/berat ruang locker siswa
1	01	XX	19	47	Rehabilitas sedang/berat sarana olah raga

1	01	XX	19	48	Rehabilitas sedang/berat sarana bermain
1	01	XX	19	49	Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula
1	01	XX	19	50	Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	XX	19	51	Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1	01	XX	19	52	Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah
1	01	XX	19	53	Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
1	01	XX	19	54	Rehabilitas sedang/berat Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	XX	19	55	Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1	01	XX	19	56	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1	01	XX	19	57	Pelatihan Penyusunan kurikulum
1	01	XX	19	58	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1	01	XX	19	59	Monitoring ev: luasi dan pelaporan
1	01	XX	19	60	dst
1	01	XX	20		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
1	01	XX	20	01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik -
1	01	XX	20	02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1	01	XX	20	03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1	01	XX	20	04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
1	01	XX	20	05	Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)
1	01	XX	20	06	Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
1	01	XX	20	07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (S1 PGSD)
1	01	XX	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1	01	XX	20	09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1	01	XX	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
1	01	XX	20	11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1	01	XX	20	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	XX	20	13	Lomba guru, pengawas sekolah dan kepala sekolah berprestasi
1	01	XX	20	14	Pembinaan sekolah standar nasional (SSN)
1	01	XX	20	15	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (penyetaraan S1 PGSD)
1	01	XX	21		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1	01	XX	21	01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
1	01	XX	21	02	Pengembangan minat dan budaya baca
1	01	XX	21	03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1	01	XX	21	04	Pelaksanaan koordianasi pengembangan perpustakaan
1	01	XX	21	05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1	01	XX	21	06	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
1	01	XX	21	07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
1	01	XX	21	08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1	01	XX	21	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1	01	XX	21	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	XX	21	11	Dst
1	01	XX	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1	01	XX	22	01	Pelaksanaan evalusi hasil kerja bidang pendidikan
1	01	XX	22	02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan
1	01	XX	22	03	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efis.ensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

1	01	XX	22	04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan
1	01	XX	22	05	Pembinaan dewan pendidikan
1	01	XX	22	06	Pembinaan komite sekolah
1	01	XX	22	07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan/ICT
1	01	XX	22	08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1	01	XX	22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	XX	22	10	Peningkatan administrasi perkantoran
1	01	XX	22	11	Pendataan dan penyusunan profil pendidikan (Padati WEB) dan SIM NUPTK
1	01	XX	22	12	Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pendidikan sistem jaringan komputer / internet
1	01	XX	22	13	Ujian akhir sekolah SMA/MA/SMK dan monitoring SMP/MA/SMK
1	01	XX	22	14	Bantuan biaya operasional pengawas sekolah TK/SD/SMP/MA/SMK
1	01	XX	22	15	Bantuan biaya operasional PGRI Lampung Selatan
1	01	XX	22	16	Bantuan penyelenggaraan UAS sekolah dasar dan monitoring
1	01	XX	22	17	Bantuan penyelenggaraan UAS SMP dan Monitoring
1	01	XX	22	18	Bantuan penyelenggaraan UAS SMA/MA/SMK dan monitoring
1	01	XX	22	19	Bantuan seleksi penerimaan siswa baru SMA/MA/SMK Negeri
1	01	XX	22	20	Bantuan pendamping dana UNICEF
1	01	XX	22	21	Bantuan insentif guru honor mumi Kabupaten Lampung Selatan
1	01	XX	22	22	Bantuan penyelenggaraan ujian Paket A dan B
1	01	XX	22	23	Bantuan penyelenggaraan ujian Paket C dan monitoring
1	01	XX	23	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
1	01	XX	23	01	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penambahan RKB SD/MI, SMP, SMA dan pengadaan meubelair
1	01	XX	23	01	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penambahan RKB SD/MI, SMP,
1	02				Kesehatan ✓
1	02	XX	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1	02	XX	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1	02	XX	15	02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1	02	XX	15	03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
1	02	XX	15	04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1	02	XX	15	05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan pembekalan kesehatan
1	02	XX	15	06	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1	02	XX	15	07	Pembinaan Pengelolaan Obat Poskesdes
1	02	XX	15	08	Razia pengamanan sediaan farmasi dan makanan
1	02	XX	15	09	Penyuluhan Swamedikasi
1	02	XX	15	10	Dsyt
1	02	XX	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1	02	XX	16	01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
1	02	XX	16	02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1	02	XX	16	03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1	02	XX	16	04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
1	02	XX	16	05	Perbaikan gizi masyarakat
1	02	XX	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan
1	02	XX	16	07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
1	02	XX	16	08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik
1	02	XX	16	09	Sosialisasi Konsil Kesehatan Kecamatan

1	02	XX	16	10	Pemilihan Puskesmas Berprestasi Tk. Kab. LS
1	02	XX	16	11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1	02	XX	16	12	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1	02	XX	16	13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1	02	XX	16	14	Dst
1	02	XX	16	15	Dst
1	02	XX	16	16	Standar pelayanan minimal bidang kesehatan 2015
1	02	XX	16	17	Pemulihan tenaga kesehatan teladan (Dokter, Perawat/Bidan, Gizi Kesmas)
1	02	XX	16	18	Sosialisasi konsil kesehatan masyarakat
1	02	XX	16	20	Pertemuan evaluasi kinerja puskesmas
1	02	XX	16	21	Bhakti sosial sunatan masal dalam rangka HKN
1	02	XX	16	22	Sosialisasi bahaya penyakit kanker
1	02	XX	16	24	Penyusunan profil kesehatan
1	02	XX	16	25	Pengembangan sistem informasi kesehatan
1	02	XX	16	26	Review sistem pencatatan dan pelaporan tingkat desa puskesmas dan Kabupaten
1	02	XX	16	27	Pelatihan ICD-10 bagi petugas puskesmas di Jakarta
1	02	XX	16	29	Pelatihan petugas puskesmas surveyien berbasis masyarakat
1	02	XX	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan
1	02	XX	17	01	Peningkatan pemberdayaan konsumen masyarakat dibidang obat dan makanan
1	02	XX	17	02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1	02	XX	17	03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
1	02	XX	17	04	Peningkatan penyelidikan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan
1	02	XX	17	05	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1	02	XX	17	06	Peningkatan Mutu, Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Makanan dan Minuman
1	02	XX	17	07	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Kosalkes
1	02	XX	17	08	Razia pengamanan sediaan farmasi dan makanan
1	02	XX	18		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1	02	XX	18	07	Peningkatan penyebaran dan pengamanan obat tradisional yang berbahaya bagi masyarakat
1	02	XX	18	08	Pelatihan petugas puskesmas dan kader TOGA puskesmas
1	02	XX	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemeberdayaan Masyarakat
1	02	XX	19	01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sada: Hidup Sehat
1	02	XX	19	02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1	02	XX	19	03	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1	02	XX	19	04	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1	02	XX	19	05	Dts....
1	02	XX	19	06	Pembinaan lomba bidang kesehatan (PSI/CSI,UKBM,P3KSS, UKS, PHBS)
1	02	XX	19	07	Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
1	02	XX	19	08	Penyusunan profil kesehatan
1	02	XX	19	08	Sigermas bidang kesehatan
1	02	XX	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1	02	XX	20	01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1	02	XX	20	02	Pemberian tambahan makanan dan Vitamin
1	02	XX	20	03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)..
1	02	XX	20	04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1	02	XX	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1	02	XX	21	01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1	02	XX	21	02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1	02	XX	21	03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1	02	XX	21	04	Stimulan jamban keluarga sehat
1	02	XX	21	05	Perbaikan kualitas air
1	02	XX	21	06	Stimulan jamban dan SPAL sehat di Desa miskin
1	02	XX	21	07	Pengembangan klinik sanitasi di Puskesmas
1	02	XX	22		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1	02	XX	22	01	Penyemprotan sarang nyamuk
1	02	XX	22	02	Pengadaan alat foging dan bahan-bahan foging
1	02	XX	22	03	Pengadaan vaksin penyakit menular
1	02	XX	22	04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1	02	XX	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1	02	XX	22	06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
1	02	XX	22	07	Pemusnahan karantina sumber penyebab penyakit menular
1	02	XX	22	08	Peningkatan Imunisasi
1	02	XX	22	09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1	02	XX	22	10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit
1	02	XX	22	11	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1	02	XX	22	12	Peningkatan pemberantasan penyakit malaria
1	02	XX	22	13	Peningkatan pemberantasan penyakit bersumber binatang DBD
1	02	XX	22	14	Peningkatan pemberantasan penyakit TB Paru
1	02	XX	22	15	Eradikasi folio
1	02	XX	22	16	Pengendalian menghadapi pandemi avian influenza Lampung Selatan
1	02	XX	22	17	Peningkatan pemberantasan penyakit kusta
1	02	XX	22	18	Peningkatan pemberantasan penyakit diare
1	02	XX	22	19	Peningkatan pemberantasan penyakit ISPA
1	02	XX	22	20	Pemberantasan penyakit rabies
1	02	XX	22	21	Pengendalian menghadapi pandemi Avian Influenza Lam-Sel
1	02	XX	22	22	Eradikasi folio
1	02	XX	22	23	Kegiatan pemberantasan penyakit diare
1	02	XX	22	24	Program pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA
1	02	XX	22	25	Survey SST kelompok resiko tinggi HIV/AIDS
1	02	XX	22	26	Program pemberantasan penyakit rabies
1	02	XX	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1	02	XX	23	01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1	02	XX	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1	02	XX	23	03	Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1	02	XX	23	04	Penyusunan naskah akademis
1	02	XX	23	05	Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
1	02	XX	23	07	Peningkatan kinerja Majelis Kesehatan Kabupaten (MKK)
1	02	XX	23	08	Pemantapan konsep rancangan Perda, tentang perizinan bidang kesehatan
1	02	XX	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1	02	XX	25	01	Pembangunan Puskesmas
1	02	XX	25	02	Pembangunan Puskesmas Pembantu
1	02	XX	25	03	Pengadaan puskesmas persalinan
1	02	XX	25	04	Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Induk dan Pembangunan Pagar
1	02	XX	25	05	Pembangunan Polindes / Poskesdes
1	02	XX	25	06	Pembangunan Gedung Laboratorium Puskesmas
1	02	XX	25	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK))

1	02	XX	27	03	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotek
1	02	XX	27	04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
1	02	XX	27	05	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
1	02	XX	27	06	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU
1	02	XX	27	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Operasi
1	02	XX	27	08	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
1	02	XX	27	09	Pemeliharaan rutin/berkala Isolasi
1	02	XX	27	10	Pemeliharaan rutin/berkala bersalin
1	02	XX	27	11	Pemeliharaan rutin/berkala Inkubator
1	02	XX	27	12	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
1	02	XX	27	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rontgen
1	02	XX	27	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Laboratorium Rumah Sakit
1	02	XX	27	15	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
1	02	XX	27	16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1	02	XX	27	17	Pemeliharaan rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1	02	XX	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1	02	XX	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1	02	XX	28	02	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
1	02	XX	28	03	Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
1	02	XX	28	04	Kemitraan alih teknologi
1	02	XX	28	05	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
1	02	XX	29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1	02	XX	29	01	Penyuluhan kesehatan anak balita
1	02	XX	29	02	Imunisasi bagi anak balita
1	02	XX	29	03	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
1	02	XX	29	04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1	02	XX	29	05	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
1	02	XX	29	06	Pembangunan panti asuhan
1	02	XX	29	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	XX	29	08	Lomba Balita Indonesia Tingkat Kabupaten
1	02	XX	29	09	Pelayanan kesehatan anak dan pembinaan kader
1	02	XX	29	10	Pengadaan kohort bayi, anak balita, ibu, buku KIA dan formulir MTBS
1	02	XX	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1	02	XX	30	06	Pelayanan Kesehatan
1	02	XX	31		Dst...
1	02	XX	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1	02	XX	32	01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1	02	XX	32	02	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
1	02	XX	32	03	Dst ...
1	02	XX	32	04	Sosialisasi perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
1	02	XX	32	05	Pembahasan kasus kematian ibu dan anak
1	02	XX	32	06	Evaluasi program kesehatan ibu
1	02	XX	32	07	Evaluasi program kesehatan anak
1	02	XX	33		Program pelayanan kesehatan usaha kesehatan sekolah (UKS)
1	02	XX	33	01	Pembinaan usaha kesehatan sekolah (dokter kecil)
1	02	XX	33	02	Dst.....

1	03	XX	22		Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan
1	03	XX	22	01	Penyusunan sistem informasi database jalan
1	03	XX	22	02	Penyusunan sistem informasi database jembatan
1	03	XX	22	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	XX	22	04	Dst
1	03	XX	23		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1	03	XX	23	01	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
1	03	XX	23	02	Pembangunan gedung workshop
1	03	XX	23	03	Pembangunan laboratorium kebinamargaan
1	03	XX	23	04	Pengadaan alat-alat berat
1	03	XX	23	05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1	03	XX	23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1	03	XX	23	07	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
1	03	XX	23	08	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
1	03	XX	23	09	Rehabilitasi/pemeliharaan Laboratorium kebinamargaan
1	03	XX	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1	03	XX	23	11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan perlengkapan bengkel
1	03	XX	23	12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1	03	XX	23	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	XX	23	14	Dst
1	03	XX	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1	03	XX	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1	03	XX	24	02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih, air minum
1	03	XX	24	03	Perencanaan pembangunan reservoir
1	03	XX	24	04	Perencanaan pembangunan pintu air
1	03	XX	24	05	Perencanaan normalisasi saluran sungai
1	03	XX	24	06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Dana Dak non DR
1	03	XX	24	07	Pembangunan reservoir
1	03	XX	24	08	Pembangunan pintu air
1	03	XX	24	09	Pelaksanaan normalisasi aliran sungai
1	03	XX	24	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1	03	XX	24	11	Rehabilitasi pemeliharaan jaringan air bersih
1	03	XX	24	12	Rehabilitasi pemeliharaan reservoir
1	03	XX	24	13	Rehabilitasi pemeliharaan pintu air
1	03	XX	24	14	Rehabilitasi pemeliharaan normalisasi aliran sungai
1	03	XX	24	15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1	03	XX	24	16	Pemberdayaan petani pemakai air
1	03	XX	24	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	XX	24	18	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (OP)
1	03	XX	24	19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Loan ADB
1	03	XX	24	20	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK Non-DR
1	03	XX	24	21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Penanganan Pasca Bencana
1	03	XX	24	22	Pembangunan dan peningkatan jalan irigasi
1	03	XX	24	23	Rehabilitasi jaringan pengairan dana penanganan pasca bencana
1	03	XX	25		Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Dana DAK Non-DR
1	03	XX	25	01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1	03	XX	25	02	Rehabilitasi sarana pengambilan dan saluran pembawa
1	03	XX	25	03	Pemeliharaan sarana pengambilan dan saluran pembawa
1	03	XX	25	04	Pembangunan sumur-sumur air tanah
1	03	XX	25	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

1	03	XX	25	06	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku dana DAK non DR
1	03	XX	25	07	Pembangunan sarana dan prasarana air minum IKK
1	03	XX	26		Dst ...
1	03	XX	27		Dst ...
1	03	XX	28		Dst ...
1	03	XX	29		Dst ...
1	03	XX	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1	03	XX	30	01	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1	03	XX	31		Program Pembangunar Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah Dana DAK non DR
1	03	XX	31	01	Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan (Dana DAK non DR)
1	03	XX	32		Dst
1	03	XX	33		Dst ...
1	03	XX	34		Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
1	03	XX	34	01	Perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan infrstruktur
1	03	XX	35		Dst ...
1	03	XX	36		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1	03	XX	36	01	Sistem Pentediaan Air Minum (SPAM)
1	05				Penataan Ruang ✓
1	05	XX	15		Program Perencanaan Tata Ruang
1	05	XX	15	01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
1	05	XX	15	02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
1	05	XX	15	03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1	05	XX	15	04	Penyusunan rencana tataruang wilayah
1	05	XX	15	05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1	05	XX	16		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
1	05	XX	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1	05	XX	16	02	Penyusunan , norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang
1	05	XX	16	03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	XX	16	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
1	05	XX	16	05	Survei pemetaan
1	05	XX	16	06	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
1	05	XX	16	07	Sosialisasi kebijakan norma, standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1	05	XX	16	08	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan peanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1	05	XX	16	09	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
1	05	XX	16	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
1	05	XX	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1	05	XX	17	01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	XX	17	02	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

1	05	XX	17	03	Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	XX	17	04	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	XX	17	05	Pengawasan pemanfaatan ruang
1	05	XX	17	06	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1	05	XX	17	07	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1	05	XX	18		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1	05	XX	18	01	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
1	05	XX	18	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan
1	05	XX	18	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1	05	XX	18	09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)
1	05	XX	18	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1	05	XX	19		Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
1	05	XX	19	01	Pengembangan data informasi lingkungan
1	05	XX	25		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1	05	XX	25	05	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
1	06				Perencanaan Pembangunan ✓
1	06	XX	15		Program Pengembangan Data/Informasi
1	06	XX	15	01	Pengumpulan, Updeting, analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1	06	XX	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (IKK)
1	06	XX	15	03	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan dan pembangunan kawasan rawan bencana
1	06	XX	15	04	Penyusunan dan data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
1	06	XX	15	05	Penyusunan profile daerah tertinggal
1	06	XX	15	06	Penyusunan Data Potensi Daerah
1	06	XX	15	07	Penyusunan laporan-laporan tahunan Bappeda
1	03	XX	25	08	Penyusunan indek kemahalan konstruksi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009
1	03	XX	25	09	Pemutakhiran peta administrasi Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	16		Program Kerjasama Pembangunan
1	06	XX	16	01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
1	06	XX	16	02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1	06	XX	16	03	Fasilitas kerja sama dengan dunia usaha/lembaga
1	06	XX	16	04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
1	06	XX	16	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	XX	16	06	Koordinasi dan fasilitasi DAK
1	06	XX	16	07	Koordinasi dan fasilitasi program kemiskinan (Program pusat dan daerah)
1	06	XX	16	08	Koordinasi dan evaluasi pasca program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)
1	06	XX	16	09	Penyusunan Renstra dan RAD KLA Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	16	10	Evaluasi Desa Tertinggal
1	06	XX	16	11	Koordinasi dan Fasilitasi DAK Bidang Kesehatan dan Pendidikan
1	06	XX	16	12	Koordinasi dan Fasilitasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
1	06	XX	17		Program pengembangan wilayah perbatasan
1	06	XX	17	01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
1	06	XX	17	02	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara

1	06	XX	17	03	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
1	06	XX	17	04	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
1	06	XX	17	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	XX	17	06	Dst
1	06	XX	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
1	06	XX	18	01	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1	06	XX	18	02	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis
1	06	XX	18	03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Study Kasus 20 Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan)
1	06	XX	19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
1	06	XX	19	01	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
1	06	XX	19	02	Koordinasi penyelesaian penyelesaian transportasi perkotaan
1	06	XX	19	03	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
1	06	XX	19	04	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1	06	XX	19	05	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
1	06	XX	19	06	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
1	06	XX	19	07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
1	06	XX	19	08	Koordinasi perencanaan penanganan perpajakan
1	06	XX	19	09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1	06	XX	19	10	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
1	06	XX	19	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	XX	19	12	Rencana Induk Air Baku Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	19	13	Penataan Bakauheni sebagai kawasan wisata
1	06	XX	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	XX	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1	06	XX	20	02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
1	06	XX	20	03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
1	06	XX	20	04	Dana pendamping dan penunjang operasional PIU proyek SCBD
1	06	XX	20	05	Koordinasi Perencanaan Irigasi Partisipatif
1	06	XX	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	XX	21	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1	06	XX	21	02	Penyusunan rancangan RPJPD
1	06	XX	21	03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
1	06	XX	21	04	Penetapan RPJPD
1	06	XX	21	05	Penyusunan rancangan RPJMD
1	06	XX	21	06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1	06	XX	21	07	Penetapan RPJMD
1	06	XX	21	08	Penyusunan Rancangan RKPD
1	06	XX	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1	06	XX	21	10	Penetapan RKJMD
1	06	XX	21	11	Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP)
1	06	XX	21	12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
1	06	XX	21	13	Dst ...
1	06	XX	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten
1	06	XX	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1	06	XX	21	16	Penyusunan KUA dan PPA
1	06	XX	21	17	Penyusunan R P J P

1	06	XX	21	18	Dst ...
1	06	XX	21	19	Monitoring Tugas Pembantuan di Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	21	20	Penyusunan perencanaan desa-desa pusat pertumbuhan
1	06	XX	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1	06	XX	22	01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
1	06	XX	22	02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
1	06	XX	22	03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
1	06	XX	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi masyarakat
1	06	XX	22	05	Penyusunan tabel input output daerah
1	06	XX	22	06	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
1	06	XX	22	07	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
1	06	XX	22	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	XX	22	09	Pola Pengembangan Komoditas Berbasis Agribisnis (Pendukung Program Propinsi dalam Pengentasan Kemiskinan)
1	06	XX	22	10	Statistik indikator ekonomi desa tertinggal (Program Siger Mas) Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	22	11	Tim koordinasi program percepatan penanggulangan kemiskinan (Program Siger Mas) Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	22	12	Tim koordinasi dan forum terpadu fasilitas komoditas unggulan pisang Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	22	13	Revitalisasi pengembangan ekonomi lokal (Program Nasional)
1	06	XX	22	14	Inventarisasi (CD profile multimedia) kawasan-kawasan miskin pemukiman pesisir Kabupaten Lampung Selatan)
1	06	XX	22	15	Musrenbangtan 2009 sinkronisasi, koordinasi dan fasilitasi perencanaan sektoral perekonomian Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	22	16	Penyusunan statistik ekonomi daerah Kabupaten Lampung Selatan (Program Nasional)
1	06	XX	22	17	Fasilitasi kerja sama program bantuan permodalan Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	22	18	Inventarisasi aplikasi dan seminarisasi ekonomi kerakyatan Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1	06	XX	23	01	Koordinasi masterplan pendidikan
1	06	XX	23	02	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
1	06	XX	23	03	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah sosial budaya
1	06	XX	23	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	XX	23	05	Dst
1	06	XX	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
1	06	XX	24	01	Koordinasi masterplan perhubungan daerah
1	06	XX	24	02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1	06	XX	24	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	XX	24	04	Perencanaan bidang infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	24	05	Koordinasi DAK infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan
1	06	XX	24	06	Dst
1	06	XX	24	07	Koordinasi penataan ruang Kabupaten Lampung Selatan
1	07				Perhubungan ✓
1	07	XX	15		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1	07	XX	15	01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1	07	XX	15	02	Penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang perhubungan
1	07	XX	15	03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1	07	XX	15	04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

1	07	XX	15	05	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
1	07	XX	15	06	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan
1	07	XX	15	07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
1	07	XX	15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	07	XX	15	09	Dst
1	07	XX	16		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
1	07	XX	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan
1	07	XX	16	02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
1	07	XX	16	03	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
1	07	XX	16	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	07	XX	16	05	Dst
1	07	XX	16	06	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Fasilitas LLAJ
1	07	XX	16	07	Pengadaan kelengkapan terminal sementara Bahauheni
1	07	XX	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1	07	XX	17	01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang
1	07	XX	17	02	Kegiatan meningkatkan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1	07	XX	17	03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
1	07	XX	17	04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
1	07	XX	17	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya
1	07	XX	17	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang
1	07	XX	17	07	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
1	07	XX	17	08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
1	07	XX	17	09	Kegiatan menciptakan disiplin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal
1	07	XX	17	10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
1	07	XX	17	11	Pengumpulan analisis database pelayanan angkutan
1	07	XX	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1	07	XX	17	13	Fasilitas perizinan dibidang perhubungan
1	07	XX	17	14	Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1	07	XX	17	15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir, juru mudi awak kendaraan umum angkutan umum teladan
1	07	XX	17	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
1	07	XX	17	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	07	XX	17	18	Pelatihan Peningkatan Kinerja Petugas Operasional
1	07	XX	18		Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
1	07	XX	18	01	Pembangunan gedung terminal
1	07	XX	18	02	Pembangunan halte Bus
1	07	XX	18	03	Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal
1	07	XX	18	04	Dst
1	07	XX	19		Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
1	07	XX	19	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1	07	XX	19	02	Pengadaan marka jalan
1	07	XX	19	03	Pengadaan pagar pengaman jalan
1	07	XX	19	04	Dst
1	07	XX	19	05	Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1	07	XX	20		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur LLAJ
1	07	XX	20	01	Pelatihan peningkatan dan monitoring kinerja petugas operasional

1	07	XX	20	02	Dst ..
1	07	XX	20	03	Dst ..
1	07	XX	20	04	Dst ..
1	07	XX	20	05	Pengadaan bahan keperluan pengujian kendaraan bermotor
1	08				Lingkungan Hidup ✓
1	08	XX	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1	08	XX	15	01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1	08	XX	15	02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1	08	XX	15	03	Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan
1	08	XX	15	04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1	08	XX	15	05	Pembangunan teknologi pengolahan persampahan
1	08	XX	15	06	Bimbingan teknis persampahan
1	08	XX	15	07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
1	08	XX	15	08	Kerja sama pengelolaan sampah
1	08	XX	15	09	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
1	08	XX	15	10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1	08	XX	15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
1	08	XX	15	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	XX	15	13	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1	08	XX	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
1	08	XX	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1	08	XX	16	02	Dst ..
1	08	XX	16	03	Pemantauan kualitas lingkungan
1	08	XX	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1	08	XX	16	05	Dst ..
1	08	XX	17		Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1	08	XX	17	01	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
1	08	XX	17	02	Pantai dan laut lestari
1	08	XX	17	03	Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut
1	08	XX	17	04	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
1	08	XX	17	05	Pengendalian dampak kerusakan lingkungan
1	08	XX	17	06	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
1	08	XX	17	07	Pengelolaan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
1	08	XX	17	08	Pengendalian dan pemantapan SDA
1	08	XX	17	09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1	08	XX	17	10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
1	08	XX	17	11	Pengembangan dan pengelolaan kawasan world heritage laut
1	08	XX	17	12	Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional
1	08	XX	17	13	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
1	08	XX	17	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1	08	XX	17	15	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1	08	XX	17	16	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1	08	XX	17	17	Dst ..
1	08	XX	18		Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam
1	08	XX	18	01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

1	08	XX	18	02	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1	08	XX	18	03	Rehabilitasi hutan dan lahan
1	08	XX	18	04	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
1	08	XX	18	05	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang
1	08	XX	18	06	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang
1	08	XX	18	07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
1	08	XX	18	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	XX	18	09	Dst
1	08	XX	19		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
1	08	XX	19	01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1	08	XX	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan
1	08	XX	19	03	Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan nasional dan daerah
1	08	XX	19	04	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
1	08	XX	19	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	XX	19	06	Dst
1	08	XX	20		Program peningkatan pengendalian Polusi
1	08	XX	20	01	Pengujian emisi kendaraan bermotor
1	08	XX	20	02	Pengujian emisi polusi udara aktivitas industri
1	08	XX	20	03	Pengujian kadar polusi limbah padat cair yang menimbulkan polusi
1	08	XX	20	04	Pembangunan tempat pebuangan benda padat cair yang menimbulkan polusi
1	08	XX	20	05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1	08	XX	20	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	XX	20	07	Dst
1	08	XX	21		Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
1	08	XX	21	01	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi
1	08	XX	21	02	Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
1	08	XX	21	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	XX	21	04	Dst
1	08	XX	22		Program pengendalian kebakaran hutan
1	08	XX	22	01	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
1	08	XX	22	02	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
1	08	XX	22	03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
1	08	XX	22	04	Penyusunan norma standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
1	08	XX	22	05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
1	08	XX	22	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	XX	22	07	Dst
1	08	XX	23		Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1	08	XX	23	01	Pengelolaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1	08	XX	23	02	Pengembangan ekosistem pengelolaan pesisir laut
1	08	XX	23	03	dst
1	08	XX	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1	08	XX	24	01	Penyusunan kebijakan norma, standar prosedur dan manual pengelolaan RTH
1	08	XX	24	02	Sosialisasi kebijakan norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

1	08	XX	24	03	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
1	08	XX	24	04	Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
1	08	XX	24	05	Penataan Ruang Terbuka Hijau
1	08	XX	24	06	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
1	08	XX	26		Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
1	08	XX	26	01	Investasi pembangunan pemasangan lampu jalan di Kabupaten Lam-Sel
1	08	XX	28		Program Pengendalian Banjir
1	08	XX	28	07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai
1	10				Kependudukan dan Catatan Sipil ✓
1	10	XX	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan
1	10	XX	15	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara terpadu
1	10	XX	15	02	Entri data daftar rumah tangga (DRT) menuju sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
1	10	XX	15	03	Implementasi sistem administrasi kependudukan (mambangun updating dan pemeliharaan)
1	10	XX	15	04	Pembentukan dan penetaan sistem koneksi NIK
1	10	XX	15	05	Koordinasi sistem pelaksanaan kebijakan kependudukan
1	10	XX	15	06	Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan
1	10	XX	15	07	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1	10	XX	15	08	Pengembangan database kependudukan
1	10	XX	15	09	Penyusunan kebijakan kependudukan
1	10	XX	15	10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1	10	XX	15	11	sosialisasi kebijakan kependudukan
1	10	XX	15	12	Peningkatan kapasitas keseimbangan kependudukan
1	10	XX	15	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	10	XX	15	14	Peningkatan pelayanan akta-akta catatan sipil
1	10	XX	15	15	Pengelolaan premi asuransi rumah tangga miskin
1	10	XX	15	16	Pemutakhiran data penduduk
1	10	XX	16		Program Bidang Kesejahteraan Sosial
1	10	XX	16	01	Pelayanan dan rehabilitasi kessos (Peningkatan Kualitas Bagi Lanjut Usia)
1	10	XX	16	02	Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin
1	10	XX	16	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	10	XX	16	04	Pengembangan bakat dan keterampilan anak kurang mampu
1	10	XX	16	06	Peningkatan kualitas SDM Kesos bagi Organisasi Sosial Masyarakat (Orsos)
1	10	XX	17		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1	10	XX	17	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1	10	XX	17	12	Peningkatan Kualitas Bagi Lanjut Usia
1	10	XX	18		Program Pembinaan Anak Terlantar
1	10	XX	18	04	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
1	10	XX	19		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1	10	XX	19	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ✓
1	12	XX	15		Keluarga Berencana
1	12	XX	15	01	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
1	12	XX	15	02	Pelayanan KIE
1	12	XX	15	03	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

1	12	XX	15	04	Pelatihan PLKB dan PKB Tingkat Nasional
1	12	XX	15	05	Orientasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
1	12	XX	15	06	Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
1	12	XX	15	07	Operasional Pelayanan KB Melalui TMKK
1	12	XX	15	08	Operasional Pelayanan KB/KS Melalui Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK - KB - Kesehatan
1	12	XX	15	09	Dst ...
1	12	XX	15	10	Penerangan KB/KS melalui mobil unit penerangan (MUPEN)
1	12	XX	15	11	Bhakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
1	12	XX	15	12	Dst
1	12	XX	15	13	Pelayanan KB Keliling (TKBK)
1	12	XX	15	14	Pertemuan lengkap petugas lapangan KB
1	12	XX	15	15	Lomba KB di Lingkungan Perusahaan
1	12	XX	15	16	Pekan Promosi Program KB/KS dan Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS
1	12	XX	15	17	Peringatan Harganas Tk. Kabupaten
1	12	XX	15	18	Pelatihan PLKB dan PKB Tk. Nasional
1	12	XX	15	19	Pekayanan KB Keliling (TKBK)
1	12	XX	15	20	Penyediaan mobil penerangan (MUPEN) KB
1	12	XX	15	21	Penyediaan kendaraan ber motor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB
1	12	XX	16		Kesehatan Reproduksi Remaja
1	12	XX	16	01	Advokasi dan KIE
1	12	XX	16	02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
1	12	XX	16	03	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Bagi Kelompok Remaja
1	12	XX	17		Pelayanan Kontrasepsi
1	12	XX	17	01	Pelayanan konseling KB
1	12	XX	17	02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1	12	XX	17	03	Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis
1	12	XX	17	04	Dst
1	12	XX	17	05	Pelayanan sarana pelayanan KB dan klinik KB
1	12	XX	18		Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB - KR yang Mandiri
1	12	XX	18	01	Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1	12	XX	18	02	Pelaksanaan pendataan keluarga
1	12	XX	18	03	Koordinasi pengelolaan program
1	12	XX	18	04	Intensifikasi gerakan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal
1	12	XX	18	05	Pelaksanaan Pendataan Keluarga
1	12	XX	18	06	Penyusunan Analisa dan Dampak Program
1	12	XX	18	07	Pembentukan dan pelatihan kades P3KSS, Nakerwan dan Pokjanal GSI untuk persiapan lomba Tk. Propinsi Lampung
1	12	XX	18	08	Sosialisasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan
1	12	XX	18	09	Operasional pembinaan perempuan tani
1	12	XX	18	10	Peningkatan Promosi Hasil Pendataan Keluarga
1	12	XX	18	11	Dst ...
1	12	XX	18	12	Pengolahan Hasil Pendataan Keluarga
1	12	XX	19		Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1	12	XX	19	01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat
1	12	XX	19	02	dst
1	12	XX	19	03	dst

1	12	XX	20		Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR
1	12	XX	20	01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
1	12	XX	20	02	Fasilitas forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
1	12	XX	20	03	Pengadaan Sarana KEI Kesehatan Reproduksi Remaja
1	12	XX	20	05	Orientasi Bagi Fasilitator PIK - KRR dan SKR
1	12	XX	20	10	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK- KRR)
1	12	XX	21		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/Aids
1	12	XX	21	01	penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah
1	12	XX	21	02	dst
1	12	XX	22		Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1	12	XX	22	01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1	12	XX	22	02	Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Propinsi
1	12	XX	22	03	Dst
1	12	XX	23		Program dst...
1	12	XX	23	01	Dst...
1	12	XX	24		Program Pengembangan Model Operasional PKB-Posyandu-PAUD
1	12	XX	24	01	Studi banding keterpaduan program posyandu, BKB dan PAUS
1	12	XX	24	02	Dst....
1	13				Sosial
1	13	XX	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komoditas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya
1	13	XX	15	01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1	13	XX	15	02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
1	13	XX	15	03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1	13	XX	15	04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1	13	XX	15	05	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1	13	XX	15	06	Dst ...
1	13	XX	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1	13	XX	16	01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
1	13	XX	16	02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1	13	XX	16	03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
1	13	XX	16	04	Pelatihan ketampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
1	13	XX	16	05	Pelayanan psikologis bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana
1	13	XX	16	06	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
1	13	XX	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1	13	XX	16	12	Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna)
1	13	XX	17		Dst ...

1	13	XX	18		Dst
1	13	XX	19		Dst ...
1	13	XX	20		Dst
1	13	XX	21		Dst ...
1	13	XX	22		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1	13	XX	22	01	Monev UU No. 4/1980 tentang wajib lapor lowongan kerja perusahaan, hubungan industrial dan syarat-syarat kerja
1	13	XX	22	02	Dst ...
1	13	XX	23		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1	13	XX	23	01	Pengawasan perlindungan tenaga kerja dan perselisihan hubungan industrial
1	13	XX	23	02	Dst ...
1	13	XX	24		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1	13	XX	24	01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
1	13	XX	24	02	Dst ...
1	14				Tenaga Kerja
1	14	XX	15		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
1	14	XX	15	01	Penyusunan database tenaga kerja daerah
1	14	XX	15	02	Pembangunan balai latihan kerja
1	14	XX	15	03	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
1	14	XX	15	04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
1	14	XX	15	05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
1	14	XX	15	06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
1	14	XX	15	07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
1	14	XX	15	08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
1	14	XX	15	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	14	XX	15	10	Dst
1	14	XX	16		Peningkatan Kesempatan Kerja
1	14	XX	16	01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1	14	XX	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1	14	XX	16	03	Kerja sama pendidikan dan pelatihan
1	14	XX	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1	14	XX	16	05	Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewiraswastaan
1	14	XX	16	06	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
1	14	XX	16	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	14	XX	16	08	Monitoring dan Evaluasi Keppres No.4/1980 tentang Wajib Lowongan Kerja di PT dan Tenaga Asing
1	14	XX	17		Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1	14	XX	17	01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
1	14	XX	17	02	Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1	14	XX	17	03	Fasilitas prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1	14	XX	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1	14	XX	17	05	Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1	14	XX	17	06	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
1	14	XX	17	07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
1	14	XX	17	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	14	XX	17	09	Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
1	14	XX	17	10	Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dan Anak
				/r	
1	14	XX	18		Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
1	14	XX	18	01	Peningkatan koordinasi syarat-syarat kerja
1	14	XX	18	02	Dst.....
1	14	XX	19		Penyediaan Pelayanan Transformasi Ketrasmigrasian
1	14	XX	19	01	Pembentukan Pelayanan Transformasi dan Penyuluhan Ketrasmigrasian di 02 Kecamatan dalam rangka penginman transmigrasi ke Kalimantan
1	14	XX	19	01	Dst....
1	14	XX	20		Program promosi ketenagakerjaan
1	14	XX	20	01	Lomba bidang ketenakerjaan dan promosi pembangunan
1	14	XX	20	02	Dst.....
1	14	XX	21		Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
1	14	XX	21	01	Bimtek peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
1	14	XX	21	02	Dst.....
1	15				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	15	XX	15		Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif
1	15	XX	15	01	Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
1	15	XX	15	02	Sosialisasi kebijakan tentang UKM
1	15	XX	15	03	Fasilitas kemudahan formalisasi badan usaha UKM
1	15	XX	15	04	Pendirian unit penanganan pengaduan
1	15	XX	15	05	Pengkajian dampak regulasi /kebijakan nasional
1	15	XX	15	06	Perencanaan koordinasi dan pembangunan UKM
1	15	XX	15	07	Pengembangan jaringan infrastruktur UKM
1	15	XX	15	08	Fasilitas pengembangan proses produksi UKM
1	15	XX	15	09	Fasilitas permasalahan proses produksi UKM
1	15	XX	15	10	Pemberian fasilitas pengamanan kawasan UKM
1	15	XX	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	15	XX	15	12	Dst
1	15	XX	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1	15	XX	16	01	Fasilitas pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
1	15	XX	16	02	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi UKM dengan perusahaan asing
1	15	XX	16	03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha micro kecil menengah
1	15	XX	16	04	Peningkatan kerja sama dibidang HAKI
1	15	XX	16	05	Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi
1	15	XX	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1	15	XX	16	07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi /KUD
1	15	XX	16	08	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah
1	15	XX	16	09	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan mikro kecil menengah
1	15	XX	16	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1	15	XX	16	11	Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Dukungan Lomba Desa/UKS/P2KSS
1	15	XX	16	12	Pengentasan Kemiskinan Melalui Koperasi
1	15	XX	16	13	Pengembangan produk unggulan komoditi pisang
1	15	XX	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	XX	17	01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
1	15	XX	17	02	Pengembangan klaster bisnis
1	15	XX	17	03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintahan untuk UKM dan koperasi
1	15	XX	17	04	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha micro kecil menengah
1	15	XX	17	05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintahan bagi usaha micro kecil menengah
1	15	XX	17	06	Pengembangan sarana prasarana pemasaran produk UKM
1	15	XX	17	07	Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga
1	15	XX	17	08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
1	15	XX	17	09	Penyelenggaraan promosi produk
1	15	XX	17	10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
1	15	XX	17	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	15	XX	17	12	Pengembangan Informasi Potensi Koperasi
1	15	XX	17	13	Pelaksanaan Pasar Rakyat Ramadhan, hari Koperasi Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
1	15	XX	17	14	Magang dan Study KUKM
1	15	XX	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1	15	XX	18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
1	15	XX	18	02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perekonomian
1	15	XX	18	03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perekonomian
1	15	XX	18	04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perekonomian
1	15	XX	18	05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
1	15	XX	18	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usah koperasi
1	15	XX	18	07	Penyebaran model-model pengembangan koperasi
1	15	XX	18	08	Rintisn penerapan teknologi sederhana
1	15	XX	18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	15	XX	18	10	Bimtek Pengembangan Kinerja dan Pengendalian Koperasi
1	15	XX	18	11	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil
1	15	XX	18	12	Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP-Koperasi)
1	15	XX	18	13	Monitoring evaluasi dan revitalisasi koperasi dan investasi
1	15	XX	19		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1	15	XX	19	01	Potensi Daerah dan Peluang Investasi
1	15	XX	19	02	Promosi Penanaman Modal
1	16				Penanaman Modal Daerah
1	16	XX	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
1	16	XX	15	01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
1	16	XX	15	02	Pengembangan potensi unggulan daerah
1	16	XX	15	03	Fasilitasi dan koordiansi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
1	16	XX	15	04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDNPMA
1	16	XX	15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
1	16	XX	15	06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan

					instansi pemerintah dan dunia usaha
1	16	XX	15	07	Pengawasan dan evaluasi kinerja aparaturn Badan Penanaman Modal Daerah
1	16	XX	15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1	16	XX	15	09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
1	16	XX	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi
1	16	XX	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	16	XX	15	12	Dst ...
1	16	XX	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1	16	XX	16	01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1	16	XX	16	02	Dst ...
1	16	XX	17		Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
1	16	XX	17	01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
1	16	XX	17	02	Dst
1	17				Kebudayaan
1	17	XX	15		Program Pengembangan Nilai Budaya
1	17	XX	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1	17	XX	15	02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
1	17	XX	15	03	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
1	17	XX	15	04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1	17	XX	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri
1	17	XX	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1	17	XX	16	01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
1	17	XX	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
1	17	XX	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1	17	XX	17	04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
1	17	XX	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1	18				Kepemudaan dan Olah Raga
1	18	XX	15		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1	18	XX	15	01	Pendataan potensi kepemudaan
1	18	XX	15	02	Dst ..
1	18	XX	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1	18	XX	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan
1	18	XX	16	02	Dst ..
1	18	XX	17		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1	18	XX	17	01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1	18	XX	17	02	Dst ..
1	18	XX	18		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1	18	XX	18	01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
1	18	XX	18	02	Dst ..
1	18	XX	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
1	18	XX	19	01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

1	18	XX	19	02	Dst ..
1	18	XX	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1	18	XX	20	01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1	18	XX	20	02	Dst ..
1	18	XX	20	17	Kegiatan Hardiknas, Haornas, dan Hari Sumpah Pemuda
1	18	XX	20	18	Lomba olah raga 02 SN SD pengiriman atlit prestasi ke Tingkat Propinsi/Nasional
1	18	XX	20	19	Dst ..
1	18	XX	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1	18	XX	21	01	Peningkatan pola kemitraan antar pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1	18	XX	21	02	Dst ..
1	18	XX	21	08	Pengadaan sarana olah raga SD/SMP
1	18	XX	21	09	Dst ..
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1	19	XX	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1	19	XX	15	01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1	19	XX	15	02	Pembangunan pos jaga /ronda
1	19	XX	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1	19	XX	15	04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
1	19	XX	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan
1	19	XX	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	19	XX	15	07	Pelatihan satuan keamanan lingkungan masyarakat (Linmas Desa)
1	19	XX	16		Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
1	19	XX	16	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1	19	XX	16	02	Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dan teknik pencegahan kejahatan
1	19	XX	16	03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
1	19	XX	16	04	Pengangkatan karasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah
1	19	XX	16	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	19	XX	16	06	Dst
1	19	XX	16	07	Penyuluhan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Terhadap Masyarakat
1	19	XX	16	08	Penertiban Gubuk-Gubuk Liar disepanjang Damija
1	19	XX	16	09	Pelatihan PPNS Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan
1	19	XX	16	10	Pelatihan Kesamaptaaan Anggota Polisi Pamong Praja
1	19	XX	16	11	Operasi Gerakan Disiplin Nasional
1	19	XX	16	12	Penambahan Peralatan Drum Band dan Koorsik Anggota Polisi Pamong Praja
1	19	XX	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan
1	19	XX	17	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1	19	XX	17	02	Peningkatan rasa soledaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1	19	XX	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
1	19	XX	17	04	dst.....
1	19	XX	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1	19	XX	18	01	Fasilitas pencapaian halqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1	19	XX	18	02	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

1	19	XX	18	03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1	19	XX	18	04	Pameran promosi pembangunan Tk. Propinsi
1	19	XX	18	05	Pameran promosi pembangunan Tk. Kabupaten
1	19	XX	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1	19	XX	19	01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1	19	XX	19	02	Komoditas Intelegen Daerah
1	19	XX	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
1	19	XX	20	01	Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba
1	19	XX	20	02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
1	19	XX	20	03	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
1	19	XX	20	04	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
1	19	XX	20	05	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan
1	19	XX	20	06	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
1	19	XX	20	07	Penegakan Peraturan Daerah Melalui Operasi Bersama Dinas Terkait
1	19	XX	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat
1	19	XX	21	01	Penyuluhan kepada masyarakat
1	19	XX	21	02	Koordinasi Forum Diskusi Politik
1	19	XX	21	03	Dst...
1	19	XX	21	04	Penyusunan Database parpol dan ormas
1	19	XX	21	05	Dst.
1	19	XX	21	06	Dialog politik dan pembangunan bagi kaum perempuan
1	19	XX	21	07	DESK pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1	19	XX	22		Program Pencegahan Diri dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1	19	XX	22	01	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam
1	19	XX	22	02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
1	19	XX	22	03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana alam
1	19	XX	22	04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara.
1	19	XX	22	05	Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Anggota Satlak PB dan Petugas Operasional Desa
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1	20	XX	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1	20	XX	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1	20	XX	15	02	Hearing Dialog dan Komunikasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama
1	20	XX	15	03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1	20	XX	15	04	Rapat-Rapat Paripurna
1	20	XX	15	05	Kegiatan Reses
1	20	XX	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
1	20	XX	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1	20	XX	15	08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1	20	XX	15	09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
1	20	XX	15	10	Belanja kegiatan penunjang operasional pimpinan DPRD

1	20	XX	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1	20	XX	16	01	Dst...
1	20	XX	16	02	Dst....
1	20	XX	16	03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
1	20	XX	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
1	20	XX	16	05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
1	20	XX	16	06	Koordinasi dengan pemerintah pusat pemerintah daerah lainnya
1	20	XX	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1	20	XX	17	01	Penyusunan analisis standar belanja
1	20	XX	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga
1	20	XX	17	03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
1	20	XX	17	04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1	20	XX	17	05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
1	20	XX	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
1	20	XX	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
1	20	XX	17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
1	20	XX	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1	20	XX	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
1	20	XX	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawab in Pelaksanaan APBD
1	20	XX	17	12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah/Penyusunan Laporan Triwulan
1	20	XX	17	13	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1	20	XX	17	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1	20	XX	17	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
1	20	XX	17	16	Peningkatan manajemen barang aset daerah
1	20	XX	17	17	Peningkatan manajemen investasi daerah
1	20	XX	17	18	Revaluasi appraisal aset/barang daerah
1	20	XX	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1	20	XX	17	20	Laporan barang milik daerah (LBMD)
1	20	XX	17	21	Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1	20	XX	17	22	Penyusunan laporan mutasi barang
1	20	XX	17	23	Penatausahaan Administrasi Keuangan
1	20	XX	17	24	Evaluasi dan Monitoring SPJ Bendahara
1	20	XX	17	25	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah
1	20	XX	17	26	Asistensi penyusunan neraca akhir
1	20	XX	17	27	Penyusunan sistem dan prosedur penyusunan APBD
1	20	XX	17	28	Penyusunan laporan triwulanan
1	20	XX	17	29	Dst...
1	20	XX	17	30	Administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
1	20	XX	17	31	Bimtek penyusunan laporan dan evaluasi
1	20	XX	17	32	Penyusunan sistem informasi LPPD dan ILPPD Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	17	33	Peningkatan SDM Pengelolaan Pembangunan Daerah
1	20	XX	17	34	Dst
1	20	XX	18		Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1	20	XX	18	01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten kota
1	20	XX	18	02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota

1	20	XX	18	03	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
1	20	XX	18	04	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
1	20	XX	18	05	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
1	20	XX	18	06	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
1	20	XX	18	07	Bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan
1	20	XX	19		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
1	20	XX	19	01	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1	20	XX	19	02	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
1	20	XX	19	03	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
1	20	XX	19	04	dst.....
1	20	XX	20		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1	20	XX	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1	20	XX	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
1	20	XX	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1	20	XX	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
1	20	XX	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan
1	20	XX	20	06	tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1	20	XX	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan dan ketertiban umum
1	20	XX	20	08	evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1	20	XX	20	09	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan APBD Bid. PU, Pendidikan dan Kesehatan
1	20	XX	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan
1	20	XX	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1	20	XX	21	02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
1	20	XX	21	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1	20	XX	21	04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Peraturan Perundang – undangan
1	20	XX	22		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1	20	XX	22	01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem prosedur pengawasan
1	20	XX	22	02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1	20	XX	22	03	dst.....
1	20	XX	23		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1	20	XX	23	01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1	20	XX	23	02	Pembuatan buku register administrasi pemerintahan Kecamatan dan pendataan papan data/bank data Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	23	03	Penyusunan data informasi rupa bumi
1	20	XX	23	04	Dst ...
1	20	XX	24		Program pengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat
1	20	XX	24	01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
1	20	XX	24	02	Pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat di bidang pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	24	03	dst.....
1	20	XX	25		Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

1	20	XX	25	01	fasilitas pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
1	20	XX	25	02	fasilitas pembentukan kekuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
1	20	XX	25	03	Fasilitas pembentukan kerjasama antar daerah dibidang hukum
1	20	XX	25	04	fasilitas pembentukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
1	20	XX	25	05	dst.....
1	20	XX	26		Penataan Peraturan Perundang-undangan
1	20	XX	26	01	Koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan
1	20	XX	26	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1	20	XX	26	03	Legilasi rancangan peraturan perundang-undangan
1	20	XX	26	04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1	20	XX	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan
1	20	XX	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundangan yang baru lebih tinggi dalam keserasian antar peraturan perundangan daerah
1	20	XX	26	07	Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum
1	20	XX	26	08	Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum
1	20	XX	26	09	Pendidikan dan pelatihan formal
1	20	XX	26	10	Pembuatan katalogisasi dan abstrak peraluran perundang-undangan
1	20	XX	26	11	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan
1	20	XX	26	12	Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dalam rangka tertib administrasi pertanahan
1	20	XX	26	13	Publikasi peraturan perundang-undangan tentang kode wilayah administrasi pertanahan
1	20	XX	26	14	Dst ...
1	20	XX	27		Program penataan daerah otonomi baru
1	20	XX	27	03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
1	20	XX	28	05	Pembuatan peta Kecamatan se –Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	28		Dst...
1	20	XX	28	01	Dst.....
1	20	XX	29		Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan
1	20	XX	29	01	Bimbingan Teknis Kearsipan
1	20	XX	29	02	Bimbingan Teknis Perpustakaan
1	20	XX	29	03	Diklat Kearsipan dan Perpustakaan
1	20	XX	29	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan
1	20	XX	29	05	Pengembangan Perpustakaan Umum (Perpustakaan Desa dan Sekolah)
1	20	XX	29	06	Gerakan Minat Baca Masyarakat
1	20	XX	29	07	Akuisisi Arsip dan Pengolahan Bahan Pustaka
1	20	XX	29	08	Pembentukan perpustakaan percontohan
1	20	XX	29	09	Sosialisasi kebijakan perpustakaan dan kearsipan
1	20	XX	29	10	Pengolahan data (Database) perpustakaan dengan teknologi informasi
1	20	XX	29	11	Monitoring dan evaluasi (Pengawasan) Kearsipan dan Perpustakaan
1	20	XX	30		Program Peningkatan Syiar Agama
1	20	XX	30	01	Musabaqoh Tilawatil Qur'an
1	20	XX	30	02	Pembinaan Qori Qori'ah
1	20	XX	30	03	Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi
1	20	XX	30	04	Pembinaan Imam dan Khotib
1	20	XX	30	05	Pembinaan Ta'mir Masjid
1	20	XX	30	06	Dst ...

1	20	XX	31		Program Meningkatkan Peran Dan Fungsi Sarana Dan Prasarana Keagamaan
1	20	XX	31	01	Operasional Penyerahan Bantuan Rumah Ibadah
1	20	XX	31	02	Operasional Penyerahan Bantuan Yayasan Pendidikan Memuansa Agama
1	20	XX	31	03	Seminar membangun peradaban dan zakat
1	20	XX	31	04	Dst ...
1	20	XX	32		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Terhadap Masalah Sosial
1	20	XX	32	01	Pembinaan TP, UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	32	02	Sosialisasi Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kader Posyandu
1	20	XX	32	03	Sosialisasi TP, UKS Kecamatan dan tim pelaksana UKS sekolah se-Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	32	04	Sosialisasi Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kader Posyandu
1	20	XX	33		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk Hiv / Aids
1	20	XX	33	01	Peningkatan SDM Tim Pembina Satgas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba dan Satgas Desa/Kelurahan
1	20	XX	33	02	Sosialisasi tim pembina satgas sekolah peduli narkoba dan satgas desa/kelurahan
1	20	XX	33	03	Dst ...
1	20	XX	34		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
1	20	XX	34	07	Penerbitan Tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selatan 'Ragom Helau'
1	20	XX	34	08	Pembuatan Buku Data Fakta 2007, Kalender Tahun 2008
1	20	XX	34	09	Pengadaan buku agenda kerja
1	20	XX	34	10	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
1	20	XX	34	11	Pengadaan maket Lampung Selatan
1	20	XX	34	12	Pembuatan panel photo Bupati-Wakil Bupati Lampung Selatan
1	20	XX	35		Program Fasilitas Peningkatan Fasilitas SDM bidang Komunikasi dan Dokumentasi
1	20	XX	35	01	Penyertaan Pelatihan Kehumasan
1	20	XX	35	02	Dst ..
1	20	XX	36		Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Analisis Jabatan
1	20	XX	36	01	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	36	02	Sosialisasi dan evaluasi pengembangan budaya kerja Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	36	03	Penyusunan pedoman pakaian dinas
1	20	XX	36	04	Penyusunan rincian tugas jabatan pada perangkat daerah
1	20	XX	36	05	Implementasi pengukuran indek kepuasan masyarakat (IKM)
1	20	XX	36	06	Dst ..
1	20	XX	37		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan
1	20	XX	37	01	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan keselarasan gender
1	20	XX	37	02	Dst ...
1	20	XX	38		Program Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan
1	20	XX	38	01	Dst
1	20	XX	38	02	Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
1	20	XX	38	03	Pengembangan sisten informasi gender dan anak

1	20	XX	38	04	Bimbingan teknis bagi tenaga relawan perlindungan perempuan bagi pengurus organisasi perempuan se-Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	38	05	Workshop peningkatan peran perempuan pengambilan keputusan
1	20	XX	38	06	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1	20	XX	38	08	Koordinasi penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
1	20	XX	38	09	Temu koordinasi guru tugas kota anak (KLA) Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	38	10	Pengembangan Sistem Informasi Gender & Anak
1	20	XX	38	11	Dst ..
1	20	XX	38	12	Pembinaan dan pemberian bantuan kepada warga binaan P3KSS
1	20	XX	38	13	Dst ..
1	20	XX	39		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1	20	XX	39	01	Sosialisasi & Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan
1	20	XX	39	02	Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
1	20	XX	39	03	Pembinaan kepada warga binaan P3-KSS
1	20	XX	39	04	Kegiatan Pembentukan Kader P3 - KSS, Nakerwan dan Pokjanel GSI untuk Persiapan Lomba Tk. Propinsi Lampung
1	20	XX	39	05	Pembinaan Pendukung Bidang Pemberdayaan Perempuan Untuk Lomba Desa, UKBM, Posyandu, Kesrak PKK - KB - Kes Persiapan Lomba Tk. Propinsi Lampung
1	20	XX	39	06	Sosialisasi standar operasional (SOP) pemulangan dan reintegrasi korban perdagangan orang
1	20	XX	39	07	Pelatihan bagi peningkatan pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan
1	20	XX	39	08	Sosialisasi pelaksanaan pos pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan di Kecamatan
1	20	XX	39	09	Temu koordinasi pelaksanaan P2TP2 di Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	39	10	Dst ..
1	20	XX	40		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1	20	XX	40	01	Dst
1	20	XX	40	02	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga syakinah
1	20	XX	40	03	Kegiatan Penyuluh Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam membangun Keluarga Sakinah
1	20	XX	40	04	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
1	20	XX	40	05	Pelatihan peningkatan keterampilan sumber daya perempuan yang mandiri
1	20	XX	41		Inventarisasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas/Instansi
1	20	XX	41	01	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bulanan dan Rapat Koordinasi Khusus Pemda Kab. Lamsel
1	20	XX	41	02	Dst ..
1	20	XX	42		Program Peningkatan Administrasi Kecamatan
1	20	XX	42	01	Bimbingan Teknis Sekcam dan Kasie Pemerintahan dan Pengadaan Buku Administrasi Kecamatan
1	20	XX	42	02	Pemeliharaan plang/papan nama Kecamatan dan gapura pintu masuk Kantor Kecamatan
1	20	XX	42	03	Dst ..
1	20	XX	43		Pendataan Kode Wilayah Kecamatan
1	20	XX	43	01	Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kab. Lamsel
1	20	XX	43	02	Dst ..
1	20	XX	44		Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparansi Dan Akuntabilitas
1	20	XX	44	02	Penyusunan LPPD dan IPPD Kabupaten Lampung Selatan

1	20	XX	44	03	Dst ..
1	20	XX	44	04	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Masalah Kasus Tanah
1	20	XX	44	05	Dst ..
1	20	XX	45		Pengembangan Dan Pemanapan Pemerintahan Desa
1	20	XX	45	01	Bimbingan Teknis Administrasi Desa dan Keuangan Desa
1	20	XX	45	02	Penyuluhan Juklak dan Juknis Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1	20	XX	45	03	Pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	45	04	Pemekaran Desa dan Pendefinitifan Desa
1	20	XX	45	05	ASKES Bagi Aparat Desa
1	20	XX	45	06	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa sarana kantor desa
1	20	XX	45	07	Pembinaan Bagi Anggota BPD
1	20	XX	45	08	Administrasi Alokasi Dana Desa
1	20	XX	45	09	Papan nama desa se-Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	46		Peningkatan Bantuan Sarana Dan Prasarana Desa Penunjang Bagi Pemerintahan Desa
1	20	XX	46	01	Pembinaan Pendataan dalam rangka Pembentukan BUMDes
1	20	XX	46	02	Asuransi Kesejahteraan Hari Tua Bagi Kepala Desa se Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	46	03	Perbaikan Kantor Desa / Balai Desa
1	20	XX	46	04	Pembinaan terhadap des tertinggal
1	20	XX	47		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Bidang Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Merk dan Undang-undang Gangguan (Ho).
1	20	XX	47	01	Operasional Tim dan Sekretariat Tim Penegakan Perda dari Bidang Perizinan dilingkungan Pemerintah Kab Lampung Selatan
1	20	XX	47	02	Pengacaraan Lintas sektor Perusahaan Skala Besar yang Mengajukan Perzinan
1	20	XX	47	03	Regristasi Pembinaan Perekonomian Daerah
1	20	XX	47	04	Pengecekan Indeks Lokasi, Gangguan dan Luas Berdasarkan Perda No.2 Tahun-2005 dan Pengadaan Buku Potensi daerah
1	20	XX	47	05	Pembuatan papan Merk Sadar Retribusi dan Peneng Bagi Pengusaha se-Kab Lampung Selatan
1	20	XX	47	06	Optimalisasi sarana kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (P2TSP) Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	47	07	Registrasi perekonomian daerah
1	20	XX	48		Peningkatan Ketahanan Pangan
1	20	XX	48	01	Bantuan Transportasi monitoring dan pendistribusian raskin
1	20	XX	48	02	Operasional Tim Pemantauan Harga Sembako di Lampung Selatan
1	20	XX	49		Peningkatan PAD di bidang perizinan
1	20	XX	49	01	Dst....
1	20	XX	49	02	Pembuatan program aplikasi SIM perizinan satu pintu
1	20	XX	49	03	Sosialisasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
1	20	XX	49	04	Pembahasan terpadu tim teknis Dinas/Instansi tentang perusahaan skala menengah dan besar yang mengajukan perizinan
1	20	XX	49	05	Sosialisasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
1	20	XX	50		Penciptaan iklim usaha kecil menengah
1	20	XX	50	01	Penyuluhan dan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah

1	20	XX	50	02	Dst....
1	20	XX	51		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1	20	XX	51	01	Dst ...
1	20	XX	51	02	Dst ...
1	20	XX	51	03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
1	20	XX	51	04	Dst ...
1	20	XX	51	05	Pengiriman peserta diklat PIM Tk. II & III
1	20	XX	51	06	Penyelenggaraan diklatpim Tk. IV
1	20	XX	51	07	Diklat prajabatan golongan III CPND Reguler Angkatan I
1	20	XX	51	08	Diklat prajabatan golongan III CPND Reguler Angkatan II
1	20	XX	51	09	Diklat prajabatan golongan III CPND Reguler Angkatan III
1	20	XX	51	10	Diklat prajabatan golongan I & II Eks. Honorer Angkatan XXVIII
1	20	XX	51	11	Diklat prajabatan golongan I & II Eks. Honorer Angkatan XXIX
1	20	XX	51	12	Diklat prajabatan golongan I & II Eks. Honorer Angkatan XXX
1	20	XX	51	13	Diklat prajabatan golongan I & II Eks. Honorer Angkatan XXXI
1	20	XX	51	14	Diklat prajabatan golongan I & II Eks. Honorer Angkatan XXXII
1	20	XX	51	15	Diklat prajabatan golongan I & II Eks. Honorer Angkatan XXXIII
1	20	XX	51	16	Diklat prajabatan golongan I & II Eks. Honorer Angkatan XXXIV
1	20	XX	51	17	Diklat prajabatan golongan I & II Eks. Honorer Angkatan XXXV
1	20	XX	51	18	Diklat prajabatan golongan I & II Eks. Honorer Angkatan XXXVI
1	20	XX	51	19	Penyelenggaraan Diklat Pengawasan TK/SD
1	20	XX	51	20	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1	20	XX	51	21	Dst ..
1	20	XX	52		Program Dst ...
1	20	XX	52	01	Dst ...
1	20	XX	52	02	Dst ...
1	20	XX	52	03	Penempatan PNS
1	20	XX	52	04	Dst ...
1	20	XX	52	05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1	20	XX	52	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
1	20	XX	52	17	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
1	20	XX	52	18	Pelaksanaan Pelayanan Pensiun
1	20	XX	52	19	Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian
1	20	XX	52	20	Pembuatan Tanda Pengenal (ID CARD) PNS
1	20	XX	52	21	Penyelesaian Penilaian dan Penetapan Angka Kredit PNS Fungsional
1	20	XX	52	22	Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS
1	20	XX	52	23	Dst ...
1	20	XX	53		Program Peningkatan Keterampilan Calon Tenaga Kerja
1	20	XX	53	01	Penyelenggaraan diklat teknis montir sepeda motor
1	20	XX	53	02	Penyelenggaraan dilat teknik menjahit dan bordir
1	20	XX	53	03	Penyelenggaraan diklat teknik las listrik dan karbit
1	20	XX	53	04	Penyelenggaraan diklat instalasi listrik rumah tangga
1	20	XX	53	05	Penyelenggaraan diklat teknologi hasil pertanian
1	20	XX	53	06	Penyelenggaraan teknik mobil bensin
1	20	XX	53	07	Dst ...
1	20	XX	54		Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1	20	XX	54	01	Pembinaan jasa konstruksi
1	20	XX	54	02	Dst....
1	20	XX	55		Penciptaan iklim usaha yang sehat

1	20	XX	55	01	Fasilitasi kerjasama kemitraan pasar pisang dan profil pasar pisang
1	20	XX	55	02	Dst....
1	20	XX	56		Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1	20	XX	56	01	Pemilihan perusahaan pembina tenaga kerja wanita terbaik Tingkat Kabupaten Lampung Selatan
1	20	XX	56	02	Dst....
1	21				Ketahanan Pangan
1	21	XX	15		Program Dst ...
1	21	XX	15	01	Dst ..
1	21	XX	15	02	Dst ..
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	22	XX	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1	22	XX	15	01	Peberdayaan lembaga dan organisasi
1	22	XX	15	02	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
1	22	XX	15	03	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
1	22	XX	15	04	Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS
1	22	XX	15	05	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
1	22	XX	15	06	Dst ..
1	22	XX	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1	22	XX	16	01	Program pengembangan lembaga skonomi pedesaan
1	22	XX	16	02	Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman
1	22	XX	16	03	pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik negara
1	22	XX	16	04	pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan
1	22	XX	16	05	fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan
1	22	XX	16	06	fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
1	22	XX	16	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	22	XX	16	08	Penyiapan masyarakat dan pengembangan tehnologi tepat guna (pengolahan pisang)
1	22	XX	16	09	Pameran/Gelar Teknologi Tepat guna Pedesaan
1	22	XX	16	10	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
1	22	XX	16	11	Pelatihan Kader Posyantekdes
1	22	XX	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1	22	XX	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1	22	XX	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1	22	XX	17	03	Pembangunan stimulan pembangunan desa
1	22	XX	17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	22	XX	17	05	Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat
1	22	XX	17	06	Pemugaran rumah sehat & lingkungan kumuh
1	22	XX	17	07	PNPM-PPK
1	22	XX	17	08	Pembangunan embrio pasar rakyat dan semenisasi rumah kumuh
1	22	XX	17	09	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI
1	22	XX	17	10	PNPM-PPK
1	22	XX	17	11	Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan
1	22	XX	17	12	Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
1	22	XX	17	13	Dst ..

1	23				Statistik
1	23	XX	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1	23	xx	15	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
1	23	xx	15	02	Dst ..
1	25				Komunikasi dan Informatika
1	25	XX	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1	25	xx	15	01	Dst ..
1	25	xx	15	02	Dst ..
1	25	xx	15	03	Dst ..
1	25	xx	15	04	Dst ..
1	25	xx	15	05	Dst ..
1	25	xx	15	06	Dst ..
1	25	xx	15	07	Penerbitan tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selatan "Ragom Helau" ✓
1	25	xx	15	08	Pembuatan buku data – fakta 2008
1	25	xx	15	09	Pengadaan Kalender Pemda Kabupaten Lampung Selatan
1	25	xx	15	10	Pengadaan buku agenda kerja Kabupaten Lampung Selatan
1	25	xx	15	11	Pengadaan peralatan peliputan
1	25	xx	15	12	Penayangan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui televisi
1	25	XX	16		Program Dst..
1	25	xx	16	01	Dst ..
1	25	XX	17		Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
1	25	xx	17	01	Dst ..
1	25	xx	17	02	Penyertaan pelatihan dan sosialisasi kehumasan
1	26				Perpustakaan
1	26	XX	15		Program Pengembangan Kearsipan
1	26	xx	15	01	Akuisisi Arsip
1	26	xx	15	02	Diklat Kearsipan
1	26	xx	15	03	Bimbingan Teknis Kearsipan
1	26	xx	15	04	Dst ..
1	26	XX	16		Program Pengembangan Perpustakaan
1	26	xx	16	01	Bimbingan Teknis Perpustakaan
1	26	xx	16	02	Diklat Perpustakaan
1	26	xx	16	03	Gerakan gemar membaca masyarakat
1	26	xx	16	04	Dst ..
1	26	xx	16	05	Dst ..
1	26	xx	16	06	Pelayanan mobil perpustakaan keliling
1	26	xx	16	07	Dst ..
1	26	xx	16	08	Pengembangan perpustakaan umum (perpustakaan desa dan sekolah)
1	26	xx	16	09	Pembentukan taman baca masyarakat
1	26	xx	16	10	Gerakan gemar membaca masyarakat
1	26	xx	16	11	Pengadaan sarana dan prasarana
1	26	xx	16	12	Dst ..
1	26	XX	17		Program Pengembangan Dokumentasi
1	26	xx	17	01	Diklat Dokumentasi

1	26	xx	17	02	Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah
1	26	xx	17	03	Dst ..
2					URUSAN PILIHAN
2	01				Pertanian
2	01	XX	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2	01	XX	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2	01	XX	15	02	Peningkatan kemampuan lembaga petani
2	01	XX	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani
2	01	XX	15	04	Peningkatan sistem intensif dan disinsentif bagi petani kelompok tani
2	01	XX	15	05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
2	01	XX	15	06	Pembinaan dan tindak lanjut revitalisasi perkebunan
2	01	XX	15	07	Pemberdayaan peningkatan pendapatan petani (P4)
2	01	XX	15	08	Pengembangan Komoditas Nilam (Dana AD HOCK)
2	01	XX	15	09	Sarasehan
2	01	XX	15	10	Pembinaan Masyarakat Miskin (Siger Mas)
2	01	XX	15	11	Dst ..
2	01	XX	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2	01	XX	16	01	Penanganan daerah rawan pangan
2	01	XX	16	02	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pertanian
2	01	XX	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2	01	XX	16	04	Analisis jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
2	01	XX	16	05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
2	01	XX	16	06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
2	01	XX	16	07	Promosi Atas Hasil Pertanian Unggulan Daerah
2	01	XX	16	08	Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2	01	XX	16	09	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
2	01	XX	16	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
2	01	XX	16	11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
2	01	XX	16	12	Penanganan pasca panen pengolahan hasil pertanian
2	01	XX	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah
2	01	XX	16	14	Pengembangan desa mandiri pangan
2	01	XX	16	15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
2	01	XX	16	16	Pengembangan Diversifikasi Tanaman
2	01	XX	16	17	Pengembangan pertanian pada lahan kering
2	01	XX	16	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa
2	01	XX	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
2	01	XX	16	20	Pengembangan perbenihan perbibitan
2	01	XX	16	21	Pengembangan sistem ekonomi pasar
2	01	XX	16	22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2	01	XX	16	23	Koordinasi kebijakan perbesaran
2	01	XX	16	24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan pedesaan
2	01	XX	16	25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
2	01	XX	16	26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
2	01	XX	16	27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
2	01	XX	16	28	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
2	01	XX	16	29	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
2	01	XX	16	30	Penyuluhan sumber pangan alternatif
2	01	XX	16	31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2	01	XX	16	32	Penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan
2	01	XX	16	33	Pengembangan alat mesin pertanian
2	01	XX	16	34	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Perbenihan
2	01	XX	16	35	Pengelolaan Lahan dan Air
2	01	XX	16	36	Penanggulangan desa miskin melalui pengembangan pembibitan
2	01	XX	16	37	Pengembangan Sentra Produksi Hortikultura (Pendamping TP)
2	01	XX	16	38	Penguatan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)
2	01	XX	16	39	Pengembangan sentra produksi dan agribisnis hortikultura
2	01	XX	16	40	Penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian
2	01	XX	16	41	Penanganan pasca panen komoditas unggulan
2	01	XX	16	42	Penanganan desa miskin (Siger Mas)
2	01	XX	16	43	Akurasi data dan promosi pembangunan perkebunan
2	01	XX	16	44	Diversifikasi kelapa dan pisang
2	01	XX	16	45	Partisipasi gerakan masyarakat melalui pengembangan komoditas kakao
2	01	XX	16	46	Pemantapan sumber benih kakao dan karet (DANA AD HOCK)
2	01	XX	16	48	Peningkatan sarana dan prasarana produksi (Dana Dak dan Pendamping)
2	01	XX	16	49	Dst ..
2	01	XX	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
2	01	XX	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan
2	01	XX	17	02	Fasilitas kerjasama regional/nasional internasional penyediaan hasil produksi pertanian /perkebunan komplement
2	01	XX	17	03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan pedesaan produksi hasil pertanian perkebunan
2	01	XX	17	04	Pembangunan pusat-pusat etalase eksebisi,promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan
2	01	XX	17	05	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan pedesaan produksi hasil pertanian perkebunan
2	01	XX	17	06	Penyuluhan pusat-pusat etalase eksebisi,promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan
2	01	XX	17	07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan unggulan daerah
2	01	XX	17	08	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
2	01	XX	17	09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
2	01	XX	17	10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian perkebunan masyarakat
2	01	XX	17	11	Penyuluhan distribusi pemasaran atau hasil produksi pertanian
2	01	XX	17	12	penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian
2	01	XX	17	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	XX	17	14	Kerjasama Pengembangan Pengolahan Kelapa Terpadu
2	01	XX	17	15	Dst....
2	01	XX	17	16	Pembangunan stasiun terminal agribisnis (STA) dan sub STA
2	01	XX	17	17	Dst...
2	01	XX	17	18	Fasilitasi kerja sama pemasaran dan gelar teknologi perkebunan
2	01	XX	17	19	Siaran pedesaan
2	01	XX	17	20	Cetakan media pertanian
2	01	XX	17	21	Promosi dan informasi pasar hasil produksi pertanian/perkebunan
2	01	XX	17	22	Lomba desa
2	01	XX	18		Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan
2	01	XX	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian./perkebunan tepat guna
2	01	XX	18	02	pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

2	01	XX	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
2	01	XX	18	04	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Tehnologi Pertanian Tepat Guna
2	01	XX	18	05	Pelatihan dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
2	01	XX	18	06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
2	01	XX	18	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	XX	18	08	Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani jarak menuju desa mandiri energi
2	01	XX	18	09	Demplot pertanian
2	01	XX	18	10	SL PTT Padi (Penanda Padi)
2	01	XX	18	11	SL pertanian organik
2	01	XX	18	12	Pisang
2	01	XX	18	13	SL sapi
2	01	XX	18	14	Dst...
2	01	XX	18	15	Dst...
2	01	XX	18	16	SL ikan kolam
2	01	XX	18	17	Dst ...
2	01	XX	18	18	SLPHT jagung
2	01	XX	18	19	SLPHT kelapa dalam
2	01	XX	18	20	SLPHT kelapa sawit
2	01	XX	18	21	Pengembangan desa mandiri energi berbasis perkebunan (Dana Adhock)
2	01	XX	18	22	Dst ..
2	01	XX	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
2	01	XX	19	01	Penyuluhan peningkatan peroduksi pertanian perkebunan
2	01	XX	19	02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan
2	01	XX	19	03	Pengembangan Bibit unggul Pertanian / Perkebunan
2	01	XX	19	04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2	01	XX	19	05	Penyuluhan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
2	01	XX	19	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	XX	19	07	Pengembangan keterpaduan kawasan strategis perkebunan
2	01	XX	19	08	Pengembangan sentra komoditas perkebunan
2	01	XX	19	09	Pengolahan lahan dan air untuk perkebunan
2	01	XX	19	10	Pengembangan kawasan agropolitan melalui penyediaan sarana produksi
2	01	XX	19	11	Pengembangan keterpaduan hutan kemasyarakatan dengan komoditas perkebunan
2	01	XX	19	12	Pelatihan peningkatan produksi dan mutu produk makanan
2	01	XX	19	13	Perbaikan Infrastruktur Lahan
2	01	XX	19	14	Pengembangan Hortikultura Unggulan dan Bernilai Ekonomis Tinggi
2	01	XX	19	15	Dst ...
2	01	XX	20	-	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
2	01	XX	20	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian /perkebunan
2	01	XX	20	02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian /perkebunan
2	01	XX	20	03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan
2	01	XX	20	04	Peningkatan Operasional Penyuluh Pertanian
2	01	XX	20	05	Temu teknis penyuluhan pertanian
2	01	XX	20	06	Penghargaan petani dan penyuluh prestasi
2	01	XX	20	07	Penilaian angka kredit point
2	01	XX	20	08	Penilaian kelas kemampuan kelompok tani
2	01	XX	20	09	Penyuluhan perencanaan penyuluhan pertanian
2	01	XX	20	10	BPP model
2	01	XX	20	11	Dst
2	01	XX	20	12	Sarana penyuluhan pertanian

2	01	XX	20	13	Studi banding penyuluhan pertanian
2	01	XX	20	14	Sosialisasi pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)
2	01	XX	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2	01	XX	21	01	Pendataan masalah peternakan
2	01	XX	21	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2	01	XX	21	03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2	01	XX	21	04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
2	01	XX	21	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	XX	21	06	Penanganan dan Pengendalian Penyakit Avian Influenza
2	01	XX	21	07	Kegiatan pemberantasan dan pengendalian Avian Influenza
2	01	XX	21	08	Kegiatan pelayanan kesehatan hewan
2	01	XX	22		Program Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak
2	01	XX	22	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Produktivitas
2	01	XX	22	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi Proyek
2	01	XX	22	10	Peningkatan produksi ternak desa miskin (Siger Mas)
2	01	XX	22	11	Pengembangan bibit ternak
2	01	XX	22	12	Dst ..
2	01	XX	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2	01	XX	23	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
2	01	XX	23	02	Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
2	01	XX	23	03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
2	01	XX	23	04	Pembangunan pusat-pusat etalase /eksebis promosi atas hasil produksi peternakan
2	01	XX	23	05	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2	01	XX	23	06	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
2	01	XX	23	07	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
2	01	XX	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2	01	XX	24	01	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
2	01	XX	24	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2	01	XX	24	03	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2	01	XX	24	04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi penerapan tepat guna
2	01	XX	24	05	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
2	01	XX	24	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2	01	XX	24	07	Introduksi bibit ternak baru
2	01	XX	25		Program Pendampingan Kegiatan Tugas Pembantuan
2	01	XX	25	01	Pendampingan tugas pembantuan peningkatan produktivitas perkebunan
2	01	XX	25	02	Pendampingan tugas pembantuan peningkatan produksi perkebunan (Ditjen Bun)
2	01	XX	25	03	Pendampingan tugas pembantuan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (Ditjen P2HP)
2	01	XX	25	04	Pendampingan tugas pembantuan APBN
2	01	XX	25	05	Sekretariat dan pembangunan peternakan
2	01	XX	25	06	Dst ...
2	01	XX	26		Program Agribisnis
2	01	XX	26	01	Pelatihan, magang, pameran dan lomba
2	01	XX	26	02	Kontes ternak

2	01	XX	27		Dst....
2	01	XX	27	01	Dst....
2	01	XX	28		Perencanaan Kegiatan
2	01	XX	28	01	Pembuatan laporan, monitoring dan evaluasi data
2	01	XX	28	02	Dana pendamping kegiatan tugas pembantuan APBN
2	01	XX	29		Program peningkatan produksi hasil pertanian
2	01	XX	29	01	Peningkatan sarana dan prasarana (DAK dan Pendamping)
2	01	XX	29	02	Dst. .
2	01	XX	30		Program Pengamanan Ternak
2	01	XX	30	01	Pencegahan dan penanggulangan penyakit avian influenza
2	01	XX	30	02	Pelayanan kesehatan ternak
2	01	XX	30	03	Dst....
2	02				Kehutanan
2	02	XX	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2	02	XX	15	01	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
2	02	XX	15	02	Pengembangan hutan tanaman
2	02	XX	15	03	Pengembangan hasil hutan non kayu
2	02	XX	15	04	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
2	02	XX	15	05	Optimalisasi PNPB
2	02	XX	15	06	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
2	02	XX	15	07	Pengembangan industri dan pemanfaatan hasil hutan
2	02	XX	15	08	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
2	02	XX	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2	02	XX	16	01	Koordinasi penyelenggaraan dan penghijauan hutan
2	02	XX	16	02	Pembuatan Bibit Benih Tanaman Kehutanan
2	02	XX	16	03	Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
2	02	XX	16	04	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
2	02	XX	16	05	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2	02	XX	16	06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2	02	XX	16	07	Dst ..
2	02	XX	16	08	Dst ..
2	02	XX	16	09	Optimalisasi pemanfaatan lahan (Alokasi Desa-desa Miskin)
2	02	XX	16	10	Dst ..
2	02	XX	17		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2	02	XX	17	01	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2	02	XX	17	02	sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
2	02	XX	17	03	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2	02	XX	17	04	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2	02	XX	17	05	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
2	02	XX	18		Program pemanfaatan kawasan hutan industri
2	02	XX	18	01	Pertanian tanaman palawija, padi gogoranch
2	02	XX	18	02	dst.....
2	02	XX	19		Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
2	02	XX	19	01	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

2	02	XX	19	02	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2	02	XX	19	03	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2	02	XX	19	04	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
2	02	XX	19	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	02	XX	19	06	Dst
2	02	XX	20		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2	02	XX	20	01	Pengembangan hutan masyarakat
2	02	XX	20	02	Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
2	02	XX	20	03	Dst
2	03				Energi dan Sumber Daya Mineral
2	03	XX	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2	03	XX	15	01	Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
2	03	XX	15	02	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C/ Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
2	03	XX	15	03	Monitoring dan pengendalian kegiatan dan penambangan bahan galian C/Pengawasan usaha dibidang pertambangan dan energi
2	03	XX	15	04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan/Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan pertambangan umum, tambang rakyat dan air bawah tanah
2	03	XX	15	05	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
2	03	XX	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	03	XX	15	07	Intensifikasi Pendapatan Pajak Bahan Galian C dan Pemantauan Dana Bagi Hasil Migas, PBBKAB dan ABT/AP
2	03	XX	15	08	Studi Perencanaan Penetapan harga Dasar Bahan Galian C
2	03	XX	15	09	Pembinaan dan Penyuluhan serta Sosialisasi Perda dan SK Bupati Bidang Pertambangan dan Energi
2	03	XX	15	10	Pemetaan geologi, pengawasan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2	03	XX	15	11	Monitoring pembinaan dan pengawasan pertambangan umum
2	03	XX	15	12	Pameran promosi pembangunan pertambangan
2	03	XX	15	13	Dst ..
2	03	XX	16		Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan/ Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrik
2	03	XX	16	01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat/Workshop dan pelatihan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)
2	03	XX	16	02	Dst...
2	03	XX	17		Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrik/Program pengelolaan data dan informasi dibidang pertambangan
2	03	XX	17	01	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan/Penyusunan Sistem Informasi Pertambangan Lampung Selatan serta Evaluasi dan Rencana Listrik Pedesaan
2	03	XX	17	01	Dst ...
2	03	XX	18		Program Pengelolaan pengembangan energi alternatif
2	03	XX	18	01	Persiapan pengembangan desa mandiri energi
2	03	XX	18	02	Pematokan dan pemetaan ulang batas wilayah pertambangan
2	03	XX	18	03	Work shop, sosialisasi dan pelatihan energi baru terbarukan
2	03	XX	18	04	Dst ..

2	03	XX	19		Program Minyak, Gas Bumi dan Kelistrikan
2	03	XX	19	01	Pengdaan pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Lampung Selatan
2	03	XX	19	02	Pengawasan usaha kelistrikan serta pemanfaatan energi
2	03	XX	19	03	Dst ..
2	04				Pariwisata
2	04	XX	15		Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
2	04	XX	15	01	Dst...
2	04	XX	15	02	Dst...
2	04	XX	15	03	Dst...
2	04	XX	15	04	Dst...
2	04	XX	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
2	04	XX	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2	04	XX	16	01	Dst...
2	04	XX	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan pariwisata
2	04	XX	16	03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
2	04	XX	16	04	Dst...
2	04	XX	16	05	Dst....
2	04	XX	16	06	Pengembangan daerah tujuan wisata
2	04	XX	17		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2	04	XX	17	01	Dst...
2	04	XX	17	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2	04	XX	17	03	Dst...
2	04	XX	17	04	Dst...
2	04	XX	17	05	Dst...
2	04	XX	17	06	Dst...
2	04	XX	17	07	Dst...
2	04	XX	17	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2	04	XX	17	09	Dst...
2	05				Kelautan dan Perikanan
2	05	XX	15		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2	05	XX	15	01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2	05	XX	15	02	Pendampingan Program PEMP, PLBPM dan Inventarisasi Kawasan Lingkungan Pemukiman Nelayan Calon Penerima Bantuan Program PLBPM 2009-2010
2	05	XX	16		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
2	05	XX	16	01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
2	05	XX	16	02	dst.....
2	05	XX	17		Peningkatan kesadaran dan periegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
2	05	XX	17	01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
2	05	XX	17	02	Operasi laut
2	05	XX	17	03	Dst ..

2	05	XX	18		Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2	05	XX	18	01	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2	05	XX	18	02	dst.....
2	05	XX	19		Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
2	05	XX	19	01	Penyuluhan budaya kelautan
2	05	XX	19	02	dst.....
2	05	XX	20		Pengembangan Budidaya Perikanan
2	05	XX	20	01	Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan dalam mendukung agropolitan
2	05	XX	20	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2	05	XX	20	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan
2	05	XX	20	04	Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan
2	05	XX	20	05	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengawasan budidaya air payau
2	05	XX	20	06	Pilot Project Rumput Laut
2	05	XX	21		Pengembangan Perikanan Tangkap
2	05	XX	21	01	Pendampingan pada kelompok nelayan
2	05	XX	21	02	Pembangunan dan pengembangan pusat pendaratan (PPI) Kalianda
2	05	XX	21	03	Pemeliharaan rutin berkala tempat pelelangan ikan
2	05	XX	21	04	Rehabilitasi sedang berat tempat pelelangan ikan
2	05	XX	21	05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
2	05	XX	21	06	Pembangunan TPI Bakau Heni
2	05	XX	21	07	Rehabilitasi dan pengembangan TPI Ketapang
2	05	XX	22		Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2	05	XX	22	01	Kajian sistem penyuluhan perikanan
2	05	XX	22	02	dst.....
2	05	XX	23		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2	05	XX	23	01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2	05	XX	23	02	Promosi pembangunan perikanan
2	05	XX	23	03	Dst
2	05	XX	24		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2	05	XX	24	01	Kajian kawasan budidaya laut air payau dan air tawar
2	05	XX	24	02	Operasional kawasan budidaya air payau dan air tawar
2	05	XX	24	03	Dst...
2	05	XX	25		Peningkatan Mutu Produksi Pasca Panen Perikanan
2	05	XX	25	01	Pembinaan produksi pasca panen perikanan dalam rangka mendukung agropolitan
2	05	XX	25	02	Dst
2	06				Perdagangan
2	06	XX	15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2	06	XX	15	01	koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2	06	XX	15	02	fasilitas penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
2	06	XX	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2	06	XX	15	04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah
2	06	XX	15	05	Pengadaan tabung pemadam kebakaran
2	06	XX	16		Program peningkatan kerja sama perdagangan internasional
2	06	XX	16	01	Penyiapan database kuota setiap jenis barang dan jasa
2	06	XX	16	02	Penyebarluasan informasi database kuota
2	03	XX	16	03	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
2	06	XX	16	04	Fasilitas penyelesaian sengketa dagang
2	06	XX	16	05	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
2	06	XX	16	06	dst.....
2	06	XX	17		Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2	06	XX	17	01	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
2	06	XX	17	02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
2	06	XX	17	03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
2	06	XX	17	04	Pengembangan database informasi potensi unggulan
2	06	XX	17	05	Kerjasama standarisasi mutu baik nasional, bateral, regional dan internasional
2	06	XX	17	06	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
2	06	XX	17	07	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
2	06	XX	17	08	Membangun jejaring dengan eksportir
2	06	XX	17	09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
2	06	XX	17	10	Pengembangan kluster ekspor
2	06	XX	17	11	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
2	06	XX	17	12	pengembangan promosi perdagangan internasional
2	06	XX	17	13	dst.....
2	06	XX	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2	06	XX	18	01	Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional
2	06	XX	18	02	Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha
2	06	XX	18	03	Pembangunan Pasar dan Distribusi Barang Produk
2	06	XX	18	08	Pengadaan konstruksi/pengembangan pasar
2	06	XX	18	09	Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang
2	06	XX	18	10	Dst ..
2	06	XX	19		Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
2	06	XX	19	01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
2	06	XX	19	02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
2	06	XX	19	03	Kegiatan penataan tempat usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
2	06	XX	19	04	Kegiatan fasilitas modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
2	06	XX	19	05	Kegiatan pergawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
2	06	XX	19	06	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan
2	06	XX	19	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar
2	06	XX	19	08	Pembinaan dan penyuluhan perdagangan dan perlindungan konsumen
2	06	XX	19	09	Pembinaan Pasar Desa dalam rangka mendukung Lomba Desa
2	06	XX	19	10	Lomba UPT Pasar PEMDA Se-Kab. Lampung Selatan
2	06	XX	19	11	Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar PEMDA Kab.Lampung Selatan
2	06	XX	20		Dst
2	06	XX	20	01	Dst...
2	06	XX	21		Pengawasan Kebersihan Dan Ketertiban Pasar
2	06	XX	21	01	Pengawasan kebersihan dan ketertiban pasar Pemda Kab. Lampung Selatan

2	07				Perindustrian
2	07	XX	15		Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2	07	XX	15	01	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
2	07	XX	15	02	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
2	07	XX	15	03	Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
2	07	XX	15	04	Pengembangan kapasitas penata pengukuran standarisasi pengujian dan kualitas
2	07	XX	15	05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
2	07	XX	15	06	Pengawasan BDKT, UTTP dan barang-barang yang beredar dipasaran
2	07	XX	15	07	Bimbingan penyuluhan (BIMBULUH) perlindungan konsumen
2	07	XX	16		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2	07	XX	16	01	fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya
2	07	XX	16	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2	07	XX	16	03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
2	07	XX	16	04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2	07	XX	16	05	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
2	07	XX	16	06	Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
2	07	XX	16	07	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil Bordir
2	07	XX	16	08	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan
2	07	XX	16	09	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil Pengolahan Hasil Pertanian
2	07	XX	16	10	Monitoring dan evaluasi bidang koperasi, industri dan perdagangan
2	07	XX	16	11	Ppromosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah
2	07	XX	16	12	Pelatihan keterampilan industri kecil genteng ✓
2	07	XX	16	13	Promosi dan Motivasi Industri Dagang Kecil dan Menengah
2	07	XX	16	14	Pelatihan Motivasi Berprestasi (AMT)
2	07	XX	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2	07	XX	17	01	Pembinaan kemampuan teknologi industri
2	07	XX	17	02	Dst...
2	07	XX	18		Program Penataan Struktur Industri
2	07	XX	18	01	Kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir
2	07	XX	18	02	Dst...
2	07	XX	18	03	Dst...
2	07	XX	18	04	Dst...
2	07	XX	18	05	Dst...
2	07	XX	18	06	Dst...
2	07	XX	18	07	Dst...
2	07	XX	18	08	Dst...
2	07	XX	18	09	Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang
2	07	XX	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
2	07	XX	19	01	Permbangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
2	07	XX	19	02	Dst...
2	07	XX	19	03	Dst...
2	07	XX	19	04	Dst...
2	07	XX	19	05	Dst...
2	07	XX	19	06	Dst...

2	07	XX	19	07	Dst...
2	07	XX	19	08	Penyuluhan peningkatan disiplin dan pengetahuan pedagang golongan ekonomi lemah
2	07	XX	20		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2	07	XX	20	01	Pembinaan terpadu pengembangan komoditi ekspor
2	07	XX	20	02	Dst..
2	07	XX	21		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2	07	XX	21	01	Pengembangan Informasi Pasar dan Distribusi Barang
2	07	XX	22		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2	07	XX	22	01	Penyuluhan peningkatan disiplin dan pengetahuan pedagang golongan ekonomi lemah.
2	07	XX	22	02	Dst..
2	07	XX	23		Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan
2	07	XX	23	01	Pengawasan Bdkt, Utp dan Barang-Barang Yang Beredar Dipasaran
2	07	XX	23	02	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan
2	07	XX	23	03	Bimbingan dan Penyuluhan (Bimbuluh) Perlindungan Konsumen

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009**

Kode Rekening					Uraian
4					PENDAPATAN DAERAH
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH
4	1	1			Hasil Pajak Daerah
4	1	1	01		Pajak Hotel
4	1	1	01	01	Hotel Bintang Lima Berlian
4	1	1	01	02	Hotel Bintang Lima
4	1	1	01	03	Hotel Bintang Empat
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga
4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu
4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga
4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu
4	1	1	01	10	Motel
4	1	1	01	11	Cottage
4	1	1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggarahan/Hostel/Rumah Kost dan Bangunan Sejenis
4	1	1	01	13	Wisma Pariwisata
4	1	1	01	14	Denda
4	1	1	01	15	Pajak Hotel
4	1	1	02		Pajak Restoran
4	1	1	02	01	Restoran
4	1	1	02	02	Rumah Makan
4	1	1	02	03	Café
4	1	1	02	04	Kantin
4	1	1	02	05	Katering
4	1	1	02	06	Food Court
4	1	1	02	07	Warung Makan Kaki Lima
4	1	1	02	08	Denda
4	1	1	02	09	Pajak Restoran
4	1	1	03		Pajak Hiburan
4	1	1	03	01	Tontonan Film/Bioskop
4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	1	03	03	Kontes Kecantikan
4	1	1	03	04	Kontes Binaraga

4	1	1	03	05	Pameran
4	1	1	03	06	Diskotik
4	1	1	03	07	Karoke
4	1	1	03	08	Klub Malam
4	1	1	03	09	Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	1	03	10	Permainan Bilyar
4	1	1	03	11	Permainan Golf
4	1	1	03	12	Permainan Bowling
4	1	1	03	13	Pacuan Kuda
4	1	1	03	14	Balap Kendaraan Bermotor
4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan
4	1	1	03	16	Panti Pijak/Refleksi
4	1	1	03	17	Mandi Uap/SPA
4	1	1	03	18	Pusat Kebugaran
4	1	1	03	19	Pertandingan Olah raga
4	1	1	03	20	Denda
4	1	1	03	21	Pajak Taman Hiburan
4	1	1	04		Pajak Reklame
4	1	1	04	01	Reklame Papan/Bill board/Videoteron/Megatron
4	1	1	04	02	Reklame Kain
4	1	1	04	03	Reklame Melekat/Striker/Tempelan
4	1	1	04	04	Reklame Selebaran/Poster
4	1	1	04	05	Reklame Berjalan
4	1	1	04	06	Reklame Udara
4	1	1	04	07	Reklame Ayung
4	1	1	04	08	Reklame Suara
4	1	1	04	09	Reklame Film/Slide
4	1	1	04	10	Reklame Peragaan
4	1	1	04	11	Reklame Cahaya
4	1	1	04	12	Reklame Kendaraan Dengan atau Tanpa Pengeras Suara
4	1	1	04	13	Reklame Papan Nama Seng dan Sejenisnya
4	1	1	04	14	Reklame Gantungan Berupa Plastik/Plagchain
4	1	1	04	15	Denda
4	1	1	04	16	Pajak Reklame
4	1	1	05		Pajak Penerangan Jalan
4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN
4	1	1	05	02	Tenaga Listrik dari PLN bukan untuk Industri
4	1	1	05	03	Tenaga Listrik dari PLN untuk Industri/Bisnis (I/B)
4	1	1	05	04	Tenaga Listrik Bukan Dari PLN Bukan Untuk Industri
4	1	1	05	05	Tenaga Listrik Bukan dari PLN untuk Industri/Bisnis
4	1	1	05	06	Denda
4	1	1	05	07	Pajak Perangan Jalan
4	1	1	06		Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C
4	1	1	06	01	Asbes

4	1	1	06	02	Batu Tulis
4	1	1	06	03	Batu Setengah Permata
4	1	1	06	04	Batu Kapur
4	1	1	06	05	Batu Apung
4	1	1	06	06	Permata
4	1	1	06	07	Andesit
4	1	1	06	08	Bentonit
4	1	1	06	09	Feldspar
4	1	1	06	10	Garam Batu (Halite)
4	1	1	06	11	Grafit
4	1	1	06	12	Granit
4	1	1	06	13	Gips
4	1	1	06	14	Kalsit
4	1	1	06	15	Kaolin
4	1	1	06	16	Leusit
4	1	1	06	17	Magnesit
4	1	1	06	18	Mika
4	1	1	06	19	Marmer
4	1	1	06	20	Nitrat
4	1	1	06	21	Opsidien
4	1	1	06	22	Oker
4	1	1	06	23	Pasir (Kerikil, Kuarsa)
4	1	1	06	24	Perlit
4	1	1	06	25	Phospat
4	1	1	06	26	Talk
4	1	1	06	27	Tanah (Serap-Fullers Eart, Diatome, Liat)
4	1	1	06	28	Tawas (Alum)
4	1	1	06	29	Tras
4	1	1	06	30	Yarosif
4	1	1	06	31	Zeolit
4	1	1	06	32	Denda
4	1	1	06	33	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
4	1	1	07		Pajak Parkir
4	1	1	07	01	Pajak Parkir
4	1	1	07	02	Dst
4	1	1	08		Pajak Air Bawah Tanah
4	1	1	08	01	Pajak Air Bawah Tanah
4	1	1	08	02	Dst
4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	09	02	Dst
4	1	1	10		Pajak Lingkungan
4	1	1	10	01	Pajak Lingkungan

4	1	1	10	02	Dst
4	1	2			Hasil Retribusi Daerah
4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum
4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	2	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	2	01	03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
4	1	2	01	04	Retribusi Pelayanan Rekaman dan Pengabuan Mayat
4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum
4	1	2	01	06	Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	01	08	Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
4	1	2	01	09	Retribusi Penggantian Biaya cetak peta
4	1	2	01	10	Retribusi Pelayanan pendidikan
4	1	2	01	11	Retribusi Pelelangan Ikan
4	1	2	01	12	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai
4	1	2	01	13	Retribusi Balai Benih dan Lahan Percontohan
4	1	2	01	14	Retribusi Pelayanan Pernikinan
4	1	2	01	15	Retribusi Jasa Umum
4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	02	02	Retribusi Pasar Grosir Pertokoan
4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Perdagangan
4	1	2	02	04	Retribusi Terminal
4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan, Pesangrahan/Villa
4	1	2	02	07	Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus
4	1	2	02	08	Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	2	02	09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4	1	2	02	10	Retribusi Rekreasi dan Olah raga
4	1	2	02	11	Retribusi Penyeberangan di air
4	1	2	02	12	Retribusi Pengolahan Limbah cair
4	1	2	02	13	Retribusi Penjualan produksi usaha daerah
4	1	2	02	14	Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
4	1	2	02	15	Retribusi Atas Usaha Penangkapan Ikan Dengan Alat
4	1	2	02	16	Retribusi Sewa Tempat Pameran, Lokasi dan Pertunjukan
4	1	2	02	17	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lalu Lintas Ternak
4	1	2	02	18	Retribusi Hasil Perkebunan
4	1	2	02	19	Retribusi Jasa Usaha
4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	2	03	01	Retribusi Izin mendirikan bangunan
4	1	2	03	02	Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
4	1	2	03	03	Retribusi Izin gangguan keramaian
4	1	2	03	04	Retribusi Izin trayek

4	1	2	03	05	Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan
4	1	2	03	06	Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosahan Beras
4	1	2	03	07	Retribusi Izin Jasa Penyedotan Mobil Tinja
4	1	2	03	08	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
4	1	2	03	09	Retribusi Izin industri dan Perdagangan
4	1	2	03	10	Retribusi Izin Pemutaran dan Jasa Usaha Rental
4	1	2	03	11	Retribusi Izin Ketenagakerjaan
4	1	2	03	12	Retribusi Izin Bangunan
4	1	2	03	13	Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4	1	3	01		Bagian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah
4	1	3	01	01	Perusahaan Daerah Pasar
4	1	3	01	02	Bank Pembangunan Daerah (BPD)
4	1	3	01	03	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
4	1	3	01	04	Bagian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah
4	1	3	01	05	Sumbangan pihak ke III
4	1	3	01	06	Bagian laba dari penguatan modal petani (KIPP)
4	1	3	02		Bagian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN
4	1	3	02	01	BUMN
4	1	3	02	02	Dst
4	1	3	03		Bagian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	3	03	01	Perusahaan
4	1	3	03	02	Dst
4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	01	01	Penjualan/Pelepasan Hak Atas Tanah
4	1	4	01	02	Penjualan Peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai
4	1	4	01	03	Penjualan Mesin alat-alat berat tidak terpakai
4	1	4	01	04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4	1	4	01	05	Penjualan Kendaraan dinas Roda dua
4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan dinas Roda empat
4	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas
4	1	4	01	08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4	1	4	01	09	Penjualan lampu hias bekas
4	1	4	01	10	Penjualan bahan-bahan bekas bangunan
4	1	4	01	11	Penjualan perlengkapan lalu-lintas
4	1	4	01	12	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi
4	1	4	01	13	Penjualan hasil Pertanian

4	1	4	01	14	Penjualan hasil kehutanan
4	1	4	01	15	Penjualan hasil perkebunan
4	1	4	01	16	Penjualan hasil peternakan
4	1	4	01	17	Penjualan hasil perikanan
4	1	4	01	18	Penjualan hasil sitaan
4	1	4	01	19	Penjualan Jalan dan Jembatan
4	1	4	01	20	Penjualan Bangunan Air
4	1	4	01	21	Penjualan Instalasi dan Jaringan
4	1	4	01	22	Penjualan Bangunan Gedung
4	1	4	01	23	Penjualan Monumen
4	1	4	01	24	Penjualan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
4	1	4	01	25	Penjualan Alat-alat Kedokteran, Laboratorium dan Kesehatan
4	1	4	01	26	Penjualan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olah Raga
4	1	4	01	27	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	01	28	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4	1	4	02		Penerimaan jasa Giro
4	1	4	02	01	Jasa giro kas Daerah
4	1	4	02	02	Jasa giro Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran
4	1	4	02	03	Jasa giro dana cadangan
4	1	4	02	04	Penerimaan Jasa Giro
4	1	4	03		Pendapatan Bunga Deposito
4	1	4	03	01	Rekening deposito pada Bank
4	1	4	03	02	Dst
4	1	4	04		Tuntutan ganti kerugian Daerah
4	1	4	04	01	Kerugian Uang
4	1	4	04	02	Kerugian Barang
4	1	4	04	03	Penerimaan Kelebihan Pembayaran
4	1	4	04	04	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
4	1	4	05		Komisi Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4	1	4	05	01	Penerimaan komisi dari penempatan kas daerah
4	1	4	05	02	Penerimaan potongan dari
4	1	4	05	03	Penerimaan Keuntungan selisih nilai tukar rupiah dari
4	1	4	05	04	Dst
4	1	4	06		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	06	01	Bidang pendidikan
4	1	4	06	02	Bidang Kesehatan
4	1	4	06	03	Bidang Pekerjaan Umum
4	1	4	06	04	Bidang Perumahan Rakyat
4	1	4	06	05	Bidang Penataan Ruang
4	1	4	06	06	Bidang Perencanaan Pembangunan
4	1	4	06	07	Bidang Perhubungan
4	1	4	06	08	Bidang Lingkungan Hidup
4	1	4	06	09	Bidang Pertanahan

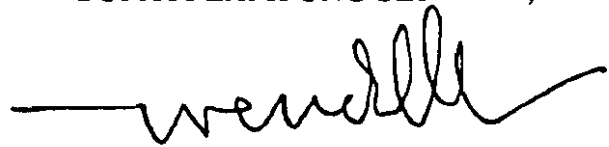
4	1	4	06	10	Dst
4	1	4	07		Pendapatan Denda Pajak
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	4	07	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	4	07	03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	4	07	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	4	07	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	4	07	06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
4	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	4	07	08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4	1	4	07	09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	4	07	10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
4	1	4	07	11	Dst
4	1	4	08		Pendapatan Denda Retribusi
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	4	08	04	Dst
4	1	4	09		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	4	09	01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerja
4	1	4	09	02	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4	1	4	09	03	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4	1	4	09	04	Dst
4	1	4	10		Pendapatan dan Pengembalian
4	1	4	10	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	4	10	02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Biaya Asuransi Kesehatan
4	1	4	10	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	4	10	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	4	10	05	Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka
4	1	4	10	06	Dst
4	1	4	11		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4	1	4	11	01	Fasilitas Sosial
4	1	4	11	02	Fasilitas Umum
4	1	4	11	03	Dst
4	1	4	12		Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4	1	4	12	01	Uang Pendaftaran Ujian Masuk
4	1	4	12	02	Uang Sekolah Pendidikan dan Pelatihan
4	1	4	12	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
4	1	4	12	04	Dst

4	1	4	13		Pendapatan dan Angsuran / Cicilan Penjualan
4	1	4	13	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4	1	4	13	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4	1	4	14		Pendapatan dari Premi Asuransi
4	1	4	14	01	Asuransi
4	1	4	14	02	Denda
4	1	4	14	03	Pendapatan dari Premi Asuransi
4	1	4	15		Pengembalian Pinjaman Penguatan Modal Petani
4	1	4	15	01	Pinjaman Penguatan Modal Petani
4	1	4	15	02	Bunga Pinjaman Penguatan Modal Petani
4	1	4	15	03	Denda Pinjaman Penguatan Modal Petani
4	1	4	15	04	Pengembalian Pinjaman Penguatan Modal Petani
4	1	4	16		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4	1	4	16	01	N C R (Nikah Cerai dan Rujuk)
4	1	4	16	02	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	1			Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak
4	2	1	01	01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4	2	1	01	04	Bagi Hasil Pajak
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusaha Hutan
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rand)
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalti)
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4	2	1	02	11	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam
4	2	2			Dana Alokasi Umum
4	2	2	01		Dana Alokasi Umum
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum
4	2	3			Dana Alokasi Khusus
4	2	3	01		Dana Alokasi Khusus
4	2	3	01	01	Dana Alokasi Khusus

4	2	3	01	02	Dana Alokasi Khusus
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	1			Pendapatan Hibah
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	01	01	Pemerintah
4	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
4	3	1	02	01	Pemerintah Daerah
4	3	1	02	02	Dst
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam Negeri
4	3	1	03	01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
4	3	1	03	02	Dst
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4	3	1	04	01	Kelompok Masyarakat /Perorangan
4	3	1	04	02	Dst
4	3	1	05		Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah dari silateral
4	3	1	05	02	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4	3	1	05	03	Pendapatan Hibah dari Donor
4	3	1	05	04	Dst
4	3	2			Dana Darurat
4	3	2	01		Penanggulangan Korban /Kerusakan akibat Bencana
4	3	2	01	01	Korban kerusakan akibat Bencana alam
4	3	2	01	02	Korban kerusakan akibat Bencana sosial
	3	2	01	03	Penanggulangan Korban /Kerusakan akibat Bencana
4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	01	01	Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan bermotor
4	3	3	01	02	Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan diatas air
4	3	3	01	03	Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan bermotor
4	3	3	01	04	Dana Bagi Hasil dari Bea Balik nama kendaraan diatas air
4	3	3	01	05	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor
4	3	3	01	06	Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
4	3	3	01	07	Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

4	3	3	01	08	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	02		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	02	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	02	02	Dst
4	3	3	03		Dana Hasil Pajak dari Kabupaten
4	3	3	03	01	Dana Hasil Pajak dari Kabupaten
4	3	3	03	02	Dst
4	3	3	04		Dana Hasil Pajak dari Kota
4	3	3	04	01	Dana Hasil Pajak dari Kota
4	3	3	04	02	Dst
4	3	4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4	3	4	01		Dana Penyesuaian
4	3	4	01	01	Dana Penyesuaian
4	3	4	01	02	Dst
4	3	4	02		Dana Otonomi Khusus
4	3	4	02	01	Dana Otonomi Khusus
4	3	4	02	02	Dst
4	3	5			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
4	3	5	01		Bantuan Keuangan dari Provinsi
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4	3	5	01	02	Dst
4	3	5	02		Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4	3	5	02	01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4	3	5	02	02	Dst
4	3	5	03		Bantuan Keuangan dari Kota
4	3	5	03	01	Bantuan Keuangan dari Kota
4	3	5	03	02	Dst

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



WENDY MELFA

KODE REKENING BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening					Uraian
5					BELANJA DAERAH
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG
5	1	1			BELANJA PEGAWAI
5	1	1	01		Gaji dan tunjangan
5	1	1	01	01	Gaji pokok PNS/Uang represntasi
5	1	1	01	02	Tunjangan keluarga
5	1	1	01	03	Tunjangan jabatan
5	1	1	01	04	Tunjangan fungsional
5	1	1	01	05	Tunjangan fungsional umum
5	1	1	01	06	Tunjangan beras
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus
5	1	1	01	08	Pembulatan gaji
5	1	1	01	09	Iuran asuransi kesehatan
5	1	1	01	10	Uang paket
5	1	1	01	11	Tunjangan panitia musyawarah
5	1	1	01	12	Tunjangan komisi
5	1	1	01	13	Tunjangan panitia anggaran
5	1	1	01	14	Tunjangan badan kehormatan
5	1	1	01	15	Tunjangan alat kelengkapan
5	1	1	01	16	Tunjangan perumahan
5	1	1	01	17	Uang duka/wafat
5	1	1	01	18	Uang jasa pengabdian
5	1	1	01	19	Tunjangan Perbaikan Penghasilan
5	1	1	01	20	Akres
5	1	1	01	21	Tunjangan Kesejahteraan
5	1	1	01	22	Tunjangan Kesehatan
5	1	1	01	23	Tunjangan Dana Pensiun
5	1	1	01	24	Tunjangan Uang Makan Pegawai
5	1	1	01	25	Tunjangan Transport Pegawai
5	1	1	01	26	Tunjangan Hari Raya
5	1	1	01	27	Tunjangan Pendidikan Anak
5	1	1	01	28	Tunjangan Cuti Pegawai
5	1	1	01	29	Tunjangan Khusus Pegawai Daerah/PNS
5	1	1	01	30	Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah/PNS
5	1	1	01	31	Tunjangan lain-lain pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

5	1	1	02		Tambahan penghasilan PNS
5	1	1	02	01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
5	1	1	02	02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5	1	1	02	03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5	1	1	02	04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi
5	1	1	02	05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5	1	1	03		Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	03	01	Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD
5	1	1	03	02	Belanja penunjang komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD
5	1	1	03	03	Belanja penunjang KDH /WKDH
5	1	1	03	04	Belanja operasional KDH/WKDH
5	1	1	03	05	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	04		Belanja Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	04	01	Belanja pemungutan PBB
5	1	1	04	02	Belanja pemungutan Pajak Daerah
5	1	2			BELANJA BUNGA
5	1	2	01		Bunga utang pinjaman
5	1	2	01	01	Bunga utang pinjaman kepada pemerintah
5	1	2	01	02	Bunga utang pinjaman kepada daerah
5	1	2	01	03	Bunga utang pinjaman kepada keuangan Bank
5	1	2	01	04	Bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank
5	1	2	02		Bunga utang obligasi
5	1	2	02	01	Bunga utang obligasi
	1	2	03		Bunga utang
	1	2	03	01	Bunga utang
5	1	3			BELANJA SUBSIDI
5	1	3	01		Belanja subsidi kepada pemerintah perusahaan /lembaga
5	1	3	01	01	Belanja subsidi kepada perusahaan
5	1	3	01	02	Belanja subsidi kepada lembaga
5	1	3	01	03	Belanja subsidi
5	1	4			BELANJA HIBAH
5	1	4	01		Belanja hibah kepada pemerintah pusat
5	1	4	01	01	Pemerintah pusat
5	1	4	01	02	Instansi Vertikal
5	1	4	02		Belanja hibah kepada pemerintah daerah
5	1	4	02	01	Pemerintah daerah

5	1	4	02	02	dst.....
5	1	4	03		Belanja hibah kepada pemerintah desa
5	1	4	03	01	Pemerintah desa
5	1	4	03	02	dst.....
5	1	4	04		Belanja hibah kepada perusahaan daerah /BUMD/BUMN
5	1	4	04	01	Perusahaan daerah BUMD/BUMN
5	1	4	04	02	dst.....
5	1	4	05		Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5	1	4	05	01	Badan/lembaga/organisasi/swasta
5	1	4	05	02	dst.....
5	1	4	06		Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan
5	1	4	06	01	kelompok masyarakat/perorangan
5	1	4	06	02	dst.....
5	1	5			BELANJA BANTUAN SOSIAL
5	1	5	01		Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan
5	1	5	01	01	Panti Asuhan
5	1	5	01	02	Panti Jompo
5	1	5	01	03	Yayasan Sosial
5	1	5	01	04	PKK
5	1	5	01	05	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
5	1	5	01	06	Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	02		Belanja bantuan partai politik
5	1	5	02	01	Belanja bantuan partai politik
5	1	5	03		BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI MASY. DLM. PEMBANGUNAN
5	1	5	03	01	Kiset/Penelitian Pembangunan
5	1	5	03	02	Pameran Pembangunan
5	1	5	03	03	Kegiatan Kemasyarakatan yang Menunjang Pembangunan
5	1	5	03	04	Kegiatan Kemasyarakatan
5	1	5	04		BELANJA BANTUAN SOSIAL INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA
5	1	5	04	01	Air Bersih
5	1	5	04	02	Jalan dan Jembatan
5	1	5	04	03	Tempat Ibadah
5	1	5	04	04	Tempat Tinggal
5	1	5	04	05	Penerangan Jalan Umum
5	1	5	04	06	Infrastruktur/Sarana Prasarana
5	1	5	05		BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDIDIKAN

5	1	5	05	01	MI/SD dan Sekolah Sederajat
5	1	5	05	02	MTs/SMP dan Sekolah Sederajat
5	1	5	05	03	MA/SMA dan Sekolah Sederajat
5	1	5	05	04	Pendidikan
5	1	5	06		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT LANGSUNG
5	1	5	06	01	Petani, Peternak dan Nelayan
5	1	5	06	02	Kelompok Usaha Kecil/Menengah
5	1	5	06	03	Masyarakat Ekonomi Lemah/Miskin (Raskin)
5	1	5	06	04	Organisasi Keagamaan
5	1	5	06	05	Masyarakat
5	1	5	07		BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA BERGULIR
5	1	5	07	01	Belanja Bergulir untuk Keperluan Pertanian
5	1	5	07	02	Belanja Bergulir untuk Keperluan Perkebunan
5	1	5	07	03	Belanja Bergulir untuk Keperluan Kehutanan
5	1	5	07	04	Belanja Bergulir untuk Keperluan Perikanan dan Peternakan
5	1	5	07	05	Belanja Bergulir untuk Masyarakat Ekonomi Lemah
5	1	5	07	06	Belanja Bergulir untuk Kelompok Usaha Kecil/Menengah
5	1	5	07	07	Dana Bergulir
5	1	5	08		BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI PROFESI
5	1	5	08	01	Ikatan Bidan Indonesia
5	1	5	08	02	Ikatan Dokter Indonesia
5	1	5	08	03	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
5	1	5	08	04	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
5	1	5	08	05	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
5	1	5	08	06	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
5	1	5	08	07	Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKADA)
5	1	5	08	08	Organisasi Profesi
5	1	5	09		BELANJA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
5	1	5	09	01	Belanja Komisi Pemilihan Umum
5	1	5	09	02	Belanja Panitia Pengawas Pemilihan Umum
5	1	6			BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROPINSI /KABUPATEN /KOTA DAN PEMERINTAH DESA
5	1	6	01		Belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi
5	1	6	01	01	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi
5	1	6	02		Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota
5	1	6	02	01	Belanja daerah kepada kabupaten/kota
5	1	6	02	02	Cadangan

5	1	6	03		Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
5	1	6	03	01	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
5	1	6	04		Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota
5	1	6	04	01	Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota
5	1	6	05		Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa
5	1	6	05	01	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
5	1	7			BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVISINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
5	1	7	01		Belanja bantuan keuangan kepada provinsi
5	1	7	01	01	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi
5	1	7	02		Belanja keuangan kepada kabupaten/kota
5	1	7	02	01	Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
5	1	7	02	02	Penunjang Ketentraman Kerawanan Sosial
5	1	7	02	03	Penunjang Ketentraman, Keteriban dan Keamanan
5	1	7	02	04	
5	1	7	03		Belanja keuangan kepada pemerintah desa
5	1	7	03	01	Belanja keuangan kepada pemerintah desa
5	1	7	04		Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa
5	1	7	04	01	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi
5	1	7	04	02	Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota
5	1	7	04	03	Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa
5	1	7	04	04	Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kecamatan
5	1	7	05		BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN KECAMATAN
5	1	7	05	01	Belanja keuangan kepada pemerintah kecamatan
5	1	8			BELANJA TIDAK TERDUGA
5	1	8	01		Belanja Tidak terduga
5	1	8	01	01	Belanja Tidak terduga
5	1	8	01	02	Tidak tersangka untuk Korban Bencana Alam dan Sosial
5	1	8	01	03	Tidak tersangka untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial
5	1	8	01	04	Tidak tersangka untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia
5	1	8	01	05	Cadangan
5	1	8	01	06	Cadangan
5	2				BELANJA LANGSUNG

5	2	1			BELANJA PEGAWAI
5	2	1	01		Honorarium PNS
5	2	1	01	01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan
5	2	1	01	02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
5	2	1	01	03	Honorarium Tim/Panitia
5	2	1	01	04	Honorarium/Upah Peserta
5	2	1	01	05	Honorarium/Upah Non Tim/Panitia
5	2	1	01	06	Honorarium Peserta
5	2	1	01	07	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
5	2	1	02		Honorarium non PNS
5	2	1	02	01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
5	2	1	02	02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
5	2	1	02	03	Honorarium Peserta
5	2	1	03		Uang lembur
5	2	1	03	01	Uang lembur PNS
5	2	1	03	02	Uang lembur non PNS
5	2	1	03	03	Uang Lembur Tim/Panitia
5	2	1	03	04	Uang Lembur Non Tim/Panitia
5	2	1	03	05	Lembur
5	2	1	04		Belanja beasiswa pendidikan PNS
5	2	1	04	01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5	2	1	04	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5	2	1	04	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5	2	1	04	04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5	2	1	05		Belanja-kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5	2	1	05	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5	2	1	05	02	Belanja sosialisasi
5	2	1	05	03	Belanja bimbingan teknis
5	2	1	05	04	Belanja kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS I
5	2	1	06		Insentif, Upah Pungut, dan Tunjangan
5	2	1	06	01	Insentif Untuk Tim/Panitia
5	2	1	06	02	Insentif Untuk Non Tim/Panitia
5	2	1	06	03	Belanja pemungutan PBB
5	2	1	06	04	Belanja pemungutan pajak daerah
5	2	1	06	05	Tunjangan Bendaharawan Umum Daerah (BUD)
5	2	1	06	06	Tunjangan Bendahara dan Pembantu Bendahara
5	2	1	06	07	Tunjangan Operasional Pengelola Pendapatan
5	2	1	06	08	Tunjangan Operasional Pejabat
5	2	1	06	09	Insentif Pemungutan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5	2	1	06	10	Insentif
5	2	1	07		Belanja Perawatan dan Pengobatan
5	2	1	07	01	Belanja Dokter Umum

5	2	1	07	02	Belanja Dokter Spesialis
5	2	1	07	03	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lanjut Dalam Daerah
5	2	1	07	04	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lanjut Luar Dalam Daerah/Negeri
5	2	1	07	05	Belanja General Chek Up
5	2	1	07	06	Belanja Perawatan DPRD (Asuransi)
5	2	1	07	07	Belanja Perawatan dan Pengobatan
5	2	1	08		Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	2	1	08	01	Belanja Penelitian dan Studi
5	2	1	08	02	Belanja Penyerangan Calon Siswa STPDN, IIP, S1, S2, S3
5	2	1	08	03	Belanja Pendidikan Penjenjangan Struktural
5	2	1	08	04	Belanja Pendidikan Fungsional
5	2	1	08	05	Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA
5	2	2	01		Belanja bahan pakai habis
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor
5	2	2	01	02	Belanja dokumen /administrasi tender
5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik
5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos
5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5	2	2	01	06	Belanja bahan bakar minyak gas
5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas
5	2	2	01	09	Belanja Bahan yang Berkaitan dengan Komputer
5	2	2	01	10	Belanja Obat-obatan
5	2	2	01	11	Belanja Bahan Keperluan Laboratorium
5	2	2	01	12	Belanja Bahan Radiologi
5	2	2	01	13	Belanja Bahan EKG
5	2	2	01	14	Belanja Bahan USG
5	2	2	01	15	Belanja Bahan Fisioterapi
5	2	2	01	16	Belanja Bahan Alat Olah Raga
5	2	2	01	17	Belanja Spanduk
5	2	2	01	18	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5	2	2	01	19	Belanja Alat Kontrasepsi
5	2	2	02		Belanja bahan /material
5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan
5	2	2	02	02	Belanja bahan bibit tanaman
5	2	2	02	03	Belanja bibit ternak
5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan
5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia
5	2	2	02	06	Belanja Bahan Untuk Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
5	2	2	02	07	Belanja Bahan Untuk Peternakan dan Perikanan
5	2	2	02	08	Belanja Bahan Percontohan dan Alat Peraga

5	2	2	02	09	Belanja Bahan/Material
5	2	2	03		Belanja jasa kantor
5	2	2	03	01	Belanja telepon
5	2	2	03	02	Belanja air
5	2	2	03	03	Belanja listrik
5	2	2	03	04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah
5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet
5	2	2	03	07	Belanja paket pengiriman
5	2	2	03	08	Belanja sertifikasi
5	2	2	03	09	Belanja jasa transaksi keuangan
5	2	2	03	10	Belanja jasa administrasi pengumuman pajak penerangan jalan umum
5	2	2	03	11	Belanja jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
5	2	2	03	12	Belanja TV Kabel, Internet dan Multimedia
5	2	2	03	13	Belanja Pembayaran Pajak
5	2	2	03	14	Belanja Pengurusan Kendaraan Bermotor (SIM, STNK dll)
5	2	2	03	15	Belanja Asuransi
5	2	2	03	16	Belanja Lampu Jalan
5	2	2	03	17	Belanja Jasa Kantor
5	2	2	03	18	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik
5	2	2	04		Belanja premi asuransi
5	2	2	04	01	Belanja premi kesehatan
5	2	2	04	02	Belanja premi asuransi barang milik daerah
5	2	2	04	03	dst.....
5	2	2	05		Belanja perawatan kendaraan bermotor
5	2	2	05	01	Belanja jasa service
5	2	2	05	02	Belanja penggantian suku cadang
5	2	2	05	03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
5	2	2	05	04	Belanja jasa KIR
5	2	2	05	05	Belanja STNK
5	2	2	05	06	Belanja perpanjangan SIM
5	2	2	05	07	Belanja perawatan kendaraan bermotor
5	2	2	06		Belanja cetak dan penggandaan
5	2	2	06	01	Belanja cetak
5	2	2	06	02	Belanja penggandaan
5	2	2	06	03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping
5	2	2	06	04	Belanja Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor
5	2	2	07		Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir
5	2	2	07	01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung /kantor/tempat
5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5	2	2	07	04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas

5	2	2	07	05	Belanja sewa tanah
5	2	2	07	06	Belanja sewa tempat
5	2	2	08		Belanja sewa sarana mobilitas
5	2	2	08	01	Belanja sewa sarana mobilitas darat
5	2	2	08	02	Belanja sewa sarana mobilitas air
5	2	2	08	03	Belanja sewa sarana mobilitas udara
5	2	2	08	04	Belanja sewa sarana mobilitas
5	2	2	09		Belanja sewa alat berat
5	2	2	09	01	Belanja sewa eskavator
5	2	2	09	02	Belanja sewa bulldoser
5	2	2	09	03	Belanja sewa alat berat
5	2	2	10		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi
5	2	2	10	02	Belanja sewa komputer dan printer
5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor
5	2	2	10	04	Belanja sewa generator
5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda
5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5	2	2	10	07	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
5	2	2	11		Belanja makanan dan minuman
5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat
5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu
5	2	2	11	04	Belanja Makan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
5	2	2	11	05	Belanja Makan dan Minuman
5	2	2	12		Belanja pakaian dinas dan atributnya
5	2	2	12	01	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH
5	2	2	12	02	Belanja pakaian sipil harian
5	2	2	12	03	Belanja pakaian sipil lengkap
5	2	2	12	04	Belanja pakaian dinas harian
5	2	2	12	05	Belanja pakaian dinas upacara
5	2	2	12	06	Belanja Pakaian Olah Raga
5	2	2	12	07	Belanja Pakaian Hansip
5	2	2	12	08	Belanja Pakaian Polisi Pamong Praja
5	2	2	12	09	Belanja Pakaian Khas Daerah
5	2	2	12	10	Belanja Pakaian Dinas Batik
5	2	2	12	11	Belanja Pakaian Dinas
				12	Belanja Pakaian Sipil Kerani
5	2	2	13		Belanja pakaian kerja
5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan
5	2	2	13	02	Belanja Pakaian Kerja Pesuruh/Cleaning Service
5	2	2	13	03	Belanja Pakaian Kerja Sopir
5	2	2	13	04	Belanja Pakaian Kerja Montir

5	2	2	13	05	Belanja Pakaian Kerja Satpam
5	2	2	13	06	Belanja Pakaian Kerja Petugas Pemadam Kebakaran
5	2	2	13	07	Belanja Pakaian Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan
5	2	2	13	08	Belanja Pakaian Kerja Tukang Kebun
5	2	2	13	09	Belanja Pakaian Kerja Petugas Salar dan Kebersihan
5	2	2	13	10	Belanja Pakaian Kerja Petugas Parkir dan TPR
5	2	2	13	11	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5	2	2	14		Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5	2	2	14	01	Belanja pakaian KOPRI
5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah
5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional
5	2	2	14	04	Belanja pakaian olah raga
5	2	2	14	05	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5	2	2	15		Belanja perjalanan dinas
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5	2	2	16		Belanja perjalanan pindah tugas
5	2	2	16	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5	2	2	16	02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5	2	2	17		Belanja pemulangan pegawai
5	2	2	17	01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5	2	2	17	02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5	2	2	17	03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5	2	2	17	04	Belanja Pemulangan Pegawai
5	2	2	18		Belanja Sewa
5	2	2	18	01	Belanja Sewa Alat-alat Bengkel
5	2	2	18	02	Belanja Sewa Alat-alat Studio dan Komunikasi
5	2	2	18	03	Belanja Sewa Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan Laboratorium
5	2	2	18	04	Belanja Sewa Barang/Alat Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olah Raga
5	2	2	18	05	Belanja Sewa Alat-alat Persenjataan
5	2	2	18	06	Belanja Sewa Hewan dan Tanaman
5	2	2	18	07	Belanja Sewa
5	2	2	19		Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan
5	2	2	19	01	Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan Tim/Panitia
5	2	2	19	02	Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan Peserta
5	2	2	19	03	Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan Non Tim/Panitia
5	2	2	19	04	Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan
5	2	2	20		Belanja Jasa Pihak Ketiga-Pendukung Kegiatan
5	2	2	20	01	Belanja Jasa Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi
5	2	2	20	02	Belanja Jasa Dokumentasi

5	2	2	20	03	Belanja Jasa Dekorasi
5	2	2	20	04	Belanja Jasa Administrasi dan Akuntansi
5	2	2	20	05	Belanja Jasa Kebersihan
5	2	2	20	06	Belanja Jasa Keamanan
5	2	2	20	07	Belanja Jasa Reklame/Iklan
5	2	2	20	08	Belanja Jasa Perencanaan Kegiatan
5	2	2	20	09	Belanja Jasa Pihak Ketiga - Pendukung Kegiatan
5	2	2	21		Belanja Jasa Pihak Ketiga-Pelaksana Kegiatan
5	2	2	21	01	Belanja Jasa Perancangan Kegiatan
5	2	2	21	02	Belanja Jasa Bantuan Hukum
5	2	2	21	03	Belanja Jasa Penyusunan Sistem Informasi
5	2	2	21	04	Belanja Jasa Pelatihan dan Kursus Keterampilan
5	2	2	21	05	Belanja Jasa Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)
5	2	2	21	06	Belanja Jasa Audit
5	2	2	21	07	Belanja Jasa Konsultasi (Laporan secara umum, pemberian saran-saran perbaikan utk pelaksanaan keg.)
5	2	2	21	08	Belanja Jasa Manajemen
5	2	2	21	09	Belanja Jasa Pengawasan dan Monitoring (mis; Pengawasan konstruksi, pengawasan pek. lap. bukan audit)
5	2	2	21	10	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
5	2	2	21	11	Belanja Jasa Pembuatan SKT dan Sertifikat Tanah
5	2	2	21	12	Belanja Jasa Pekerja / Buruh
5	2	2	21	13	Belanja Jasa Pihak Ketiga-Pelaksana Kegiatan
5	2	2	22		Belanja Jasa Keperluan Kegiatan
5	2	2	22	01	Belanja Listrik
5	2	2	22	02	Belanja Telepon
5	2	2	22	03	Belanja Air
5	2	2	22	04	Belanja Surat Kabar/Majalah/Bulatin dan Semacamnya
5	2	2	22	05	Belanja Kawat/Faksimili
5	2	2	22	06	Belanja Paket/Pengiriman
5	2	2	22	07	Belanja TV Kabel, Internet dan Multimedia
5	2	2	22	08	Belanja Pembayaran Pajak
5	2	2	22	09	Belanja Pengurusan Kendaraan Bermotor (SIM, STNK, dll)
5	2	2	22	10	Belanja Asuransi
5	2	2	22	11	Belanja Jasa Keperluan Kegiatan
5	2	2	22	12	Belanja Jasa Keperluan Ujian Sekolah
5	2	2	23		Belanja pemeliharaan alat-alat berat
5	2	2	23	01	Belanja pemeliharaan Traktor
5	2	2	23	02	Belanja pemeliharaan bulldozer
5	2	2	23	03	Belanja pemeliharaan stone wols
5	2	2	23	04	Belanja pemeliharaan eskavator
5	2	2	23	05	Belanja pemeliharaan dump truk
5	2	2	23	06	Belanja pemeliharaan crane
5	2	2	23	07	Belanja pemeliharaan kendaraan penyapu jalan
5	2	2	23	08	Belanja pemeliharaan mesin pengolah semen

→ 8ar

5	2	2	23	09	Belanja pemeliharaan mesin pengolah air bersih
5	2	2	23	10	Belanja pemeliharaan alat-alat berat
5	2	2	24		Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor
5	2	2	24	01	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5	2	2	24	02	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5	2	2	24	03	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5	2	2	24	04	Belanja pemeliharaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5	2	2	24	05	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5	2	2	24	06	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor truk
5	2	2	24	07	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki
5	2	2	24	08	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5	2	2	24	09	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5	2	2	24	10	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance
5	2	2	24	11	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5	2	2	24	12	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5	2	2	24	13	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5	2	2	24	14	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5	2	2	24	15	Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	2	24	16	Belanja pemeliharaan Wales dan sejenisnya
5	2	2	24	17	Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	2	25	✓	Belanja pemeliharaan alat angkutan darat tidak bermotor
5	2	2	25	01	Belanja pemeliharaan gerbak
5	2	2	25	02	Belanja pemeliharaan pedati/delman/dokar/bendi
5	2	2	25	03	Belanja pemeliharaan becak
5	2	2	25	04	Belanja pemeliharaan sepeda
5	2	2	25	05	Belanja pemeliharaan karavan
5	2	2	25	06	Belanja pemeliharaan alat angkutan darat tidak bermotor
5	2	2	26		Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air bermotor
5	2	2	26	01	Belanja pemeliharaan kapal motor
5	2	2	26	02	Belanja pemeliharaan kapal feri
5	2	2	26	03	Belanja pemeliharaan speed boot
5	2	2	26	04	Belanja pemeliharaan motor boot/motor tempel
5	2	2	26	05	Belanja pemeliharaan hidro foll
5	2	2	26	06	Belanja pemeliharaan jet foll
5	2	2	26	07	Belanja pemeliharaan kapal tog boat
5	2	2	26	08	Belanja pemeliharaan kapal tanker
5	2	2	26	09	Belanja pemeliharaan kapal kargo
5	2	2	26	10	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air bermotor
5	2	2	27		Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor
5	2	2	27	01	Belanja pemeliharaan perahu layar

					Belanja pemeliharaan papan tulis elektronik
5	2	2	31	10	Belanja pemeliharaan visual elektronik
5	2	2	31	11	Belanja pemeliharaan tabung pemadam kebakaran
5	2	2	31	12	Belanja pemeliharaan Alat Reproduksi/Penggandaan
5	2	2	31	13	Belanja pemeliharaan Alat Penyimpanan Beranalog

5	2	2	31	16	Belanja pemeliharaan Alat Tulis Menulis
5	2	2	31	17	Belanja pemeliharaan Makan dan Minum
5	2	2	31	18	Belanja pemeliharaan Alat Pembersih
5	2	2	31	19	Belanja pemeliharaan Alat Persentasi dan Dokumentasi
5	2	2	31	20	Belanja pemeliharaan Televisi dan Peralatan Elektronik Sejenis
5	2	2	31	21	Belanja pemeliharaan Perkakas Kantor
5	2	2	31	22	Belanja pemeliharaan Alat Perkemahan
5	2	2	31	23	Belanja pemeliharaan Alat Menjahit
5	2	2	31	24	Belanja pemeliharaan Alat Kantor
5	2	2	32		Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
5	2	2	32	01	Belanja pemeliharaan meja gambar
5	2	2	32	02	Belanja pemeliharaan almari
5	2	2	32	03	Belanja pemeliharaan brankas
5	2	2	32	04	Belanja pemeliharaan filling kabinet
5	2	2	32	05	Belanja pemeliharaan white board
5	2	2	32	06	Belanja pemeliharaan penunjuk waktu
5	2	2	32	07	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
5	2	2	33		Belanja pemeliharaan komputer
5	2	2	33	01	Belanja pemeliharaan komputer mainframe/server
5	2	2	33	02	Belanja pemeliharaan komputer/PC
5	2	2	33	03	Belanja pemeliharaan komputer notebook
5	2	2	33	04	Belanja pemeliharaan printer
5	2	2	33	05	Belanja pemeliharaan scanner
5	2	2	33	06	Belanja pemeliharaan monitor display
5	2	2	33	07	Belanja pemeliharaan CPU
5	2	2	33	08	Belanja pemeliharaan UPS
5	2	2	33	09	Belanja pemeliharaan kelengkapan komputer
5	2	2	33	10	Belanja pemeliharaan peralatan jaringan komputer
5	2	2	33	11	Belanja pemeliharaan komputer
5	2	2	34		Belanja pemeliharaan meubelair
5	2	2	34	01	Belanja pemeliharaan meja kerja
5	2	2	34	02	Belanja pemeliharaan meja rapat
5	2	2	34	03	Belanja pemeliharaan meja makan
5	2	2	34	04	Belanja pemeliharaan kursi kerja
5	2	2	34	05	Belanja pemeliharaan kursi rapat
5	2	2	34	06	Belanja pemeliharaan kursi makan
5	2	2	34	07	Belanja pemeliharaan tempat tidur
5	2	2	34	08	Belanja pemeliharaan sofa
5	2	2	34	09	Belanja pemeliharaan rak buku/kembang
5	2	2	34	10	Belanja pemeliharaan meubelair
5	2	2	35		Belanja pemeliharaan peralatan alat dapur
5	2	2	35	01	Belanja pemeliharaan tabung gas
5	2	2	35	02	Belanja pemeliharaan kompor gas
5	2	2	35	03	Belanja pemeliharaan lemari makan

5	2	2	35	04	Belanja pemeliharaan dispenser
5	2	2	35	05	Belanja pemeliharaan kulkas
5	2	2	35	06	Belanja pemeliharaan rak piring
5	2	2	35	07	Belanja pemeliharaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok
5	2	2	35	08	Belanja pemeliharaan peralatan alat dapur
5	2	2	36		Belanja pemeliharaan penghias ruangan rumah tangga
5	2	2	36	01	Belanja pemeliharaan lampu hias
5	2	2	36	02	Belanja pemeliharaan jam dinding/meja
5	2	2	36	03	Belanja pemeliharaan penghias ruangan rumah tangga
5	2	2	37		Belanja pemeliharaan alat-alat studio
5	2	2	37	01	Belanja pemeliharaan kamera
5	2	2	37	02	Belanja pemeliharaan handycam
5	2	2	37	03	Belanja pemeliharaan proyektor
5	2	2	37	04	Belanja pemeliharaan Peralatan Studio Visual
5	2	2	37	05	Belanja pemeliharaan Peralatan Studio Video dan Film
5	2	2	37	06	Belanja pemeliharaan Peralatan Cetak dan Dokumentasi
5	2	2	37	07	Belanja pemeliharaan Alat-alat Studio
5	2	2	38		Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi
5	2	2	38	01	Belanja pemeliharaan telepon
5	2	2	38	02	Belanja pemeliharaan faksimili
5	2	2	38	03	Belanja pemeliharaan radio ssh
5	2	2	38	04	Belanja pemeliharaan radio hf
5	2	2	38	05	Belanja pemeliharaan radio VHF
5	2	2	38	06	Belanja pemeliharaan radio UHV
5	2	2	38	07	Belanja pemeliharaan alat sandi
5	2	2	38	08	Belanja pemeliharaan Peralatan Komunikasi Sosial
5	2	2	38	09	Belanja pemeliharaan Peralatan Pemancar
5	2	2	38	10	Belanja pemeliharaan Peralatan Translator
5	2	2	38	11	Belanja pemeliharaan Peralatan Antena
5	2	2	38	12	Belanja pemeliharaan Peralatan Penginderaan Jarak Jauh
5	2	2	38	13	Belanja pemeliharaan Alat Komunikasi
5	2	2	39		Belanja pemeliharaan alat-alat ukur
5	2	2	39	01	Belanja pemeliharaan timbangan
5	2	2	39	02	Belanja pemeliharaan teodolite
5	2	2	39	03	Belanja pemeliharaan alat uji emisi
5	2	2	39	04	Belanja pemeliharaan alat GPS
5	2	2	39	05	Belanja pemeliharaan Kompas, peralatan navigasi
5	2	2	39	06	Belanja pemeliharaan ukur
5	2	2	39	07	Belanja pemeliharaan barometer
5	2	2	39	08	Belanja pemeliharaan seismograf
5	2	2	39	09	Belanja pemeliharaan Alat Ukur Universal
5	2	2	39	10	Belanja pemeliharaan Alat Ukur/Test Intelegensia, Kepribadian, Kejiwaan dan Test Sejenis
5	2	2	39	11	Belanja pemeliharaan Alat Kalibrasi

5	2	2	39	12	Belanja pemeliharaan Oscilloscope
5	2	2	39	13	Belanja pemeliharaan Takaran
5	2	2	39	14	Belanja pemeliharaan Gelas Takar
5	2	2	39	15	Belanja pemeliharaan Alat Ukur
5	2	2	40		Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
5	2	2	40	01	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran umum
5	2	2	40	02	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi
5	2	2	40	03	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran THT
5	2	2	40	04	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran mata
5	2	2	40	05	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran bedah
5	2	2	40	06	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran anak
5	2	2	40	07	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5	2	2	40	08	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5	2	2	40	09	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran kardiologi
5	2	2	40	10	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran neurologi
5	2	2	40	11	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran ortopedi
5	2	2	40	12	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran hewan
5	2	2	40	13	Belanja pemeliharaan alat-alat farmasi
5	2	2	40	14	Belanja pemeliharaan alat-alat penyakit dalam
5	2	2	40	15	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
5	2	2	41		Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium
5	2	2	41	01	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium biologi
5	2	2	41	02	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5	2	2	41	03	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium kimia
5	2	2	41	04	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium pertanian
5	2	2	41	05	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium peternakan
5	2	2	41	06	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium perkebunan
5	2	2	41	07	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium perikanan
5	2	2	41	08	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium bahasa
5	2	2	41	09	Belanja pemeliharaan alat-alat peraga /praktik sekolah
5	2	2	41	10	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium
5	2	2	42		Belanja pemeliharaan konstruksi jalan
5	2	2	42	01	Belanja pemeliharaan konstruksi jalan
5	2	2	42	02	Belanja pemeliharaan konstruksi jalan fly over
5	2	2	42	03	Belanja pemeliharaan konstruksi jalan under pass
5	2	2	42	04	Belanja pemeliharaan Jalan Tempat Kerja
5	2	2	42	05	Belanja pemeliharaan Jalan Tempat Tinggal
5	2	2	42	06	Belanja pemeliharaan Jalan
5	2	2	43		Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan
5	2	2	43	01	Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan gantung
5	2	2	43	02	Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan ponton
5	2	2	43	03	Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5	2	2	43	04	Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5	2	2	43	05	Belanja pemeliharaan Jembatan Tempat Kerja

5	2	2	43	06	Belanja pemeliharaan Jembatan Tempat Tinggal
5	2	2	43	07	Belanja pemeliharaan Jembatan
5	2	2	44		Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5	2	2	44	01	Belanja pemeliharaan konstruksi bendungan
5	2	2	44	02	Belanja pemeliharaan konstruksi waduk
5	2	2	44	03	Belanja pemeliharaan konstruksi kanal permukaan
5	2	2	44	04	Belanja pemeliharaan konstruksi kanal bawah tanah
5	2	2	44	05	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi
5	2	2	44	06	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air bersih/minum
5	2	2	44	07	Belanja pemeliharaan konstruksi resovir
5	2	2	44	08	Belanja pemeliharaan konstruksi pintu air
5	2	2	44	09	Belanja pemeliharaan Jaringan Air Minum/Bersih
5	2	2	44	10	Belanja pemeliharaan Jaringan Air Limbah/Kotor, Pengolahan dan Pembuangan Sampah
5	2	2	44	11	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5	2	2	45		Belanja pemeliharaan penerangan jalan, taman, dan hutan kota
5	2	2	45	01	Belanja pemeliharaan lampu hias jalan
5	2	2	45	02	Belanja pemeliharaan hias taman
5	2	2	45	03	Belanja pemeliharaan penerangan hutan kota
5	2	2	45	04	Belanja pemeliharaan penerangan jalan, taman, dan hutan kota
5	2	2	46		Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
5	2	2	46	01	Belanja pemeliharaan instalasi listrik
5	2	2	46	02	Belanja pemeliharaan instalasi telepon
5	2	2	46	03	Belanja pemeliharaan instalasi gas
5	2	2	46	04	Belanja pemeliharaan instalasi Pengaman Petir
5	2	2	46	05	Belanja pemeliharaan instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	2	46	06	Belanja pemeliharaan instalasi
5	2	2	46	07	Belanja pemeliharaan instalasi
5	2	2	47		Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan
5	2	2	47	01	Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5	2	2	47	02	Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5	2	2	47	03	Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5	2	2	47	04	Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5	2	2	47	05	Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5	2	2	47	06	Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan bermonumen
5	2	2	47	07	Belanja pemeliharaan konstruksi tugu peringatan
5	2	2	47	08	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	2	47	09	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	2	47	10	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Instalasi
5	2	2	47	11	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Bengkel
5	2	2	47	12	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Pos Jaga
5	2	2	47	13	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Garasi
5	2	2	47	14	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Pengujian Kendaraan
5	2	2	47	15	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat

5	2	2	47	16	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Tahanan
5	2	2	47	17	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	2	47	18	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	2	47	19	Belanja pemeliharaan Tugu Kantor
5	2	2	47	20	Belanja pemeliharaan Tugu Selamat Datang
5	2	2	47	21	Belanja pemeliharaan Tugu Patok
5	2	2	47	22	Belanja pemeliharaan Tugu
5	2	2	47	23	Belanja pemeliharaan Menara Komunikasi
5	2	2	47	24	Belanja pemeliharaan Menara Air
5	2	2	47	25	Belanja pemeliharaan Menara
5	2	2	48		Belanja pemeliharaan buku /kepuustakaan
5	2	2	48	01	Belanja pemeliharaan buku matematika
5	2	2	48	02	Belanja pemeliharaan buku fisika
5	2	2	48	03	Belanja pemeliharaan buku kimia
5	2	2	48	04	Belanja pemeliharaan buku biologi
5	2	2	48	05	Belanja pemeliharaan buku biografi
5	2	2	48	06	Belanja pemeliharaan buku geografi
5	2	2	48	07	Belanja pemeliharaan buku astronomi
5	2	2	48	08	Belanja pemeliharaan buku arkeologi
5	2	2	48	09	Belanja pemeliharaan buku bahasa dan sastra
5	2	2	48	10	Belanja pemeliharaan buku keagamaan
5	2	2	48	11	Belanja pemeliharaan buku sejarah
5	2	2	48	12	Belanja pemeliharaan buku seni dan budaya
5	2	2	48	13	Belanja pemeliharaan buku ilmu pengetahuan umum
5	2	2	48	14	Belanja pemeliharaan buku ilmu pengetahuan sosial
5	2	2	48	15	Belanja pemeliharaan buku politik dan ketatanegaraan
5	2	2	48	16	Belanja pemeliharaan buku pengetahuan dan teknologi
5	2	2	48	17	Belanja pemeliharaan buku ensiklopedia
5	2	2	48	18	Belanja pemeliharaan buku kamus bahasa
5	2	2	48	19	Belanja pemeliharaan buku ekonomi dan keuangan
5	2	2	48	20	Belanja pemeliharaan buku industri dan perdagangan
5	2	2	48	21	Belanja pemeliharaan buku peraturan perundang-undangan
5	2	2	48	22	Belanja pemeliharaan buku naskah
5	2	2	48	23	Belanja pemeliharaan terbitan berkala
5	2	2	48	24	Belanja pemeliharaan buku mikro film
5	2	2	48	25	Belanja pemeliharaan buku peta/atlas/globe
5	2	2	48	26	Belanja pemeliharaan Buku Umum
5	2	2	48	27	Belanja pemeliharaan Buku Filsafat
5	2	2	48	28	Belanja pemeliharaan Buku Ilmu Sosial, Akutansi dan Manajemen
5	2	2	48	29	Belanja pemeliharaan Buku Pengetahuan Praktis
5	2	2	48	30	Belanja pemeliharaan Buku Arsitektur, Kesenian dan Olah Raga
5	2	2	48	31	Belanja pemeliharaan Buku Komputer
5	2	2	48	32	Belanja pemeliharaan Buku Jurnal Ilmiah
5	2	2	48	33	Belanja pemeliharaan Buku
5	2	2	49		Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
5	2	2	49	01	Belanja pemeliharaan lukisan

5	2	2	49	02	Belanja pemeliharaan patung
5	2	2	49	03	Belanja pemeliharaan ukiran
5	2	2	49	04	Belanja pemeliharaan pahatan
5	2	2	49	05	Belanja pemeliharaan batu alam
5	2	2	49	06	Belanja pemeliharaan maket/miniatur/diorama
5	2	2	49	07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olah Raga
5	2	2	49	08	Belanja Pemeliharaan Alat Penerangan dan Rambu lalu Lintas
5	2	2	49	09	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
5	2	2	50		Belanja pemeliharaan hewan ternak dan tanaman
5	2	2	50	01	Belanja pemeliharaan hewan kebun binatang
5	2	2	50	02	Belanja pemeliharaan ternak
5	2	2	50	03	Belanja pemeliharaan tanaman
5	2	2	50	04	Belanja pemeliharaan hewan ternak dan tanaman
5	2	2	51		Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan
5	2	2	51	01	Belanja pemeliharaan senjata api
5	2	2	51	02	Belanja pemeliharaan radar
5	2	2	51	03	Belanja pemeliharaan mobil water canon
5	2	2	51	04	Belanja pemeliharaan borgol
5	2	2	51	05	Belanja pemeliharaan sangkur/bayonet
5	2	2	51	06	Belanja pemeliharaan perisai/tameng
5	2	2	51	07	Belanja pemeliharaan detektor logam
5	2	2	51	08	Belanja pemeliharaan rompi anti peluru
5	2	2	51	09	Belanja pemeliharaan pentungan
5	2	2	51	10	Belanja pemeliharaan helm
5	2	2	51	11	Belanja pemeliharaan alarm/sirine
5	2	2	51	12	Belanja pemeliharaan sentolop/senter
5	2	2	51	13	Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan
5	2	2	52		Belanja pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga
5	2	2	52	01	Belanja pemeliharaan Meja, Kursi, Lemari dan Meubelair
5	2	2	52	02	Belanja pemeliharaan Alat Hitung
5	2	2	52	03	Belanja pemeliharaan Alat Penyimpanan Perlengkapan
5	2	2	52	04	Belanja pemeliharaan Alat Pengukur Waktu
5	2	2	52	05	Belanja pemeliharaan Alat Pendingin
5	2	2	52	06	Belanja pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
5	2	2	52	07	Belanja pemeliharaan alat Makanan dan Minuman
5	2	2	52	08	Belanja pemeliharaan Alat Pembersih
5	2	2	52	09	Belanja pemeliharaan Televisi dan Peralatan Elektronik Sejenis
5	2	2	52	10	Belanja pemeliharaan Perkakas Rumah Tangga
5	2	2	52	11	Belanja pemeliharaan Alat Perkemahan
5	2	2	52	12	Belanja pemeliharaan Alat Menjahit
5	2	2	52	13	Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga
5	2	2	53		Belanja pemeliharaan Barang-Barang Perpustakaan
5	2	2	53	01	Belanja pemeliharaan Peta
5	2	2	53	02	Belanja pemeliharaan Bagan, Gambar, Diagram.

5	2	2	53	03	Belanja pemeliharaan Bola Dunia
5	2	2	53	04	Belanja pemeliharaan Foto
5	2	2	53	05	Belanja pemeliharaan Barang Tiga Dimensi
5	2	2	53	06	Belanja pemeliharaan Diorama
5	2	2	53	07	Belanja pemeliharaan Barang-barang Perpustakaan
5	2	3			BELANJA MODAL
5	2	3	01		Belanja modal pengadaan tanah
5	2	3	01	01	Belanja modal pengadaan tanah kantor
5	2	3	01	02	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5	2	3	01	03	Belanja modal pengadaan tanah kesehatan puskesmas
5	2	3	01	04	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5	2	3	01	05	Belanja modal pengadaan tanah pendidikan taman kanak-kanak
5	2	3	01	06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah
5	2	3	01	07	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5	2	3	01	08	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5	2	3	01	09	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa
5	2	3	01	10	Belanja modal pengadaan tanah sarana pelatihan dan kursus
5	2	3	01	11	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5	2	3	01	12	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5	2	3	01	13	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal
5	2	3	01	14	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga
5	2	3	01	15	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5	2	3	01	16	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5	2	3	01	17	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5	2	3	01	18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar
5	2	3	01	19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5	2	3	01	20	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman
5	2	3	01	21	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5	2	3	01	22	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah
5	2	3	01	23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olah raga
5	2	3	01	24	Belanja modal pengadaan tanah perumahan
5	2	3	01	25	Belanja modal pengadaan tanah pertanian
5	2	3	01	26	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan
5	2	3	01	27	Belanja modal pengadaan tanah peikanan
5	2	3	01	28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan
5	2	3	01	29	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan
5	2	3	01	30	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan /tempat penimbunan material bahan baku
5	2	3	01	31	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Pertokoan/Perdagangan/Perusahaan/Koperasi
5	2	3	01	32	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Penginapan/Hotel/Motel/Losmen dan Gedung Sejenis

5	2	3	01	33	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kesenian dan Kebudayaan
5	2	3	01	34	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	3	01	35	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	3	01	36	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Rekreasi
5	2	3	01	37	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	3	01	38	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Museum, Pameran dan Gedung Sejenis
5	2	3	01	39	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Instalasi
5	2	3	01	40	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Bengkel
5	2	3	01	41	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Pos Jaga
5	2	3	01	42	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Garasi
5	2	3	01	43	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Pabrik/Kawasan Industri
5	2	3	01	44	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Pengujian Kendaraan
5	2	3	01	45	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
5	2	3	01	46	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung/Rumah Tahanan
5	2	3	01	47	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kramatorium dan Pembakaran sejenis
5	2	3	01	48	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung/Direksi Kit
5	2	3	01	49	Belanja Modal Tanah Gedung Mess/Asrama/Wisma/Bungalow dan Gedung Sejenis
5	2	3	01	50	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung
5	2	3	01	51	Belanja Modal Tanah Untuk jalan dan Jembatan Khusus Tempat Kerja
5	2	3	01	52	Belanja Modal Tanah Untuk jalan dan Jembatan Khusus Tempat Tinggal
5	2	3	01	53	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5	2	3	01	54	Belanja Modal Tanah Lapangan Olah Raga
5	2	3	01	55	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir
5	2	3	01	56	Belanja Modal Tanah Lapangan
5	2	3	02		Belanja modal pengadaan alat-alat berat
5	2	3	02	01	Belanja modal pengadaan Traktor
5	2	3	02	02	Belanja modal pengadaan bulldozer
5	2	3	02	03	Belanja modal pengadaan stone walls
5	2	3	02	04	Belanja modal pengadaan eskavator
5	2	3	02	05	Belanja modal pengadaan dump truk
5	2	3	02	06	Belanja modal pengadaan crane
5	2	3	02	07	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan
5	2	3	02	08	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen
5	2	3	02	09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih
5	2	3	02	10	Belanja modal pengadaan alat-alat berat
5	2	3	03		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
5	2	3	03	01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5	2	3	03	02	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep

5	2	3	03	03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5	2	3	03	04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5	2	3	03	05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5	2	3	03	06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truk
5	2	3	03	07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki
5	2	3	03	08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5	2	3	03	09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5	2	3	03	10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance
5	2	3	03	11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5	2	3	03	12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5	2	3	03	13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5	2	3	03	14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5	2	3	03	15	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	3	03	16	Belanja Modal Wales dan sejenisnya
5	2	3	03	17	Belanja Modal Kendaraan Bermotor
5	2	3	04		Belanja modal pengadaan alat angkutan darat tidak bermotor
5	2	3	04	01	Belanja modal pengadaan gerbak
5	2	3	04	02	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi
5	2	3	04	03	Belanja modal pengadaan becak
5	2	3	04	04	Belanja modal pengadaan sepeda
5	2	3	04	05	Belanja modal pengadaan karavan
5	2	3	04	06	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	2	3	05		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor
5	2	3	05	01	Belanja modal pengadaan kapal motor
5	2	3	05	02	Belanja modal pengadaan kapal feri
5	2	3	05	03	Belanja modal pengadaan speed boot
5	2	3	05	04	Belanja modal pengadaan motor boot/motor tempel
5	2	3	05	05	Belanja modal pengadaan hidro foll
5	2	3	05	06	Belanja modal pengadaan jet foll
5	2	3	05	07	Belanja modal pengadaan kapal tog boat
5	2	3	05	08	Belanja modal pengadaan kapal tanker
5	2	3	05	09	Belanja modal pengadaan kapal kargo
5	2	3	05	10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor
5	2	3	06		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor
5	2	3	06	01	Belanja modal pengadaan perahu layar
5	2	3	06	02	Belanja modal pengadaan perahu sampan
5	2	3	06	03	Belanja modal pengadaan perahu tongkang
5	2	3	06	04	Belanja modal pengadaan perahu karet
5	2	3	06	05	Belanja modal pengadaan perahu rakit

5	2	3	06	06	Belanja modal pengadaan perahu sekoci
5	2	3	06	07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor
5	2	3	07		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara
5	2	3	07	01	Belanja modal pengadaan pesawat kargo
5	2	3	07	02	Belanja modal pengadaan pesawat penumpang
5	2	3	07	03	Belanja modal pengadaan pesawat helikopter
5	2	3	07	04	Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran
5	2	3	07	05	Belanja modal pengadaan pesawat capung
5	2	3	07	06	Belanja modal pengadaan pesawat terbang amfibi
5	2	3	07	07	Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang
5	2	3	07	08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara
5	2	3	08		Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel
5	2	3	08	01	Belanja modal pengadaan mesin las
5	2	3	08	02	Belanja modal pengadaan mesin bubut
5	2	3	08	03	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak
5	2	3	08	04	Belanja modal pengadaan mesin kompresor
5	2	3	08	05	Belanja Modal Alat Bengkel Tidak Bermesin
5	2	3	08	06	Belanja Modal Alat Bengkel
5	2	3	09		Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan
5	2	3	09	01	Belanja modal pengadaan penggilingan hasil pertanian
5	2	3	09	02	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah
5	2	3	09	03	Belanja modal pengadaan mesin bajak
5	2	3	09	04	Belanja modal pengadaan pengadaan alat penetas
5	2	3	09	05	Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan
5	2	3	10		Belanja modal pengadaan peralatan kantor
5	2	3	10	01	Belanja modal pengadaan mesin tik
5	2	3	10	02	Belanja modal pengadaan mesin hitung
5	2	3	10	03	Belanja modal pengadaan mesin stensil
5	2	3	10	04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy
5	2	3	10	05	Belanja modal pengadaan mesin cetak
5	2	3	10	06	Belanja modal pengadaan mesin jilid
5	2	3	10	07	Belanja modal pengadaan potong kertas
5	2	3	10	08	Belanja modal pengadaan penghancur kertas
5	2	3	10	09	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik
5	2	3	10	10	Belanja modal pengadaan visual elektronik
5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
5	2	3	10	12	Belanja Modal Alat Reproduksi/Penggandaan
5	2	3	10	13	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan
5	2	3	10	14	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu
5	2	3	10	15	Belanja Modal Alat Pendingin
5	2	3	10	16	Belanja Modal Alat Tulis Menulis
5	2	3	10	17	Belanja Modal Makan dan Minum
5	2	3	10	18	Belanja Modal Alat Pembersih

5	2	3	10	19	Belanja Modal Persentasi dan Dokumentasi
5	2	3	10	20	Belanja Modal Televisi dan Peralatan Elektronik Sejenis
5	2	3	10	21	Belanja Modal Perkakas Kantor
5	2	3	10	22	Belanja Modal Alat Perkemahan
5	2	3	10	23	Belanja Modal Alat Menjahit
5	2	3	10	24	Belanja Modal Jense
5	2	3	10	25	Belanja Modal Alat Kantor
5	2	3	11		Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
5	2	3	11	01	Belanja modal pengadaan meja gambar
5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari
5	2	3	11	03	Belanja modal pengadaan brankas
5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet
5	2	3	11	05	Belanja modal pengadaan white board
5	2	3	11	06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu
5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
5	2	3	12		Belanja modal pengadaan komputer
5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server
5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC
5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer notebook
5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer
5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner
5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor display
5	2	3	12	07	Belanja modal pengadaan CPU
5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS
5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer
5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
5	2	3	12	11	Belanja modal pengadaan komputer
5	2	3	13		Belanja modal pengadaan meubelair
5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja
5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat
5	2	3	13	03	Belanja modal pengadaan meja makan
5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja
5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat
5	2	3	13	06	Belanja modal pengadaan kursi makan
5	2	3	13	07	Belanja modal pengadaan tempat tidur
5	2	3	13	08	Belanja modal pengadaan sofa
5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/kembang
5	2	3	13	10	Belanja modal pengadaan meubelair
5	2	3	14		Belanja modal pengadaan peralatan alat dapur
5	2	3	14	01	Belanja modal pengadaan tabung gas
5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas
5	2	3	14	03	Belanja modal pengadaan lemari makan
5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser
5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas
5	2	3	14	06	Belanja modal pengadaan rak piring

5	2	3	14	07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok
5	2	3	14	08	Belanja modal pengadaan peralatan alat dapur
5	2	3	15		Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga
5	2	3	15	01	Belanja modal pengadaan lampu hias
5	2	3	15	02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja
5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga
5	2	3	16		Belanja modal pengadaan alat-alat studio
5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera
5	2	3	16	02	Belanja modal pengadaan handycam
5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor
5	2	3	16	04	Belanja Modal Peralatan Studio Visual
5	2	3	16	05	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
5	2	3	16	06	Belanja Modal Peralatan Cetak dan Dokumentasi
5	2	3	16	07	Belanja Modal Alat-alat Studio
5	2	3	17		Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi
5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon
5	2	3	17	02	Belanja modal pengadaan faksimili
5	2	3	17	03	Belanja modal pengadaan radio ssb
5	2	3	17	04	Belanja modal pengadaan radio hf
5	2	3	17	05	Belanja modal pengadaan radio VHF
5	2	3	17	06	Belanja modal pengadaan radio UHV
5	2	3	17	07	Belanja modal pengadaan alat sandi
5	2	3	17	08	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Sosial
5	2	3	17	09	Belanja Modal Peralatan Pemancar
5	2	3	17	10	Belanja Modal Peralatan Translator
5	2	3	17	11	Belanja Modal Peralatan Antena
5	2	3	17	12	Belanja Modal Peralatan Penginderaan Jarak Jauh
5	2	3	17	13	Belanja Modal Alat Komunikasi
5	2	3	18		Belanja modal pengadaan alat-alat ukur
5	2	3	18	01	Belanja modal pengadaan timbangan
5	2	3	18	02	Belanja modal pengadaan teodolite
5	2	3	18	03	Belanja modal pengadaan alat uji emisi
5	2	3	18	04	Belanja modal pengadaan alat GPS
5	2	3	18	05	Belanja modal pengadaan Kompas, peralatan navigasi
5	2	3	18	06	Belanja modal pengadaan ukur
5	2	3	18	07	Belanja modal pengadaan barometer
5	2	3	18	08	Belanja modal pengadaan seismograf
5	2	3	18	09	Belanja Modal Alat Ukur Universal
5	2	3	18	10	Belanja Modal Alat Ukur/Test Intelegensia, Kepribadian, Kejiwaan dan Test Sejenis
5	2	3	18	11	Belanja Modal Alat Kalibrasi
5	2	3	18	12	Belanja Modal Oscilloscope
5	2	3	18	13	Belanja Modal Takaran
5	2	3	18	14	Belanja Modal Gelas Takar

5	2	3	18	15	Belanja Modal Alat Ukur
5	2	3	19		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
5	2	3	19	01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum
5	2	3	19	02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5	2	3	19	03	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT
5	2	3	19	04	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata
5	2	3	19	05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5	2	3	19	06	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak
5	2	3	19	07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5	2	3	19	08	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5	2	3	19	09	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5	2	3	19	10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5	2	3	19	11	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran ortopedi
5	2	3	19	12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5	2	3	19	13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi
5	2	3	19	14	Belanja modal pengadaan alat-alat penyakit dalam
5	2	3	19	15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
5	2	3	20		Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium
5	2	3	20	01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5	2	3	20	02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5	2	3	20	03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5	2	3	20	04	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5	2	3	20	05	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5	2	3	20	06	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
5	2	3	20	07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5	2	3	20	08	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah
5	2	3	20	10	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium
5	2	3	21		Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
5	2	3	21	02	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over
5	2	3	21	03	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass
5	2	3	21	04	Belanja Modal Jalan Tempat Kerja
5	2	3	21	05	Belanja Modal Jalan Tempat Tinggal
5	2	3	21	06	Belanja Modal Jalan
5	2	3	22		Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
5	2	3	22	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung
5	2	3	22	02	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton
5	2	3	22	03	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5	2	3	22	04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5	2	3	22	05	Belanja Modal Jembatan Tempat Kerja
5	2	3	22	06	Belanja Modal Jembatan Tempat Tinggal

5	2	3	22	07	Belanja Modal Jembatan
5	2	3	23		Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air
5	2	3	23	01	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan
5	2	3	23	02	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk
5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
5	2	3	23	04	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5	2	3	23	06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum
5	2	3	23	07	Belanja modal pengadaan konstruksi resovir
5	2	3	23	08	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air
5	2	3	23	09	Belanja Modal Jaringan Air Minum/Bersih
5	2	3	23	10	Belanja Modal Jaringan Air Limbah/Kotor, Pengolahan dan Pembuangan Sampah
5	2	3	23	11	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air
5	2	3	24		Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman, dan hutan kota
5	2	3	24	01	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan
5	2	3	24	02	Belanja modal pengadaan hias taman
5	2	3	24	03	Belanja modal pengadaan penerangan hutan kota
5	2	3	24	04	Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman, dan hutan kota
5	2	3	25		Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon
5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik
5	2	3	25	02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
5	2	3	25	03	Belanja Modal Instalasi Gas
5	2	3	25	04	Belanja Modal Instalasi Pengaman Petir
5	2	3	25	05	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	3	25	06	Belanja Modal Instalasi
5	2	3	26		Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5	2	3	26	02	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5	2	3	26	03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5	2	3	26	04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5	2	3	26	05	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5	2	3	26	06	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bermonumen
5	2	3	26	07	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu peringatan
5	2	3	26	08	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	3	26	09	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	3	26	10	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi
5	2	3	26	11	Belanja Modal Bangunan Gedung Bengkel
5	2	3	26	12	Belanja Modal Bangunan Gedung Pos Jaga
5	2	3	26	13	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi
5	2	3	26	14	Belanja Modal Bangunan Gedung Pengujian Kendaraan
5	2	3	26	15	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Perasyarakatan
5	2	3	26	16	Belanja Modal Bangunan Gedung/Rumah Tahanan

5	2	3	26	17	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	26	18	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	26	19	Belanja Modal Tugu Kantor
5	2	3	26	20	Belanja Modal Tugu Selamat Datang
5	2	3	26	21	Belanja Modal Tugu Patok
5	2	3	26	22	Belanja Modal Tugu
5	2	3	26	23	Belanja Modal Menara Komunikasi
5	2	3	26	24	Belanja Modal Menara Air
5	2	3	26	25	Belanja Modal Menara
5	2	3	27		Belanja modal pengadaan buku /kepuustakaan
5	2	3	27	01	Belanja modal pengadaan buku matematika
5	2	3	27	02	Belanja modal pengadaan buku fisika
5	2	3	27	03	Belanja modal pengadaan buku kimia
5	2	3	27	04	Belanja modal pengadaan buku biologi
5	2	3	27	05	Belanja modal pengadaan buku biografi
5	2	3	27	06	Belanja modal pengadaan buku geografi
5	2	3	27	07	Belanja modal pengadaan buku astronomi
5	2	3	27	08	Belanja modal pengadaan buku arkeologi
5	2	3	27	09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra
5	2	3	27	10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan
5	2	3	27	11	Belanja modal pengadaan buku sejarah
5	2	3	27	12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya
5	2	3	27	13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5	2	3	27	14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5	2	3	27	15	Belanja modal pengadaan buku politik dan ketatanegaraan
5	2	3	27	16	Belanja modal pengadaan buku pengetahuan dan teknologi
5	2	3	27	17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia
5	2	3	27	18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa
5	2	3	27	19	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5	2	3	27	20	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan
5	2	3	27	21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5	2	3	27	22	Belanja modal pengadaan buku naskah
5	2	3	27	23	Belanja modal pengadaan terbitan berkala
5	2	3	27	24	Belanja modal pengadaan buku mikro film
5	2	3	27	25	Belanja modal pengadaan buku peta/atlas/globe
5	2	3	27	26	Belanja Modal pengadaan Buku Umum
5	2	3	27	27	Belanja Modal pengadaan Buku Filsafat
5	2	3	27	28	Belanja Modal pengadaan Buku Ilmu Sosial, Akutansi dan Manajemen
5	2	3	27	29	Belanja Modal pengadaan Buku Pengetahuan Praktis
5	2	3	27	30	Belanja Modal pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian dan Olah Raga
5	2	3	27	31	Belanja Modal pengadaan Buku Komputer
5	2	3	27	32	Belanja Modal pengadaan Buku Jurnal Ilmiah
5	2	3	27	33	Belanja Modal pengadaan Buku
5	2	3	28		Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
5	2	3	28	01	Belanja modal pengadaan lukisan

5	2	3	28	02	Belanja modal pengadaan patung
5	2	3	28	03	Belanja modal pengadaan ukiran
5	2	3	28	04	Belanja modal pengadaan pahatan
5	2	3	28	05	Belanja modal pengadaan batu alam
5	2	3	28	06	Belanja modal pengadaan maket/miniatur/diorama
5	2	3	28	07	Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
5	2	3	29		Belanja modal pengadaan hewan ternak dan tanaman
5	2	3	29	01	Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang
5	2	3	29	02	Belanja modal pengadaan ternak
5	2	3	29	03	Belanja modal pengadaan tanaman
5	2	3	29	04	Belanja modal pengadaan hewan ternak dan tanaman
5	2	3	30		Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan
5	2	3	30	01	Belanja modal pengadaan senjata api
5	2	3	30	02	Belanja modal pengadaan radar
5	2	3	30	03	Belanja modal pengadaan mobil water canon
5	2	3	30	04	Belanja modal pengadaan borgol
5	2	3	30	05	Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet
5	2	3	30	06	Belanja modal pengadaan perisai/tameng
5	2	3	30	07	Belanja modal pengadaan detektor logam
5	2	3	30	08	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru
5	2	3	30	09	Belanja modal pengadaan pentungan
5	2	3	30	10	Belanja modal pengadaan helm
5	2	3	30	11	Belanja modal pengadaan alarm/sirine
5	2	3	30	12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter
5	2	3	30	13	Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan
5	2	3	31		Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangga
5	2	3	31	01	Belanja Modal Meja, Kursi, Lemari dan Meubelair
5	2	3	31	02	Belanja Modal Alat Hitung
5	2	3	31	03	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan
5	2	3	31	04	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu
5	2	3	31	05	Belanja Modal Alat Pendingin
5	2	3	31	06	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
5	2	3	31	07	Belanja Modal alat Makanan dan Minuman
5	2	3	31	08	Belanja Modal Alat Pembersih
5	2	3	31	09	Belanja Modal Televisi dan Peralatan Elektronik Sejenis
5	2	3	31	10	Belanja Modal Perkakas Rumah Tangga
5	2	3	31	11	Belanja Modal Alat Perkemahan
5	2	3	31	12	Belanja Modal Alat Menjahit
5	2	3	31	13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5	2	3	32		Belanja Modal Barang-Barang Perpustakaan
5	2	3	32	01	Belanja Modal Peta
5	2	3	32	02	Belanja Modal Bagan, Gambar, Diagram
5	2	3	32	03	Belanja Modal Bola Dunia
5	2	3	32	04	Belanja Modal Foto
5	2	3	32	05	Belanja Modal Barang Tiga Dimensi

5	2	3	32	06	Belanja Modal Diorama
5	2	3	32	07	Belanja Modal Barang-barang Perpustakaan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening					Uraian
6					PEMBIAYAAN DAERAH
6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6	1	1			SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
6	1	1	01		Pelampauan penerimaan PAD
6	1	1	01	01	Pajak daerah
6	1	1	01	02	Retribusi daerah
6	1	1	01	03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
6	1	1	01	04	Lain-lain PAD yang sah
6	1	1	02		Pelampauan penerimaan dana perimbangan
6	1	1	02	01	Bagi hasil pajak
6	1	1	02	02	Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam
6	1	1	03		Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
6	1	1	03	01	dst.
6	1	1	04		Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
6	1	1	04	01	Belanja pegawai dari belanja tidak langsung
6	1	1	04	02	Belanja pegawai dari belanja langsung
6	1	1	04	03	Belanja barang dan jasa
6	1	1	04	04	Belanja modal
6	1	1	04	05	Belanja bunga
6	1	1	04	06	Belanja subsidi
6	1	1	04	07	Belanja hibah
6	1	1	04	08	Belanja bantuan sosial
6	1	1	04	09	Belanja bagi hasil
6	1	1	04	10	Belanja bantuan keuangan
6	1	1	04	11	Belanja tidak tersangka
6	1	1	05		Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
6	1	1	05	01	Uang jaminan
6	1	1	05	02	Potongan taspen
6	1	1	05	03	Potongan beras
6	1	1	05	04	Askes
6	1	1	05	05	Taperum

6	1	1	05	06	PPh 21
6	1	1	05	07	PPh 22
6	1	1	05	08	PPh 23
6	1	1	05	09	PPN
6	1	1	05	10	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Lainnya
6	1	1	06		Kegiatan lanjutan
6	1	1	06	01	Kegiatan lanjutan
6	1	1	06	02	dst.
6	1	2			PENCAIRAN DANA CADANGAN
6	1	2	01		Pencairan dana cadangan
6	1	2	01	01	Pencairan dana cadangan nomor rekening.
6	1	2	01	02	dst.
6	1	3			HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
6	1	3	01		Hasil penjualan milik daerah
6	1	3	01	01	Bank Pembangunan Daerah
6	1	3	01	02	Perusahaan Daerah Pasar
6	1	3	01	03	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
6	1	3	01	04	Hasil penjualan milik daerah Lainnya
6	1	3	02		Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
6	1	3	02	01	
6	1	3	02	02	dst.
6	1	4			PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH
6	1	4	01		Penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah
6			01	01	Penerusan pinjaman
6	1	4	01	02	dst.
6	1	4	02		Penerimaan pinjaman dari pemerintah daerah lain
6	1	4	02	01	pemerintah daerah
6	1	4	02	02	dst
6	1	4	03		Penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank
6	1	4	03	01	Bank Pembangunan Daerah Lampung
6	1	4	03	02	dst.
6	1	4	04		Penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6	1	4	04	01	Lembaga keuangan bukan Bank.
6	1	4	04	02	dst.

6	1	4	05		Penerimaan hasil pe nerbitan hasil obligasi daerah
6	1	4	05	01	obligasi atas nama.
6	1	4	05	02	obligasi nomor
6	1	4	05	03	dst.....
6	1	5			PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN
6	1	5	01		Penerimaan kembali pemberian pinjaman
6	1	5	01	01	Penerimaan kembali pemberian pinjaman (piutang lain-lain)
6	1	5	01	02	dst.....
6	1	6			PENERIMAAN PIUTANG DAERAH
6	1	6	01		Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6	1	6	01	01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6	1	6	01	02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6	1	6	01	03	penerimaan piutang daerah dari lain-lain PAD
6	1	6	02		Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6	1	6	02	01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6	1	6	03		Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lainnya
6	1	6	03	01	Pemerintah daerah.....
6	1	6	03	02	dst.....
6	1	6	04		Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6	1	6	04	01	Bank Pembangunan Daerah Lampung
6	1	6	04	02	dst.....
6	1	6	05		Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan Bank
6	1	6	05	01	Lembaga keuangan bukan Bank.
6			05	02	dst.....
6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6	2	1			PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
6	2	1	01		Pembentukan dana cadangan
6	2	1	01	01	Pembentukan dana cadangan nomor.....
6	2	1	01	03	dst .
6	2	2			PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
6	2	2	01		Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
6	2	2	01	01	BUMN.....
6	2	2	01	02	dst.....

6	2	2	02		Badan usaha milik daerah (BUMD)
6	2	2	02	01	Bank Pembangunan Daerah
6	2	2	02	02	Perusahaan Daerah Pasar
6	2	2	02	03	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
6	2	2	02	04	Badan usaha milik daerah (BUMD) Lainnya
6	2	2	03		Badan usaha milik swasta
6	2	2	03	01	Badan
6	2	2	03	02	dst
6	2	3			PEMBAYARAN POKOK HUTANG
6	2	3	01		Pembayaran pokok yang jatuh tempo kepada pemerintah
6	2	3	01	01	Penerusan pinjaman
6	2	3	01	02	dst
6	2	3	02		Pembayaran utang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lainnya
6	2	3	02	01	Pemerintah daerah
6	2	3	02	02	dst
6	2	3	03		Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan Bank
6	2	3	03	01	Bank Pembangunan Daerah Lampung
6	2	3	03	02	dst
6	2	3	04		Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan Bank
6	2	3	04	01	Lembaga keuangan bukan Bank
6	2	3	04	02	dst
6	2	3	05		Pembayaran pokok piutang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah
6	2	3	05	01	Penerusan pinjaman
6	2	3	05	02	dst
6	2	3	06		Pembayaran utang pokok sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lainnya
6	2	3	06	01	Pemerintah daerah
6	2	3	06	02	dst
6	2	3	07		Pembayaran utang pokok sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan Bank
6	2	3	07	01	Bank Pembangunan Daerah Lampung
6	2	3	07	02	dst
6	2	3	08		Pembayaran utang pokok sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan Bank
6	2	3	08	01	Lembaga keuangan bukan Bank

6	2	3	08	02	dst.
6	2	3	09		Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6	2	3	09	01	Obligasi atas nama.
6	2	3	09	02	Obligasi nomor.
6	2	3	09	03	dst.
6	2	3	10		Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6	2	3	10	01	Obligasi atas nama.
6	2	3	10	02	Obligasi nomor.
6	2	3	10	03	dst.
6	2	4			PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH
6	2	4	01		Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah
6	2	4	01	01	Pemerintah
6	2	4	02		Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lainnya
6	2	4	02	01	Pemerintah daerah.
6	2	4	02	02	dst.
6	2	4	03		Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat
6	2	4	03	01	Pemberian pinjaman kepada petani (dana bergulir)
6	2	4	03	02	dst.
6	2	5			SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
6	2	5	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
6	2	5	01	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
6	2	5	1	02	Dst.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	HARGA	K E T
I	Tunjangan Khusus Pegawai Daerah/PNS (TKPD)				
	Tunjangan Bendahara Umum Daerah (BUD)	1 Badan Pengelola Keuangan Daerah	Orang / Bulan	Rp. 1.000.000	
	Tunjangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1 Semua Satuan Kerja, kecuali :	Orang / Bulan	Rp. 400.000	
		2 Kecamatan	Orang / Bulan	Rp. 200.000	
	Tunjangan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan	1 Semua Satuan Kerja kecuali	Orang / Bulan	Rp. 350.000	
		2 Kecamatan	Orang / Bulan	Rp. 200.000	
	Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan	1 Sekretariat Daerah/DPRD	Orang / Bulan	Rp. 300.000	
		2 Bupati/Wakil Bupati	Orang / Bulan	Rp. 250.000	
		3 Dinas/Badan	Orang / Bulan	Rp. 250.000	
		4 Kantor	Orang / Bulan	Rp. 200.000	
		5 Setingkat UPTD/Cabang Dinas	Orang / Bulan	Rp. 200.000	
		6 Kecamatan	Orang / Bulan	Rp. 150.000	
		7 Sekolah	Orang / Bulan	Rp. 150.000	
		8 Puskesmas	Orang / Bulan	Rp. 150.000	
	Tunjangan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (P P K)	1 Semua SKPD, maksimal 2 orang, kecuali :	Orang / Bulan	Rp. 250.000	
		2 Kecamatan	Orang / Bulan	Rp. 150.000	
	Tunjangan Operasional Pejabat (tambahan penghasilan-berdasarkan beban kerja)	1 Sekretaris Daerah	Orang / bulan	Rp. 25.000.000	
		2 Staf Ahli Bupati	Orang / bulan	Rp. 7.500.000	
		3 Asisten	Orang / bulan	Rp. 7.500.000	
		4 Kepala Badan / Dinas / Sekwan	Orang / bulan	Rp. 2.000.000	

		5	Kepala RSUD Kahanda	Orang / bulan	Rp.	1.500.000	
		6	Kepala Kantor/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	Orang / bulan	Rp.	1.500.000	
		7	Sekretaris KPU dan Camat	Orang / bulan	Rp.	1.500.000	
		8	Sekretaris Bappeda dan DPPKAD	Orang / bulan	Rp.	750.000	
	Tunjangan Uang Makan	1	POL -PP dan DAMKAR	1 Orang/hari	Rp	7.500	
		2	Pegawai Sekretariat/Dinas/Instansi Kab Lamsel	1 Orang/hari	Rp	7.500	
	Tunjangan Khusus Pegawai Daerah/PNS Lainnya						
	Uang Piker	1	POL -PP dan DAMKAR	1 Orang/hari	Rp	5.000	
	Tunjangan Pemegang Barang / Pengurus Aset	1	Sekretariat Daerah/DPRD	Orang / Bulan	Rp	300.000	
		2	Bupati/Wakil Bupati	Orang / Bulan	Rp	250.000	
		3	Dinas Badan	Orang / Bulan	Rp	250.000	
		4	Kantor	Orang / Bulan	Rp	200.000	
		5	Setingkat UPTD	Orang / Bulan	Rp	150.000	
		6	Kecamatan	Orang / Bulan	Rp.	140.000	
2	Honor dan Upah untuk Non Pegawai Daerah/PNS						
	Tenaga Harian Lepas	1	Sarjana	Orang / bulan	Rp	525.000	
		2	DA	Orang / bulan	Rp	475.000	
		3	SMU	Orang / bulan	Rp.	450.000	
		4	SLTP dan SD	Orang / bulan	Rp.	400.000	
3	Uang Lembur Pegawai Daerah/PNS						
	Uang Lembur	1	Golongan IV	1 Jam	Rp.	9.500	
		2	Golongan III	1 Jam	Rp.	8.000	

	3	Golongan II	1 Jam	Rp. 6.500
	4	Golongan I	1 Jam	Rp. 5.000
4 Uang Lembur untuk Non Pegawai Daerah/PNS Uang Lembur	1	THLS	1 Jam	Rp. 3.500
5 Uang Makan Lembur	1	Semua Golongan dan Non PNS		Rp. 10.000
6 Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Biaya Beasiswa/Bantuan Tugas Belajar				
Pegawai Tugas Belajar Program D-3 di luar Provinsi Lampung	1	Tunjangan Belajar / Uang Buku	Orang / bulan	Rp. 50.000
	2	Tunjangan Uang Saku, Uang makan, dan Pondokan	Orang / bulan	Rp. 300.000
	3	Biaya Riset/Skripsi	1 kali	Rp. 400.000
	4	Wisuda	1 kali	Rp. 400.000
Pegawai Tugas Belajar S-1 diluar Provinsi Lampung	1	Tunjangan Belajar / Uang Buku	Orang / bulan	Rp. 75.000
	2	Tunjangan Uang Saku, Uang makan, dan Pondokan	Orang / bulan	Rp. 400.000
	3	Biaya Riset / Skripsi	1 kali	Rp. 500.000
	4	Wisuda	1 kali	Rp. 500.000
Pegawai Tugas Belajar S-2 di luar Provinsi Lampung	1	Tunjangan Belajar / Uang Buku	Orang / bulan	Rp. 250.000
	2	Tunjangan Uang Saku, Uang makan, dan Pondokan	Orang / bulan	Rp. 1.000.000
	3	Biaya Riset / Skripsi	1 kali	Rp. 1.500.000
	4	Wisuda	1 kali	Rp. 1.500.000
Pegawai Tugas belajar Program Magister (S-3)	1	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls / Tahun	Rp. 47.750.000
Biaya Bantuan Pendidikan Penjurangan Struktural Diklat Penjurangan PIM IV - didalam Propinsi Lampung	1	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.

				1.500.000	
- diluar Propinsi Lampung	2	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.	1.500.000
Diklat Penjenjangan PIM III					
- di dalam Propinsi Lampung	1	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.	1.500.000
- di Luar Propinsi Lampung	2	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.	1.500.000
Ladies Program					
- didalam Propinsi Lampung	3	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.	1.500.000
- diluar Propinsi Lampung	4	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.	1.500.000
Diklat Penjenjangan PIM II					
- di dalam Propinsi Lampung	1	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.	6.000.000
- di Luar Propinsi Lampung	2	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.	6.000.000
Ladies Program					
- didalam Propinsi Lampung	3	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.	1.500.000
- diluar Propinsi Lampung	4	Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp.	1.500.000
Pegawai Tugas Belajar D3, S1, dan S2 Seluruh Biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana	1	Uang Saku	Orang/ Bulan	Rp.	300.000
Biaya Bantuan dan Kursus Keterampilan					
Kursus Keterampilan dan Job Training di dalam Provinsi Lampung	1	Golongan IV	Orang / Hari	Rp.	100.000
	2	Golongan III	Orang / Hari	Rp.	75.000
	3	Golongan II	Orang / Hari	Rp.	50.000
	4	Golongan I	Orang / Hari	Rp.	25.000
Kursus Keterampilan dan Job Training di luar Provinsi Lampung					
	1	Golongan IV	Orang / Hari	Rp.	300.000
	2	Golongan III	Orang / Hari	Rp.	

				275,000	
	3	Golongan II	Orang / Hari	Rp.	250,000
	4	Golongan I	Orang / Hari	Rp.	225,000
	1	Lang Saku, transpor lokal & akomodasi (betum termasuk transportasi PP)	Orang / Hari	Rp.	200,000
7	Biaya Jasa Kantor				
	1	Semua Satker	Bulan/saluran	Rp.	1.500,000
	1	DPRD	Bulan/saluran	Rp.	2.000,000
	2	Bupati/Wakil Bupati	Bulan/saluran	Rp.	3.000,000
	3	Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD	Bulan/saluran	Rp.	2.800,000
	4	Badan/Dinas/Kantor	Bulan/saluran	Rp.	750,000
	1	Semua Satker	Bulan/saluran	Rp.	500,000
8	Biaya Cetak dan Penggandaan				
	1	Fotokopi :			
	-	A1 dan A2	lembar	Rp.	250
	-	A3	lembar	Rp.	200
	-	A4	lembar	Rp.	150
	2	Jilid dengan Cover no. 1	exemplar	Rp.	20.000
	3	Jilid dengan Cover no. 2	exemplar	Rp.	15.000
9	Biaya Makanan dan Minuman				
	1	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Snack	Orang	Rp.	7.500
	2	Jamuan Makan (Prasmanan) Tamu VIP	Orang	Rp.	22.500

Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Tamu Biaya Makanan Pelaksanaan Kegiatan	3	Jamuau Makan (Prasmanan) untuk Pelatinaan, Penataran, dll	Orang	Rp.	15.000
	4	Jamuau Makan (Nasi Kotak)	Orang	Rp.	12.500
10 Biaya Pakaian Dinas	1	Pakaian Sipil Haran	Stel	Rp	400.000
	2	Pakaian Sipil Lengkap	Stel	Rp.	750.000
	3	Pakaian Olah Raga	Stel	Rp.	175.000
	4	Pakaian DH	Stel	Rp	250.000
	5	Pakaian Hansip	Stel	Rp	250.000
	6	Pakaian Polisi Pamong Praja Lengkap	Seperangkat	Rp.	400.000
11 Biaya Pakaian Kerja Lapangan	1	Pakaian Kerja Pesuruh/Cleaning Service Lengkap	Seperangkat	Rp.	225.000
	2	Pakaian Kerja Sopir	Stel	Rp	175.000
	3	Pakaian Kerja Montir	Stel	Rp.	175.000
	4	Pakaian Kerja Satpam	Stel	Rp.	175.000
	5	Pakaian Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	Stel	Rp	175.000
	6	Pakaian Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan	Stel	Rp.	175.000
	7	Pakaian Kerja Tukang Kebun	Stel	Rp.	175.000
12	BELANJA PERJALANAN DINAS		UANG HARIAN		

A PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH :		TINGKAT A		TINGKAT B		TINGKAT C		TINGKAT D	
1. NANGRU ACEH DARUSSALAM	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
2. SUMATERA UTARA	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
3. RIAU	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
4. KEPULAUAN RIAU	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
5. JAMBI	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
6. SUMATERA BARAT	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
7. SUMATERA SELATAN	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
8. BENGKULU	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
9. BANGKA BELITUNG	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
10. BANTEN	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
11. JAWA BARAT	Rp.	350.000	Rp.	300.000	Rp.	250.000	Rp.	210.000	
12. DKI JAKARTA	Rp.	450.000	Rp.	400.000	Rp.	350.000	Rp.	300.000	
13. JAWA TENGAH	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
14. DI YOGYAKARTA	Rp.	350.000	Rp.	300.000	Rp.	250.000	Rp.	210.000	
15. JAWA TIMUR	Rp.	350.000	Rp.	300.000	Rp.	250.000	Rp.	210.000	
16. BALI	Rp.	400.000	Rp.	350.000	Rp.	300.000	Rp.	250.000	
17. NUSA TENGGARA BARAT	Rp.	350.000	Rp.	300.000	Rp.	250.000	Rp.	210.000	
18. NUSA TENGGARA TIMUR	Rp.	350.000	Rp.	300.000	Rp.	250.000	Rp.	210.000	
19. KALIMANTAN BARAT	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
20. KALIMANTAN TENGAH	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
21. KALIMANTAN SELATAN	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
22. KALIMANTAN TIMUR	Rp.	350.000	Rp.	300.000	Rp.	250.000	Rp.	210.000	
23. SULAWESI UTARA	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
24. GORONTALO	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
25. SULAWESI BARAT	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
26. SULAWESI SELATAN	Rp.	350.000	Rp.	300.000	Rp.	250.000	Rp.	210.000	
27. SULAWESI TENGAH	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
28. SULAWESI TENGGRA	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
29. MALUKU	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
30. MALUKU UTARA	Rp.	300.000	Rp.	260.000	Rp.	220.000	Rp.	180.000	
31. PAPUA	Rp.	450.000	Rp.	400.000	Rp.	350.000	Rp.	300.000	
		LANG HAPIAN							

PEJABAT/PEGAWAI GOLONGAN		MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/BUS	Lainnya (Tarif)
		Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
1.	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan para Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
2.	Para Anggota DPRD dan Sekdakab	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
3.	Pegawai Golongan IV Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
4.	Pegawai Golongan IV diluar Eselon II	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
5.	Pegawai golongan III, II I dan PTT	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
		BIAYA PENGINAPAN			
		BINTANG IV	BINTANG IV	BINTANG IV	BINTANG IV
	1. NANGRU ACEH DARUSSALAM	Rp. 500.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
	2. SUMATERA UTARA	Rp. 550.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
	3. RIAU	Rp. 550.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
	4. KEPULAUAN RIAU	Rp. 450.000	Rp. 350.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000
	5. JAMBI	Rp. 500.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000
	6. SUMATERA BARAT	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000
	7. SUMATERA SELATAN	Rp. 500.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
	8. BENGKULU	Rp. 400.000	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
	9. BANGKA BELITUNG	Rp. 400.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000
	10. BANTEN	Rp. 500.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
	11. JAWA BARAT	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000
	12. DKI JAKARTA	Rp. 700.000	Rp. 550.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000
	13. JAWA TENGAH	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000
	14. DI YOGYAKARTA	Rp. 550.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
	15. JAWA TIMUR	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000
	16. BALI	Rp. 1.100.000	Rp. 850.000	Rp. 700.000	Rp. 450.000
	17. NUSA TENGGARA BARAT	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
	18. NUSA TENGGARA TIMUR	Rp. 500.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
	19. KALIMANTAN BARAT	Rp. 500.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
	20. KALIMANTAN TENGAH	Rp. 500.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
	21. KALIMANTAN SELATAN	Rp. 500.000	Rp. 400.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000

	22. KALIMANTAN TIMUR	Rp. 650.000	Rp. 500.000	Rp. 350.000	Rp. 200.000
	23. SULAWESI UTARA	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 350.000	Rp. 200.000
	24. GORONTALO	Rp. 500.000	Rp. 450.000	Rp. 300.000	Rp. 150.000
	25. SULAWESI BARAT	Rp. 500.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 150.000
	26. SULAWESI SELATAN	Rp. 650.000	Rp. 500.000	Rp. 350.000	Rp. 200.000
	27. SULAWESI TENGAH	Rp. 500.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 150.000
	28. SULAWESI TENGGARA	Rp. 500.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
	29. MALUKU	Rp. 450.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000
	30. MALUKU UTARA	Rp. 450.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000
	31. PAPUA	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000
	32. IRIAN JAYA BARAT	Rp. 500.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS					
	PEJABAT/PEGAWAI GOLONGAN	FASILITAS HOTEL		KELAS	
1	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan para Wakil Ketua DPRD	Bintang IV		Delux	
2	Para Anggota DPRD dan Sekdakab	Bintang IV		Delux	
3	Pegawai Golongan IV Eselon II	Bintang IV		Delux	
4	Pegawai Golongan IV diluar Eselon II	Bintang III		Standar	
5	Pegawai golongan III dan Dokter PTT	Bintang II		Standar	
6	Pegawai Golongan II, I dan Bidan PTT	Bintang I		Standar	
B.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	UANG HARIAN			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D

1. KALIANDA	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
2. RADJABASA	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
3. PENENGAHAN	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
4. PALAS	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
5. SERAGI	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
6. KETAPANG	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
7. BAKAU HENI	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
8. SIDOMULYO	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
9. CANDIPURO	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
10. WAY PANJI	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
11. KATIBUNG	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
12. WAY SULAM	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
13. MERBAU MATARAM	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
14. TANJUNG SARI	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
15. TANJUNG BINTANG	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
16. JATI AGUNG	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
17. NATAR	Rp. 260.000	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
18. Kecamatan ke Desa, Desa ke Kecamatan Desa ke Desa dalam Kecamatan	Rp. 60.000	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
BESARNYA BANTUAN TRANSPORT PENYEBERANGAN ANTAR PULAU DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN				
No	U R A I A N			JUMLAH BANTUAN
1	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah peserta 1 – 10 pegawai, bantuan transport penyeberangan per Tim			Rp. 350.000
2	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah peserta 11 – 20 orang pegawai, bantuan penyeberangan transport per Tim			Rp. 700.000
Catatan : 1. Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal/PP dan uang makan bersifat lumpsum. 2. Bagi pejabat, pegawai Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan ke Desa-desanya hanya diberikan uang harian sampai keibukota Kecamatan. 3. Perjalanan dinas Kecamatan ke Desa, Desa ke Kecamatan dan Desa ke Desa dibayar perhari kerja (bukan perjumlah Desa yang dikunjungi)				
Bantuan Transport untuk Daerah Terpencil		1 Semua Golongan	Rp. 250.000	Rp. - Rp. - Rp. 250.000

Perjalanan Dinas Luar Negeri		1	Golongan IV	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 500.000
		2	Golongan III	Rp. 450.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 450.000
13	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan						
	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor						
	BADAN/DINAS/SEKWAN/KANTOR/CAMAT						
	Biaya Reparasi & Penggantian Suku Cadang						
		1	Mobil Minibus, Jeep		1 Tahun	Rp.	5.000.000
		2	Mobil Bus 3/4, Bus Besar, Truck		1 Tahun	Rp.	6.000.000
		3	Sepeda Motor		1 Tahun	Rp.	500.000
	Biaya Service	1	Mobil Minibus, Jeep		1 Tahun	Rp.	750.000
		2	Mobil Bus 3/4, Bus Besar, Truck		1 Tahun	Rp.	1.000.000
		3	Sepeda Motor		1 Tahun	Rp.	100.000
	Bantuan Biaya Pembelian BBM (Bensin dan Solar)	1	Mobil Minibus		Unit / Bulan	Rp.	3.600.000
		2	Mobil Jeep		Unit / Bulan	Rp.	3.600.000
		3	Mobil Bus ¾		Unit / Bulan	Rp.	3.600.000
		4	Mobil Bus Besar		Unit / Bulan	Rp.	3.600.000
		5	Mobil Truck		Unit / Bulan	Rp.	3.600.000
		6	Sepeda Motor		Unit / Bulan	Rp.	270.000
	Bantuan Biaya Pembelian Pelumas	1	Mobil Minibus		Unit / Bulan	Rp.	150.000
		2	Mobil Jeep		Unit / Bulan	Rp.	150.000
		3	Mobil Bus ¾		Unit / Bulan	Rp.	250.000
		4	Mobil Bus Besar		Unit / Bulan	Rp.	250.000
		5	Mobil Truck		Unit / Bulan	Rp.	250.000
		6	Sepeda Motor		Unit / Bulan	Rp.	

				1.200.000	
	Pembelian Ban		Unit / Tahun	Rp. 7.500.000	
	SEKRETARIS DAERAH				
	Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang	1 Kendaraan Sekretariat Daerah	Unit / Tahun	Rp. 17.500.000	
	Biaya service		Unit / Tahun	Rp. 7.500.000	
	Bantuan biaya pembelian BBM premix		Unit / Bulan	Rp. 8.500.000	
	Bantuan biaya pembelian pelumas		Unit / Bulan	Rp. 750.000	
	Pembelian Accu		Unit / Tahun	Rp. 1.200.000	
	Pembelian Ban		Unit / Tahun	Rp. 7.500.000	
	KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD				
	Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang	1 Kendaraan Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Unit / Tahun	Rp. 25.000.000	
	Biaya service		Unit / Tahun	Rp. 20.000.000	
	Bantuan biaya pembelian BBM premix		Unit / Bulan	Rp. 15.000.000	
	Bantuan biaya pembelian pelumas		Unit / Bulan	Rp. 750.000	
	Pembelian Accu		Unit / Tahun	Rp. 1.200.000	
	Pembelian Ban		Unit / Tahun	Rp. 7.500.000	
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung				
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Perkantoran	1 Badan / Dinas / Kantor / Sekretariat	Unit / Tahun	Rp. 15.000.000	
15	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya				
	Belanja Pemeliharaan Komputer Meja (Desktop)	1 Badan / Dinas / Kantor / Sekretariat	Unit / Tahun	Rp. 1.500.000	
	Belanja Pemeliharaan Komputer Laptop, Notebook, Desknote atau yang sejenis	1 Badan / Dinas / Kantor / Sekretariat	Unit / Tahun	Rp. 250.000	
	Belanja Pemeliharaan Printer	1 Badan / Dinas / Kantor / Sekretariat	Unit / Tahun	Rp. 1.000.000	

				150.000
	4	Golongan III	Kegiatan / hari	Rp. 100.000
	5	Golongan II	Kegiatan / hari	Rp. 75.000
	6	Tenaga Ahli	1 Jam	Rp. 100.000
Kegiatan Kepemimpinan /Diklat/Kepanitiaan dll Untuk kegiatan yang dilaksanakan diatas 15 hari honorarium dibayar per bulan (bulanan)	1	Pelindung / Pembina	Orang / Bulan	Rp. 150.000
	2	Penasehat	Orang / Bulan	Rp. 125.000
	3	Ketua	Orang / Bulan	Rp. 125.000
	4	Wakil Ketua I	Orang / Bulan	Rp. 100.000
	5	Wakil Ketua II	Orang / Bulan	Rp. 100.000
	6	Sekretaris	Orang / Bulan	Rp. 100.000
	7	Wakil Sekretaris	Orang / Bulan	Rp. 75.000
	8	Anggota	Orang / Bulan	Rp. 60.000
Bila Pelaksanaan Kegiatan 15 hari kebawah maka honorarium dibayar per kegiatan	1	Pelindung / Pembina	Orang / Hari	Rp. 125.000
	2	Penasehat	Orang / Hari	Rp. 100.000
	3	Ketua	Orang / Hari	Rp. 100.000
	4	Wakil Ketua I	Orang / Hari	Rp. 75.000
	5	Wakil Ketua II	Orang / Hari	Rp. 75.000
	6	Sekretaris	Orang / Hari	Rp. 75.000
	7	Wakil Sekretaris	Orang / Hari	Rp. 50.000
	8	Anggota	Orang / Hari	Rp.

				50.000	
19	Biaya Jasa Pihak Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Biaya Jasa Pelatihan dan Kursus Keterampilan Untuk Kegiatan yang dilaksanakan diatas 3 hari dapat dibuatkan SPK, Kontrak atau MOU atau Perjanjian sejenis Lainnya dengan Pihak Ketiga Tarif disesuaikan dengan Harga Negosiasi				
20	Biaya Operasional Terhadap Kegiatan yang bersifat Operasional Teknis akan ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati lebih lanjut				

--- BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA